

Project Supervisory Unit – Project Implementing Unit KELOLA Sendang

Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku



MERENDA KERJA BERSAMA MENUJU LANSKAP BERKELANJUTAN



2018



Tim Pengarah :

1. Dr. Ir. Najib Asmani, M.Si (Staff Ahli Gubernur Sumsel)
2. Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM. M.Kes. (Kepala BAPPEDA Prov. Sumsel)
3. Dr. Budi S. Wardhana (Badan Restorasi Gambut)
4. Ir. Listya Kusuma Wardhani, M.Sc (Kementerian LHK)

Tim Penyusun:

1. Regina Ariyanti, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
2. Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E. (Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)
3. Ir. Hendrian, M.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
4. Yanuar Suhartono, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
5. Ir. H. Anung Riyanta, M.Sc. (Dinas Perkebunan Prov. Sumsel)
6. H. Dwiva Putra, SP., M.S.E. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
7. Ir. H. Hadenli Ugihan, M.Si. (DLHP Prov. Sumsel)
8. Faustino Do Carmo, S.T. (Dinas PU BMTR Prov. Sumsel)
9. Sutomo, S.Hut, M.Si. (Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)
10. Ir. Ismail Darwin (BAPPEDA Prov. Sumsel)
11. Herlan Kagami, SP., M.Si. (Dinas Perkebunan Prov. Sumsel)
12. Rezawahya, M.Dev.Prac. (DLHP Prov. Sumsel)
13. Danang P.M., S.Hut (Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)
14. Muhammad Andy (DLHP Prov. Sumsel)
15. Andhi Wiriansyah, ST. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
16. Ridawana, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
17. Ariyati, ST., M.P.A. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
18. Nurfadiela, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
19. Tim Penabulu - ZSL – KELOLA Sendang

Narasumber :

1. Anggota POKJA Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin
2. Anggota POKJA Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin
3. Yuwono Aries, S.T., M.T. (BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin)
4. Erica Oktariani, S.T. (BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin)
5. Iwan Adi Ratmoko, S.Hut., M.Si. (BAPPEDA Kab. Banyuasin)
6. Lisdawati, S.P., M.Si. (BAPPEDA Kab. Banyuasin)
7. Dr. Erwin Martin, S.Hut., M.Si. (Balitbanghut Prov. Sumsel)
8. Octavia Susilowati, S. Hut. (Balai KSDA Prov. Sumsel)
9. Affan Absori, S.T. (Balai TN Berbak dan Sembilang)
10. Ir. Zulfikar, MM. (PT. GAL)
11. Harry Hartanto (GAPKI)
12. Iwan Setiawan, S.Hut. (APHI)
13. Ernita Sriwahyuni, S.P. (APHI)

*Sumber Foto: Koleksi ZSL-KELOLA Sendang dan Forum Dangku Meranti

KATA PENGANTAR

Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Masterplan Kelola Sendang) menyajikan rencana induk pengembangan kemitraan di Lanskap Sembilang Dangku untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan sebagai penopang Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*) di Sumatera Selatan. Dokumen ini merupakan hasil pencermatan para pihak terhadap kondisi, potensi dan permasalahan penghidupan masyarakat, konservasi dan produksi di Lanskap Sembilang Dangku serta harapan kondisinya di masa mendatang, yaitu terwujudnya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lanskap Sembilang Dangku adalah salah satu lanskap di Sumatera Selatan yang menjadi model dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dengan *landscape approach* (pendekatan lanskap). Lanskap ini memiliki fungsi penting sebagai kawasan konservasi (lokasi prioritas restorasi lahan gambut BRG dan 3 kawasan konservasi), produksi (67,48% total luasan adalah hutan produksi dan perkebunan) serta penghidupan bagi masyarakat (816.748 jiwa penduduk). Oleh karena itu lanskap ini memerlukan suatu dokumen perencanaan yang dapat mengintegrasikan perencanaan para pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda.

Masterplan Kelola Sendang mengintegrasikan perencanaan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku dalam tema-tema kolaborasi yang disusun berdasarkan isu strategis di dalam lanskap. Isu strategis dirumuskan melalui kajian terhadap potensi dan permasalahan dalam pengelolaan lanskap yang merupakan hasil telaah kebijakan dan dokumen perencanaan para pemangku kepentingan serta diskusi kelompok terfokus dan lokakarya multipihak. Para pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai *leading sector* dalam penyusunan masterplan ini. Pemerintah daerah melalui Tim Project Supervisory Unit – Project Implementation Unit (PSU-PIU) KELOLA Sendang kemudian mengolah masukan tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka program kolaboratif dan pengembangan kemitraan multipihak.

Dalam penyusunan masterplan ini Tim PSU-PIU KELOLA Sendang didukung oleh beberapa unsur tenaga ahli dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Dukungan ini menjadikan data dan informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif. Untuk kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak dalam Konsorsium KELOLA Sendang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memungkinkan dilaksanakannya program dan kegiatan untuk penyusunan masterplan kemitraan ini. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Sebagai penutup, kami harapkan dokumen ini dapat dijadikan pedoman penyusunan rencana aksi kemitraan untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan.

Palembang, Agustus 2018
Koordinator PSU-PIU KELOLA Sendang
REGINA ARIYANTI, S.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Ruang Lingkup	3
1.3.1. Ruang Lingkup Kajian.....	3
1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah	3
1.3.3. Ruang Lingkup Waktu Perencanaan.....	3
1.4. Metodologi	3
1.4.1. Pendekatan.....	3
1.4.2. Tahapan 4	
2. Lanskap Berkelanjutan.....	5
2.1. Mengenal Pendekatan Lanskap.....	5
2.2. Lanskap Berkelanjutan dan <i>SDGs</i>	11
2.3. Pendekatan Lanskap di Sumsel	15
2.3.1. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan	15
2.3.2. KOLEGA Sumsel	16
3. Kajian Kebijakan Terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan.....	18
3.1. Pendekatan Lanskap Dalam Rencana Pembangunan.....	19
3.2. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam	20
3.3. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati	21
3.4. Pendekatan Lanskap Dalam Tata Kelola Pemerintahan	22
3.5. Inovasi Kebijakan Daerah Pendukung Pendekatan Lanskap	23
3.6. Kebijakan dan Agenda Strategis.....	25
3.6.1. Pemulihan Ekosistem dan Pengurangan Emisi.....	25
3.6.2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.....	26
3.6.3. Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	27
3.6.4. Pengembangan Kebijakan yang mendukung kolaborasi antar pihak.....	28
4. Profil Lanskap Sembilang Dangku	30
4.1. Gambaran Umum Lanskap	30
4.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi	35
4.2.1. Dinamika Kependudukan	35
4.2.2. Tingkat Pendidikan	36
4.2.3. Aset dan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan	37

4.2.4. Mata Pencaharian	39
4.2.5. Komoditi Utama Pertanian.....	40
4.2.6. Perekonomian Wilayah	54
4.3. Kondisi Biofisik.....	63
4.3.1. Kondisi Fisik.....	63
4.3.2. Tutupan Lahan.....	70
4.3.3. Keanekaragaman Hayati pada Lanskap Sembilang Dangku	74
4.4. Peruntukan Lahan Kawasan Hutan dan Perkebunan	79
4.4.1. Kawasan Hutan.....	79
4.4.2. Kawasan Perkebunan	87
5. Pemangku Kepentingan	89
5.1. Pemangku Kepentingan dari Pemerintah.....	89
5.2. Perusahaan-Perusahaan di Lanskap Sembilang Dangku	94
5.3. Lembaga Swadaya Masyarakat	96
5.4. Para Pemangku Kepentingan Lainnya	97
5.5. Mengembangkan Sinergitas Para Pemangku Kepentingan.....	97
6. Isu Strategis Lanskap Sembilang Dangku	98
6.1. Konflik Pemanfaatan Lahan.....	98
6.2. Pembalakan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin	100
6.3. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan	102
6.4. Degradasi Ekosistem Sungai dan Rawa	103
6.5. Konflik Antara Manusia dan Satwa	103
6.6. Produktivitas Pertanian Rendah.....	104
6.7. Nilai Tambah Komoditi Pertanian Rendah	105
6.8. Fluktuasi Harga Komoditi Utama.....	105
6.9. Rendahnya Variasi Produk Pertanian	105
6.10. Tingkat Kemiskinan Yang Masih tinggi	106
6.11. Tingkat Pendidikan Masih Rendah	106
6.12. Akses Sumberdaya Lahan Masyarakat	106
6.13. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	108
7. Rancangan Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Lanskap	109
7.1. Tahapan Menuju Lanskap Yang Berkelanjutan	109
7.2. Kerangka Logis Untuk Lanskap Berkelanjutan.....	111
7.3. Desain Integrasi Sektor-Sektor Pembangunan.....	112
7.3.1. Pendekatan Holistik Tematik.....	112
7.3.2. Pengembangan Kualitas Kemitraan	113
7.3.3. Pengembangan Area Lanskap	114
7.4. Desain Aksi Kemitraan.....	117
7.4.1. Pengembangan Area Model Kemitraan	117

7.4.2. Pengembangan Database Lanskap Sembilang Dangku	121
7.5. Desain Kelembagaan	121
7.6. Sistem Monitoring dan Evaluasi	123
7.6.1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi	123
7.6.2. Aspek-aspek yang Dipantau dan Dievaluasi	123
7.6.3. Intensitas Monitoring dan Evaluasi	123
7.6.4. Media dan Alat Pemantauan dan Evaluasi	124
LAMPIRAN.....	125
Lampiran 1. Kerangka Logis Alur Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku.....	125
Lampiran 2. Tabel Identifikasi Program dan Kegiatan Stakeholder.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Parameter Kunci dalam Lanskap Berkelanjutan	13
Tabel 2.2 Hubungan antara SDGs dan Parameter/ <i>Outcomes</i> dari Lanskap Berkelanjutan	13
Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan tahun 2016	32
Tabel 4.2 Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Jenis Perizinan.....	38
Tabel 4.3 Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Sumber Penghasilan Utamanya dan Status Pekerjaan	40
Tabel 4.4 Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin.....	52
Tabel 4.5 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Sektor Usaha Kabupaten Banyuasin	56
Tabel 4.6 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. Musi Banyuasin.....	57
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kegiatan	62
Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten	62
Tabel 4.9 Jenis-jenis primata dan status konservasinya di Sumatera Selatan	77
Tabel 5.1 Pemangku Kepentingan dari Pemerintah Pusat	90
Tabel 5.2 Pemangku Kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	92
Tabel 5.3 Pemangku Kepentingan Dari Pemerintah Kabupaten	93
Tabel 5.4 Daftar Perusahaan Pertambangan di Lanskap Sembilang Dangku	94
Tabel 5.5 Daftar Perusahaan HTI di Lanskap Sembilang Dangku.....	95
Tabel 5.6 Daftar Perusahaan Perkebunan di Lanskap Sembilang Dangku	95
Tabel 5.7 Daftar LSM Yang Berkegiatan di Lanskap Sembilang Dangku	96
Tabel 7.1 Periode Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku	109
Tabel 7.2 Tahapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kemitraan	113
Tabel 7.3 Indikator dan Target Tema Pelestarian Ekosistem dan Perbaikan Tutupan Lahan.....	114
Tabel 7.4 Indikator dan Target Tema Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan.....	114
Tabel 7.5 Target dan Indikator Tema Perkebunan dan Hutan Tanaman Berkelanjutan	115
Tabel 7.6 Indikator dan Target Tema Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di Pedesaan	115
Tabel 7.7 Indikator Kinerja Tema V: Pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Elemen Dalam Pendekatan Lanskap	7
Gambar 2.2 Tingkatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lanskap	8
Gambar 2.3 Struktur Kelembagaan GGP dan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion	17
Gambar 3.1 Alur Pikir Kajian Kebijakan	29
Gambar 4.1 Posisi Lanskap Sembilang Dangku Dalam Provinsi Sumatera Selatan	30
Gambar 4.2 Grafik rasio luas wilayah Kecamatan Pada Lanskap Sembilang-Dangku	31
Gambar 4.3 Peta Penggunaan Lahan Pada Lanskap Sendang	33
Gambar 4.4 Grafik Rasio Penggunaan Lahan di Lanskap Sembilang Dangku	34
Gambar 4.5 Perkembangan jumlah penduduk pada Lanskap Sembilang Dangku	35
Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Lanskap Sembilang Dangku.....	35
Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyuasin	36
Gambar 4.8 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Musi Banyuasin	37
Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Yang Menguasai Lahan Kawasan Hutan Menurut Golongan Luas Lahan.....	38
Gambar 4.10 Karakteristik Mata Pencarian Penduduk 3 Desa di Lanskap Sendang	39
Gambar 4.11 Kondisi Tanaman Karet pada Lanskap Sembilang Dangku.....	41
Gambar 4.12 Perkembangan Produksi Getah Karet di Lanskap Sendang	41
Gambar 4.13 Sebaran Luas Tanaman Karet Pada Lanskap Sendang	42
Gambar 4.14 Kecenderungan Perubahan Harga Karet Dunia (USD/kilogram).....	42
Gambar 4.15 Kondisi Tanaman Sawit Rakyat Pada Lanskap Sembilang Dangku.....	43
Gambar 4.16 Dinamika Produksi TBS Rakyat pada Lanskap Sendang	44
Gambar 4.17 Dinamika Produktivitas TBS Rakyat pada Lanskap Sendang	44
Gambar 4.18 Sebaran Kebun Sawit Rakyat pada Lanskap Sendang 2012-2016.....	45
Gambar 4.19 Kecenderungan Perubahan Harga Sawit (USD/Metric Ton)	45
Gambar 4.20 Luas Kopi Rakyat Berdasar Kondisi Tanaman Pada Lanskap Sendang	46
Gambar 4.21 Produksi Kopi Rakyat Pada Lanskap Sendang	46
Gambar 4.22 Produktivitas Kopi Rakyat	47
Gambar 4.23 Dinamika Harga Kopi Dunia	47
Gambar 4.24 Kondisi Tanaman Kelapa di Lanskap Sendang	48
Gambar 4.25 Potensi Kelapa di Lanskap Sendang.....	48
Gambar 4.26 Produksi Kopra di Lanskap Sendang	49
Gambar 4.27 Luas dan Produksi Padi di Lanskap Sendang.....	49
Gambar 4.28 Sebaran Luas Areal Padi Sawah/Lebak di Lanskap Sendang.....	50
Gambar 4.29 Produktivitas Padi di Lanskap Sendang.....	51
Gambar 4.30 Produksi Perikanan Lanskap Sendang.....	53
Gambar 4.31 Jumlah Ternak Besar di Area Lanskap Sembilang Dangku	53
Gambar 4.32 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin	54
Gambar 4.33 Distribusi PDRB Setiap Sektor Kab. Musi Banyuasin dan Banyuasin (2016)	55
Gambar 4.34 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.....	58
Gambar 4.35 Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan Kab. Banyuasin Tahun 2016	59
Gambar 4.36 Jalan Menurut Kondisi & Status Jalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016	60
Gambar 4.37 Prosentase Penduduk Miskin di Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin	61
Gambar 4.38 Peta Kemiringan Lereng Lanskap Sembilang Dangku	64
Gambar 4.39 Peta Ketinggian Kawasan Lanskap Sembilang Dangku	64
Gambar 4.40 Peta Kawasan Hutan DAS Musi.....	65
Gambar 4.41 Peta DAS pada lanskap Sembilang Dangku.....	66
Gambar 4.42 Peta Ekoregion Sumatera	67

Gambar 4.43 Peta Indikatif Prioritas Restorasi Provinsi Sumatera Selatan.....	69
Gambar 4.44 Peta perubahan tutupan lahan Lanskap Sembilang Dangku (2000-2015).....	71
Gambar 4.45 Peta Tutupan Lahan Area KELOLA Sendang 2014.....	72
Gambar 4.46. Lahan Kritis di Dalam Konsesi di Area Lanskap Sendang	72
Gambar 4.47 Lahan Kritis di Luar Konsesi di Area Lanskap Sendang.....	73
Gambar 4.48 Prioritas Restorasi Gambut BRG di Area Lanskap Sendang	73
Gambar 4.49 Peta Kawasan Hutan di Lanskap Sembilang Dangku.....	80
Gambar 4.50 Peta Zonasi Taman Nasional Sembilang	83
Gambar 4.51 Warga Dusun Sei Sembilang Mengambil Air dari Sumur Bor	84
Gambar 4.52 Tumpukan Sampah di Dusun Sei Sembilang.....	84
Gambar 4.53 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan	85
Gambar 4.54 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Dangku	86
Gambar 6.1 Peta konflik lahan di Taman Nasional Sembilang	99
Gambar 6.2. Perambahan di kawasan Suaka Marga Satwa Dangku	100
Gambar 6.3 Alur jaringan illegal logging di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin	100
Gambar 6.4 Rakit Log dan Tumpukan Kayu di Kawasan TN Sembilang.....	101
Gambar 6.5 Pertambangan Minyak oleh Masyarakat di Desa Muara Medak.....	102
Gambar 6.6 Sebaran area kebakaran tahun 2015 pada lanskap Sembilang Dangku.	103
Gambar 6.7 Lokasi PIAPS di Area Lanskap Sebilang Dangku	107
Gambar 7.1 Skema Pengembangan Kemitraan	110
Gambar 7.2 Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang	111
Gambar 7.3 Peleburan Isu Strategis Ke Dalam Tema Kemitraan.....	113
Gambar 7.4 Peta Lokasi Area Model Kemitraan.....	117
Gambar 7.5 Peta Lokasi Area Model 1: Kawasan Hutan Dangku Meranti	118
Gambar 7.6 Peta Lokasi Area Model 2: KHG S. Merang - S. Ngirawan	119
Gambar 7.7 Peta Lokasi Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Berbak Sembilang.....	120
Gambar 7.8 Model Kelembagaan dalam Kemitraan Pengelolaan Lanskap	122



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki visi “Pertumbuhan Ekonomi Hijau/ *Green Growth*” untuk menciptakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan regional. Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah provinsi mendorong kemitraan dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Komitmen terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 21/2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan.


Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan atau sering disebut dengan *Green Growth Plan* Sumatera Selatan (GGP Sumsel) adalah titik temu antara rencana tata ruang dan tata guna lahan dengan rencana pembangunan yang berdampak lingkungan rendah, pertumbuhan ekonomi sesuai target capaian, dan keterlibatan para pihak dalam rangka GGP. Untuk mendukung GGP Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion (KOLEGA Sumsel) dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017. Dalam aturan ini, pengelolaan dilakukan berbasis tapak di masing-masing lanskap dan sub lanskap di wilayah provinsi. Para pihak yang melakukan kegiatan terkait pengelolaan lanskap pada masing-masing lanskap berkoordinasi agar sejalan dengan visi dan misi pengelolaan lanskap berkelanjutan dan pertumbuhan hijau provinsi.¹

Lanskap Sembilang Dangku adalah salah satu lanskap di Sumatera Selatan. Lanskap ini mencakup wilayah dengan luasan sekitar 1,6 juta hektar yang secara administratif berada di 19 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Di dalam lanskap ini terdapat sekitar 816.748 jiwa penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam.

Sumberdaya alam di Lanskap Sembilang Dangku memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi ini menarik banyak perusahaan untuk berinvestasi. Perusahaan tersebut melakukan usaha di sektor perkebunan dengan komoditi sawit dan karet, sektor kehutanan dengan produksi kayu sebagai bahan baku industri *pulp*, maupun pertambangan batubara dan minyak bumi.

Selain nilai penting lanskap bagi penghidupan masyarakat dan produksi, Lanskap Sembilang Dangku juga memiliki nilai penting bagi konservasi. Di dalam lanskap ini terdapat berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut adalah hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, lahan gambut dan ekosistem lain yang menjadi habitat bagi hidupan liar baik flora maupun fauna. Nilai

¹ Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2017 (Pasal 11)



penting lanskap ini bagi pelestarian keanekaragaman hayati tercermin dengan ditetapkannya tiga kawasan konservasi di dalamnya, yaitu Taman Nasional Sembilang serta Suaka Margasatwa Dangku dan Suaka Margasatwa Bentayan.


Berbagai kepentingan di Lanskap Sembilang Dangku yaitu kepentingan penghidupan masyarakat, produksi dan konservasi seringkali berbenturan. Para pihak memiliki tujuan dan target pengelolaan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling bertentangan sehingga mengorbankan keberlanjutan lanskap. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat memfasilitasi kepentingan para pihak tanpa harus mengorbankan kepentingan pihak lain. Pendekatan lanskap diyakini mampu menyediakan alat dan konsep untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah yang memiliki fungsi beragam. Pendekatan lanskap ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu 1) inklusivitas, 2) integrasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, serta 3) data, informasi dan pemodelan yang sah. Untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan kemitraan para pihak dalam pengelolaan lanskap.

KELOLA Sendang (Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku) adalah salah satu upaya untuk membangun kemitraan para pihak melalui pendekatan lanskap. Untuk mewujudkan kemitraan tersebut dibutuhkan 5 (lima) elemen, yaitu 1) platform berbagai pemangku kepentingan, 2) pemahaman bersama tentang kondisi lanskap, tantangan dan peluang, 3) Perencanaan Kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi yang telah disepakati, 4) Pelaksanaan Rencana dengan perhatian pada mempertahankan komitmen kerjasama, serta 5) Pemantauan Pengelolaan Adaptif dan Akuntabilitas.

Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Masterplan KELOLA Sendang) merupakan suatu bentuk perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi kemitraan di Lanskap Sembilang Dangku. Sebagai bentuk perencanaan kolaboratif, Masterplan KELOLA Sendang disusun berdasarkan masukan dari parapihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku. Parapihak tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan menjadi inisiator utama dalam penyusunan masterplan kemitraan ini, sehingga kemitraan dan agenda di dalamnya dapat disinkronkan dengan perencanaan dan agenda pemerintah.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Masterplan KELOLA Sendang) adalah menyusun pedoman kemitraan untuk mewujudkan lanskap berkelanjutan sebagai penopang Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Sumatera Selatan.



Sasaran dari penyusunan masterplan kemitraan ini adalah:

- Tersusunnya kerangka pengembangan program kemitraan untuk mewujudkan visi lanskap berkelanjutan
- Tersusunnya alternatif kelembagaan kemitraan pengelolaan lanskap
- Tersusunnya sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemitraan pengelolaan lanskap

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup kajian dalam penyusunan Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku meliputi kajian kebijakan terkait lanskap berkelanjutan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, kajian isu terkait penghidupan masyarakat, produksi, dan konservasi, dan pemetaan para pihak dan inisiatif terkait pengelolaan sumberdaya alam di Lanskap Sembilang Dangku.

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam masterplan ini adalah Lanskap Sembilang Dangku yang meliputi area 5 sub DAS di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Lanskap ini memiliki luasan sekitar 1,6 juta hektar yang di dalamnya terdapat 223 desa dalam 19 kecamatan, satu unit taman nasional, dua unit suaka margasatwa, dan puluhan perusahaan pemegang hak konsesi kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

1.3.3. Ruang Lingkup Waktu Perencanaan


Rentang waktu perencanaan dalam masterplan ini terdiri dari perencanaan jangka panjang (10 tahun/ 2018-2028), dan jangka menengah (5 tahun)

1.4. Metodologi

1.4.1. Pendekatan

Dalam penyusunan masterplan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- Pendekatan teknokratis (*scientific based*)
Dokumen ini disusun berdasarkan pertimbangan dan kerangka yang rasional dan sistematis. Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada pada logika dan konsep yang berkembang di bidang perencanaan secara umum maupun di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Informasi, Data dan hasil-hasil penelitian lembaga-lembaga ilmu pengetahuan juga diacu sebagai dasar dari penyusunan dokumen ini.

- 
- Pendekatan *legal formal*
Penyusunan dokumen ini mengacu dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada kebijakan-kebijakan terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Data dan informasi yang digunakan dalam dokumen rencana induk ini juga data resmi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.
 - Pendekatan partisipatif
Selain Penyusunan dokumen ini tidak hanya menggunakan pendekatan kepakaran ilmiah dan juga legal formal semata, namun juga dikombinasikan dengan aspirasi para pihak. Selain pemerintah provinsi dan kabupaten, dokumen ini juga mempertimbangkan aspirasi pihak swasta dan juga masyarakat, LSM dan juga pihak perguruan tinggi.

1.4.2. Tahapan

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data
2. Review kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten
3. Pemetaan parapihak
4. Konsultasi dengan para pihak
5. Kajian isu/ permasalahan di tingkat lanskap
6. Menyusun kerangka program kemitraan pengelolaan lanskap melalui lokakarya multipihak
7. Menyusun alternatif kelembagaan kemitraan pengelolaan lanskap



2. LANSKAP BERKELANJUTAN

2.1. Mengenal Pendekatan Lanskap

Pada tingkat global kita menghadapi tantangan yang cukup pelik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun kualitas lingkungan hidup. Kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan produksi pangan terus meningkat seiring terus berkembangnya populasi manusia. Badan Pangan Dunia (*FAO*) memperkirakan kebutuhan produksi pangan akan meningkat hingga 70% pada 2050 dimana populasi manusia diperkirakan akan mencapai 9,1 milyar. Di lain pihak ketersediaan faktor-faktor pendukung kehidupan seperti, tanah, air, kesuburan tanah, dan juga keragaman hayati terus mengalami penurunan.

Banyak kontradiksi yang kita hadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Intensifikasi produksi pangan menjawab kebutuhan pangan namun dapat mengganggu fungsi jasa lingkungan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan ataupun penghidupan masyarakat itu sendiri. Untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan melindungi keragaman hayati dari kepunahan, membutuhkan pengorbanan dari sisi produksi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan demikian pula sebaliknya. Permasalahan ini harus disikapi dengan langkah-langkah terpadu. Cara-cara sektoral yang saat ini masih dominan digunakan sudah terbukti tidak mampu mengatasi persoalan yang ada saat ini. Pendekatan lanskap telah mengemuka sebagai salah satu solusi².


Pendekatan lanskap adalah kerangka konseptual di mana pemangku kepentingan di suatu lanskap berupaya untuk menyatukan tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang bertentangan. Pendekatan ini mencoba untuk beralih dari pendekatan sektoral pengelolaan lahan yang sering kali tidak berkelanjutan. Pendekatan lanskap mencoba untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dan terwujudnya tindakan di tingkat lokal (kepentingan berbagai pemangku kepentingan di lanskap tersebut), dan pada saat yang sama juga mempertimbangkan tujuan dan hasil yang penting bagi pemangku kepentingan di luar lanskap tersebut, seperti pemerintah pusat atau komunitas internasional.³

Lanskap dalam kaitannya dengan pendekatan lanskap diartikan sebagai sebuah sistem sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem alam dan/atau ekosistem modifikasi manusia, yang dipengaruhi oleh kegiatan ekologi, historis, politik, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Pengaturan ruang dan tata kelola lanskap berkontribusi pada karakternya yang unik⁴.

² Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C. and van Oosten, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21), pp.8349-8356.

³ Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N., 2015. *The Little Sustainable Landscape Book*. Global Canopy Programme. hal. 10

⁴ Ibid, hal. 26



Pendekatan lanskap bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Upaya-upaya yang menekankan keterpaduan agenda-agenda lingkungan dan pembangunan telah dipromosikan secara konsisten dalam kurun 40 tahun belakangan ini, baik dari sisi literatur maupun konferensi-konferensi internasional. Pada pertengahan 1980-an terjadi pergeseran paradigma yang berasal dari komunitas-komunitas konservasi dan juga kemunculan disiplin baru tentang ekologi lanskap (*landscape ecology*). Beberapa inisiatif seperti *Wildlands and Human Needs Programme* dari WWF, Dialog Kebijakan seperti Brundtland Report, KTT Bumi 1992 dan Agenda 21 menghasilkan transisi dari pendekatan konservasi yang juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat pedesaan dengan memperkenalkan dan menggunakan pendekatan *multi-functional landscapes*⁵.

Setelah KTT Bumi di Rio Pendekatan Lanskap dihubungkan dengan Pembangunan Berkelanjutan yang mendorong *pendekatan lintas sektor, multipihak, dan keterpaduan kebijakan* dalam skala yang memadai, termasuk lanskap. Saat ini pendekatan lanskap dihubungkan dengan kebijakan terkait perubahan iklim dimana pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan perencanaan penggunaan lahan secara terpadu – khususnya pertanian dan kehutanan-dibutuhkan sebagai mitigasi perubahan iklim selain transisi penggunaan bahan bakar non fosil⁶.

Pendekatan lanskap atau sering juga disebut dengan pengelolaan lanskap terpadu (*integrated landscape management*) merupakan pendekatan yang multidimensi. Semua dimensi yang ada pada lanskap seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pendekatan lanskap ini. Pendekatan lanskap harus mempertimbangkan dimensi **ekologi hingga ekonomi**, dan juga dimensi **sosial-budaya hingga aspek politik** yang mempengaruhi dinamika pengelolaan di tingkat lanskap⁷.

Pendekatan lanskap merupakan salah satu “pilihan” untuk mengembangkan, mempererat “konektivitas” antar aktor untuk mewujudkan visi bersama pembangunan berkelanjutan. **Pemerintah-masyarakat-swasta** harus mengembangkan pemahaman dan visi bersama tentang masa depan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup mereka. Lebih jauh lagi parapihak dituntut untuk dapat mengembangkan konsep, sistem dan juga perangkat untuk dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi pada tingkat lanskap. Pendekatan lanskap berusaha menyediakan alat dan konsep untuk mengalokasikan dan mengelola lahan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah di mana pertanian, pertambangan, dan lahan produktif lainnya bersaing dengan tujuan lingkungan dan keanekaragaman hayati.⁸

⁵ Reed, J., Van Vianen, J., Deakin, E.L., Barlow, J. and Sunderland, T., 2016. Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics: learning from the past to guide the future. *Global change biology*, 22(7), pp.2540-2554.

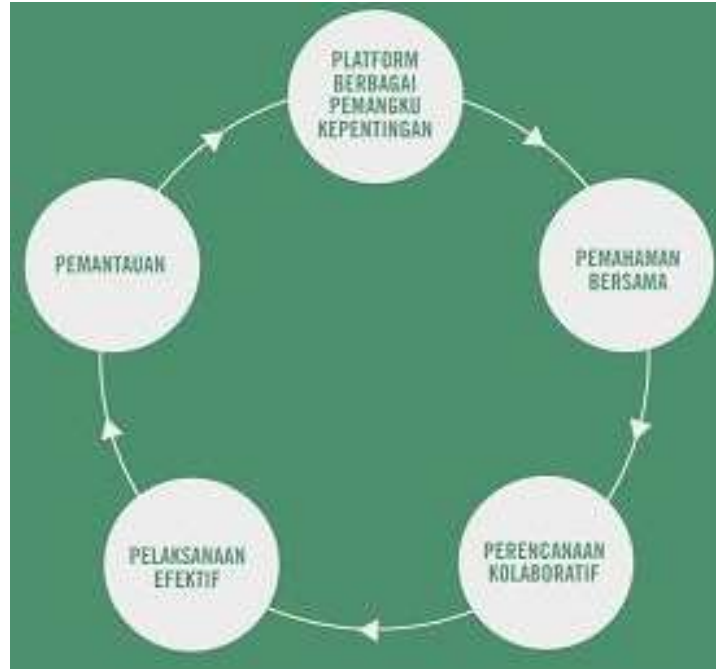
⁶ Arts, B., Buizer, M., Horlings, L., Ingram, V., van Oosten, C. and Opdam, P., 2017. Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review. *Annual Review of Environment and Resources*.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

Elemen Dalam Pendekatan Lanskap

Dalam melaksanakan pendekatan lanskap ini terdapat beberapa unsur atau elemen yang harus dikelola oleh parapihak yang ada didalamnya, elemen-elemen itu adalah 1) platform berbagai pemangku kepentingan, 2) pemahaman bersama, 3) perencanaan kolaboratif, 4) pelaksanaan efektif, dan 5) pemantauan. Para pemangku kepentingan di lanskap tersebut tertarik untuk saling bertemu untuk mengembangkan dialog dan aksi kerjasama dalam sebuah platform berbagai pemangku kepentingan.⁹



Gambar 2.1 Elemen Dalam Pendekatan Lanskap

Para pemangku kepentingan melaksanakan **proses yang sistematis** untuk bertukar informasi dan mendiskusikan perspektif untuk mencapai **pemahaman bersama** tentang kondisi lanskap, tantangan dan peluang. Hal ini memungkinkan **perencanaan kolaboratif** untuk mengembangkan rencana aksi yang telah disepakati. Kemudian, para pemangku kepentingan **melaksanakan rencana** tersebut, dengan perhatian pada mempertahankan komitmen kerjasama. Para pemangku kepentingan juga melakukan **pemantauan pengelolaan adaptif dan akuntabel**, yang menjadi masukan untuk putaran dialog, pertukaran pengetahuan dan perancangan aksi kerja sama baru selanjutnya¹⁰.

⁹ Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N., 2015. The Little Sustainable Landscape Book. Global Canopy Programme

¹⁰ Ibid



Tingkatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lanskap

Keberadaan dan pengelolaan terhadap 5 elemen diatas menentukan “Tingkatan Kolaborasi” dari parapihak yang terlibat dalam pengelolaan lanskap. Berikut ini adalah matriks untuk mengukur tingkat kolaborasi yang mampu kita bangun dalam sebuah pengelolaan lanskap.

TINGKATAN KOLABORASI


Tingkat Kerja Sama Pemangku Kepentingan	Pijakan (<i>Platform</i>) Pemangku Kepentingan	Pemahaman Bersama	Perencanaan Kolaboratif	Pelaksanaan Efektif	Pemantauan
Rendah	Konsultasi/pertemuan ad hoc	Informasi publik dari pemangku kepentingan lanskap yang terorganisasi; mudah diakses	Dokumen visi lanskap yang disepakati	Pelaku lanskap mempertimbangkan rencana kolaboratif ketika membuat keputusan individual	Pemantauan tingkat tinggi; pelaporan publik
Menengah	+ Dialog pemangku kepentingan dan pertemuan rutin, komitmen untuk saling merespons masukan dari pemangku kepentingan lainnya	+ informasi terperinci tentang pengelolaan lahan yang diberikan kepada pemangku kepentingan lanskap lainnya	+ rencana/program strategis lanskap terperinci yang menguraikan kegiatan-kegiatan lainnya	+ komitmen/kontribusi khusus untuk mencapai tujuan-tujuan lanskap yang telah disepakati	+ komitmen/kontribusi khusus untuk mencapai tujuan-tujuan lanskap yang telah disepakati
Tinggi	+ mekanisme formal untuk perwakilan pemangku kepentingan aturan formal untuk pengambilan keputusan	+ mekanisme untuk meminta informasi dari pemangku kepentingan lanskap lainnya	+ kerangka akuntabilitas yang jelas untuk kepatuhan pelaku terhadap rencana lanskap dipantau dan sanksi tersedia untuk yang tidak mematuhi	+ pelaporan terperinci tentang pelaksanaan rencana kolaboratif keputusan individual yang terkait dengan rencana kolaboratif	Strategi pemantauan dan evaluasi terperinci yang dicapai; insentif positif bersyarat; dan sanksi negatif

Gambar 2.2 Tingkatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Lanskap

Untuk tiap elemen pengelolaan lanskap terpadu, dimungkinkan tingkat kerja sama yang berbeda-beda, dengan tingkat formalitas yang berbeda-beda. Semakin informal kerja samanya, semakin rendah tingkat setiap tanggung jawab dan akuntabilitas yang diberikan kepada tiap pemangku kepentingan.

Pada satu ujung spektrum kerja sama (tingkat kolaboratif rendah), tujuan utama inisiatif lanskap terpadu adalah untuk meningkatkan pemahaman bersama di tingkat lokal, dengan harapan bahwa pengetahuan dan hubungan yang lebih baik akan mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan dan mengatalisasi kemitraan baru dalam lanskap tersebut yang akan memajukan aksi menuju tujuan-tujuan yang telah disepakati. Inisiatif-inisiatif tersebut mungkin akan menekankan penciptaan dialog, analisis kerja sama, dan pemantauan dinamika lanskap secara akurat, yang hanya membutuhkan proses informal. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat dengan mudah difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat, atau pelaku lainnya yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk mengadakan pertemuan, tetapi tidak harus memiliki kekuasaan ekonomi atau politik.

Di ujung spektrum yang lain (tingkat kolaboratif tinggi), inisiatif-inisiatif lanskap terpadu berupaya untuk mencapai hasil lanskap khusus dan memberlakukan mekanisme



penegakan atau insentif bersyarat yang dipantau secara ketat dan menghasilkan tekanan nyata agar berbagai pelaku lanskap berubah. Tujuan-tujuan tersebut menuntut investasi tinggi pada semua elemen pengelolaan lanskap terpadu, dalam rangka memastikan partisipasi dan kesepakatan yang tepat, pengembangan rencana yang koheren dan realistis, dan kerangka akuntabilitas yang kuat. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pemerintah yang kuat kemungkinan akan memainkan peran sentral dalam mengelola proses tersebut.


Prinsip Dalam Pendekatan Lanskap

Selain mendasarkan pada keberadaan dan pengelolaan 5 unsur kunci diatas, para ahli juga telah merumuskan beberapa hal prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendekatan lanskap ini, prinsip-prinsip tersebut adalah¹¹ :

1. Pembelajaran secara kontinyu dan pengelolaan yang adaptif (*Continual learning and adaptive management*)
2. Memulai dari sesuatu yang dapat dijalankan bersama (*Common concern entry point*)
3. Diselenggarakan dalam berbagai tingkatan dan ukuran (*Multiple Scale*)
4. Mempunyai beragam fungsi dan manfaat (*Multifunctionality*)
5. Mengandalkan peran banyak pihak (*Multiple stakeholders*)
6. Perubahan yang negotiable dan terbuka (*Negotiated and transparent change logic*)
7. Kejelasan antara hak dan kewajiban (*Clarification of right and responsibilities*)
8. Pengawasan yang mudah dan partisipatif (*Participatory and user-friendly monitoring*)
9. Tangguh (*Resilience*)
10. Penguatan kapasitas parapihak (*Strengthened stakeholder capacity*)

Penting untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip ini tidak boleh diperlakukan sebagai sejumlah kotak yang akan dicentang dalam merancang proyek lanskap. Prinsip tersebut diperhitungkan dalam mereformasi badan pengelolaan sumber daya. Badan-badan ini harus memiliki kapasitas dan sumber daya staf multidisiplin untuk melakukan fungsi-fungsi ini dan harus dapat memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut dengan cara-cara yang memenuhi kebutuhan khusus dari masalah yang mereka hadapi. Prinsip-prinsip tersebut memberikan pilihan yang dapat digunakan secara selektif untuk memenuhi tantangan yang ditemukan di lanskap yang unik. Sepuluh prinsip pendekatan lanskap

¹¹ Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C. and van Oosten, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21), pp.8349-8356.



adalah inovasi yang harus membantu mengatasi tantangan untuk meningkatkan produksi pertanian sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.¹²

Dalam perkembangannya, 10 prinsip dalam pendekatan lanskap tersebut membutuhkan prakondisi dalam penerapannya. Berdasarkan tinjauan atas kasus-kasus dalam pendekatan lanskap di Indonesia, ditemukan beberapa kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk mencapai kesuksesan di tingkat lanskap. Kondisi ini melampaui prinsip-prinsip teknis yang telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya.¹³

Berikut sepuluh pra-kondisi yang harus dipenuhi jika pendekatan lanskap berhasil:

1. Kepemimpinan yang menginspirasi: Pemimpin ini bisa berasal dari politik lokal, sektor swasta, penyelenggaraan organisasi penelitian dan konservasi maupun para pihak yang lain.
2. Komitmen adaptif jangka panjang: Mengubah perilaku membutuhkan waktu. Selain itu, lanskapnya dinamis dan selalu berubah, begitu juga tekanan pada lanskap, baik secara internal maupun eksternal. Visi jangka panjang dan pemahaman mendalam tentang perubahan ini diperlukan, dan ini memerlukan kerangka waktu yang lebih lama daripada siklus proyek standar 2-3 tahun. Demikian juga, proses keterlibatan pemangku kepentingan dapat memerlukan negosiasi yang cukup besar, yang sekali lagi memerlukan komitmen jangka panjang terhadap proses tersebut.
3. Fasilitasi itu perlu tapi tidak cukup untuk mencapai hasil skala lanskap: Fasilitasi saja tidak mencapai hasil bila masyarakat lokal, perusahaan dan pemerintah tidak memiliki insentif untuk berpartisipasi atau menghormati keputusan kelompok.
4. Proposisi nilai akan memotivasi keterlibatan: Orang-orang akan terlibat dalam proses skala lanskap dan multipihak jika ada alasan yang cukup bagi mereka untuk melakukannya.
5. Konflik dan pandangan yang mengakar harus ditangani secara terbuka: Fasilitasi saja tidak akan mendamaikan kepentingan yang bertentangan secara mendasar. Harus ada insentif keuangan atau pembatasan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan.
6. Tata kelola sistemik yang kuat sangat penting: Kesepakatan harus dapat dilaksanakan oleh hukum, catatan kadaster harus ada, dan hak atas tanah harus jelas.
7. Keterlibatan sektor swasta merupakan elemen kunci keberhasilan: Di Merauke dan Riau, kepemilikan perusahaan besar merupakan inti dari lanskap. Ketika

¹² Ibid

¹³ Sayer, J., Margules, C., Boedihartono, A. K., Dale, A., Sunderland, T., Supriatna, J., & Saryanthi, R. (2015). Landscape approaches; what are the pre-conditions for success?. *Sustainability Science*, 10(2), 345-355.



perusahaan melihat nilai keterlibatan, mereka dapat memobilisasi kapasitas untuk mencapai hasil lanskap.

8. Kebijakan tanpa anggaran dan komitmen pelaksanaan tidak berjalan. Tokoh politik dan pemerintah daerah membuat pernyataan positif namun jika tidak didukung oleh alokasi dana, mereka tidak akan mencapai hasil lanskap yang lebih baik.
9. Formalisasi dan pemantauan hasil proses akhirnya diperlukan. Kesepakatan dapat dicapai dan aktivitas perusahaan dipengaruhi namun pada akhirnya pengaturan lanskap harus diintegrasikan ke dalam tindakan hukum untuk mencapai hasil jangka panjang yang berkelanjutan.
10. Metode pengukuran harus dikembangkan untuk menetapkan nilai, melacak kemajuan dan memungkinkan pengelolaan adaptif: Tuntutan masyarakat terhadap lanskap akan berubah seiring waktu dan manajemen adaptif akan dibutuhkan. Metrik harus dipasang agar arus barang dan jasa dari lanskap dipantau.

2.2. Lanskap Berkelanjutan dan SDGs


Lanskap berkelanjutan (*Sustainable Landscape*) merupakan visi dari kemitraan pengelolaan lanskap. Walaupun tidak ada definisi yang disepakati secara universal tentang lanskap berkelanjutan, beberapa penulis mendefinisikannya sebagai lanskap yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat “memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara umum, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk **“memastikan sinergi”** dan **“meminimalkan pertukaran (trade-off)”** antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan (termasuk iklim), di mana tujuan-tujuan ini saling bersaing.¹⁴

Lanskap berkelanjutan secara bersama-sama akan memenuhi seluruh kebutuhan setempat (misalnya memastikan ketersediaan air bagi rumah tangga, lahan pertanian, badan usaha dan satwa liar; keanekaragaman hayati untuk penyerbukan tanaman dan pariwisata satwa liar lokal; ketahanan pangan setempat dan pendapatan), dan di saat yang sama juga berkontribusi pada komitmen nasional dan target global (misalnya penurunan bersih emisi gas rumah kaca berbasis lahan; target konservasi keanekaragaman hayati; membuka lapangan kerja pedesaan; menghasilkan listrik dari sumber daya terbarukan; memasok surplus produksi pertanian untuk memberi makan penduduk kota).¹⁵

Konsep keberlanjutan pertama kali diperkenalkan dalam konteks kehutanan di Jerman pada abad ke-18 (Rubner 1992; Wiersum 1995). Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini telah berkembang dengan fokus pada "pembangunan berkelanjutan". Pemahaman

¹⁴ Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N., 2015. The Little Sustainable Landscape Book. Global Canopy Programme. hal. 26

¹⁵ *ibid*



dasar pembangunan berkelanjutan tidak berubah sejak didefinisikan dalam Laporan Brundtland 1987 *Our Common Future* (WCED 1987) yang mendefinisikannya sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

Laporan tersebut didahului oleh musyawarah antar pemerintah selama 15 tahun, dimulai dengan *International Conference on the Human Environment* di Stockholm pada tahun 1972, dan diikuti dengan perundingan internasional melalui serangkaian pertemuan puncak. Sejak publikasi Laporan Brundtland, telah ada konsensus politik yang kuat bahwa **pembangunan ekonomi** harus bertemu dengan **keadilan sosial** dan **perlindungan lingkungan**. Namun, penerapan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan tampaknya telah terhambat oleh kendala keuangan, pengaturan prioritas nasional, kerusuhan sosial, dan spesifikasi dan operasionalisasi konsep pembangunan berkelanjutan yang sulit dipahami.

Kerangka pembangunan berkelanjutan terpadu yang baru, yang dikenal sebagai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) terdiri dari 17 tujuan dan 169 indikator yang sebagian besar berorientasi pada tindakan, bersifat global dan berlaku secara universal. Mereka membangun Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/ MDGs*) dan bertujuan untuk membangun pencapaian MDGs dan untuk menanggapi tantangan baru dan yang akan muncul. SDGs bagaimanapun, tidak dapat dicapai tanpa strategi implementasi dan pemantauan praktis.

Ada kebutuhan untuk mengembangkan alat praktis untuk pencapaian SDGs baru. Pembangunan lanskap yang berkelanjutan yang menggabungkan antara lain, pertanian, produksi kehutanan, energi pedesaan, produksi air, pemulihan lahan terdegradasi dan juga potensi untuk meningkatkan penghidupan bagi banyak orang miskin, memiliki potensi besar sebagai kerangka kerja untuk mencapai sebagian besar SDGs (Jones dan Wolosin 2014; Mayers 2014). Sayer dkk. (2013) mengklaim bahwa konsep lanskap menyediakan pengaturan untuk memungkinkan terbukanya banyak masalah sulit dan solusi terkait dalam kaitannya dengan SDGs.¹⁶

Baral, H., & Holmgren, P. (2015), merangkum parameter kunci, ukuran, dan unit pengukuran untuk menilai keberlanjutan lanskap. Dalam parameter penghidupan (*livelihood*), ukuran yang digunakan adalah total pendapatan atau *return* dalam lanskap. Untuk parameter terkait dengan lingkungan, ukurannya adalah total simpanan biomassa dan total emisi GRK dalam lanskap. Sedangkan untuk parameter produksi, variabel yang diukur adalah jumlah produksi pangan, produksi kayu dan material.

¹⁶ Baral, H., & Holmgren, P. (2015). A framework for measuring sustainability outcomes for landscape investments (Vol. 195). CIFOR.



Tabel 2.1 Parameter Kunci dalam Lanskap Berkelanjutan

Parameter Kunci	Ukuran	Unit Pengukuran
Ketersediaan penghidupan	Total pendapatan atau return dalam lanskap	Return on Investment (ROI), Net Present Value (NPV)
Layanan ekosistem	Total simpanan biomassa dalam lanskap	T biomassa (DM) per satuan luas
Efisiensi penggunaan sumber daya	Total emisi GRK dari lanskap	Net emisi GRK
Produk pangan dan non-pangan (produktivitas)	Jumlah produksi pangan	T dari produksi pangan
	Produksi kayu dan material	Volume kayu atau materi mentah yang diproduksi

Parameter dari lanskap berkelanjutan memiliki relevansi yang tinggi dengan SDGs. Hal itu digambarkan dalam tabel di bawah ini¹⁷:

Tabel 2.2 Hubungan antara SDGs dan Parameter/ *Outcomes* dari Lanskap Berkelanjutan

No	SDGs	<i>Outcomes</i> dari Pengembangan Lanskap Berkelanjutan				Hubungan Langsung	Performa Indikatif dari 4 Parameter Lanskap
		Meningkatnya Penghidupan	Layanan Ekosistem Berkelanjutan	Penggunaan Sumber Daya yang Efisien	Peningkatan Produk Pangan dan Non-Pangan		
1	Tanpa Kemiskinan	T			M	*	Kuat
2	Tanpa Kelaparan	T	M		M	*	Kuat
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	M			M	*	Sedang
4	Pendidikan Berkualitas						Tidak Ada Hubungan yang Jelas
5	Kesetaraan Gender						Tidak Ada Hubungan yang Jelas
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak		M			*	Lemah
7	Energi Bersih dan Terjangkau			R	M	*	Kuat
8	Pertumbuhan	T			M	*	Kuat

¹⁷ *Ibid*



	Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak						
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur						Tidak Ada Hubungan yang Jelas
10	Berkurangnya Kesenjangan	M				*	Sedang
11	Kota dan Komunitas Berkelanjutan						Tidak Ada Hubungan yang Jelas
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab				R	*	Sedang
13	Penanganan Perubahan Iklim		T	T		*	Kuat
14	Ekosistem Laut						Tidak Ada Hubungan yang Jelas
15	Ekosistem Daratan		T	T	M	*	Kuat
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	M				*	Sedang
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan						Tidak Ada Hubungan yang Jelas

Keterangan: T mengindikasikan relevansi yang tinggi, M menengah, dan R rendah.

Diantara parameter lanskap yang bersinergi dengan SDGs ini, terdapat satu tujuan SDGs yakni **kemitraan untuk mencapai tujuan** yang belum terakomodasi dalam parameter. Sementara itu kemitraan sesungguhnya merupakan point penting untuk mencapai keberhasilan pengelolaan lanskap secara terpadu dan terintegrasi. Para pihak yang berhadapan, memiliki kepentingan terhadap lanskap perlu dipertemukan dalam sebuah kemitraan yang jelas, berkomitmen dan memiliki agenda aksi bersama, secara sinergis dan terpadu.



2.3. Pendekatan Lanskap di Sumsel


2.3.1. Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Pada akhir tahun 2015, Gubernur Sumatera Selatan telah mencanangkan komitmen Pertumbuhan Ekonomi Hijau kepada masyarakat dunia. Komitmen ini disambut dengan sangat baik oleh para pihak yang berkepentingan di Sumatera Selatan, diantaranya pelaku ekonomi sektor berbasis lahan berskala besar maupun kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi maupun penyandang dana dari berbagai negara. Salah satu pemicu dari peluncuran visi ini adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang hebat di Sumatera Selatan tahun 2015. Pada tahun 2015, Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan ‘hotspot’ terbanyak di Indonesia.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan capaian nasional yang komprehensif, umum dan relevan dengan konteks Sumatera Selatan. Kelima capaian yang diinginkan melalui visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah 1) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, 2) Pertumbuhan yang inklusif dan merata, 3) Ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, 4) Ekosistem sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan, dan 5) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Berbeda dengan Dokumen *Road Map* Pertumbuhan Ekonomi Hijau nasional yang mencakup semua sektor, yaitu manufaktur, ekstraktif dan energi, infrastruktur maupun sumber daya terbarukan, pada tahap ini Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan (*Green Growth Plan/ GGP* Sumsel) memfokuskan pada sumber daya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan. Peningkatan produksi akan dilakukan sekaligus dengan menjaga dan memulihkan hutan dan lahan gambut melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, masyarakat petani, masyarakat umum, penggiat konservasi. Pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan akan mendapatkan perhatian khusus di dalam GGP Sumsel.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan GGP Sumsel adalah pendekatan lanskap. Pendekatan ini dalam proses penyusunan GGP Sumsel bermuara pada tiga persyaratan. Pertama adalah inklusivitas, yaitu melibatkan parapihak terkait secara aktif di dalam proses pembuatan dan negosiasi skenario Pertumbuhan Ekonomi Hijau sehingga aspirasi, kekhawatiran maupun hambatan bisa dikenali sejak awal. Kedua adalah integrasi dan sinkronisasi antar program maupun kegiatan secara keruangan, waktu, penganggaran dan kelembagaan. Ketiga adalah berlandaskan pada data, informasi maupun pemodelan yang sah agar dampak yang dihasilkan oleh sebuah skenario pembangunan bisa dipakai sebagai bahan untuk menganalisis *trade-off* dan dasar dalam mengambil keputusan.



Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan terdiri dari tujuh strategi. Strategi tersebut adalah:

1. Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyalarsan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (livelihood capital);
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
4. Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
5. Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
6. Restorasi lahan dan hutan yang mengalami degradasi fungsi; dan
7. Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Strategi 1 berusaha menyeimbangkan berbagai pemenuhan kebutuhan akan lahan dengan tetap mempertahankan maupun memperbaiki kualitas lingkungan. Strategi 2 dan 3 bertujuan meningkatkan pendapatan dan penghidupan melalui perbaikan prasarana, sarana dan modal penghidupan. Kedua strategi ini berkontribusi terhadap capaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan ketahanan/ kelenturan (*resilience*) petani terhadap fluktuasi harga dan musim, dan pada saat yang bersamaan mampu menurunkan emisi GRK.

Strategi 4 dan 5 pada dasarnya mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, 'intermediary' dan industri hilir, serta penambahan nilai di area penghasil bahan baku sehingga manfaat pengganda bisa dinikmati di tingkat lokal. Kedua strategi ini memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan PDRB serta pemerataan. Strategi 6 akan mengupayakan pulihnya fungsi tertentu yang telah dialokasikan pada suatu area.

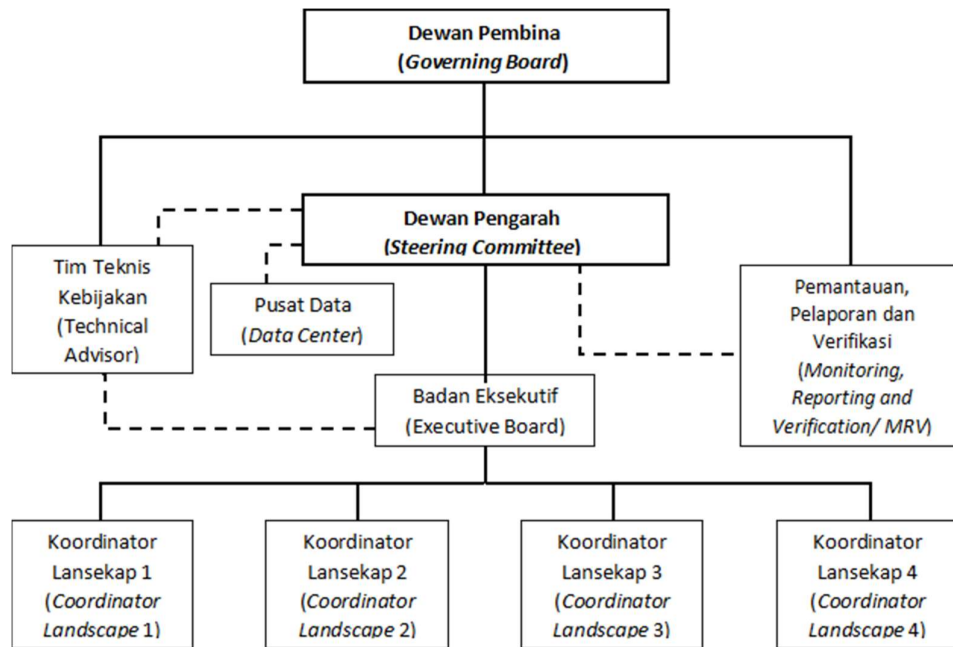
Strategi 7 merupakan strategi inovatif untuk melestarikan ekosistem sekaligus mendapat manfaat dari jasa lingkungan. Manfaat jasa lingkungan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat setempat tetapi juga dapat berkontribusi terhadap ketersediaan jasa lingkungan bagi komunitas global. GRK sekaligus menjaga kualitas jasa lingkungan tata kelola air dan keanekaragaman hayati, serta melibatkan dan meningkatkan taraf hidup melalui kontribusi masyarakat sebagai penyedia jasa lingkungan.

2.3.2. KOLEGA Sumsel

Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan (KOLEGA Sumsel) merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumberdaya alam, perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumberdaya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. KOLEGA Sumsel ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan.

Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2017, sementara struktur dan komitenya disahkan pada tanggal 11 Juli 2017. Berikut Struktur Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion.



Gambar 2.3 Struktur Kelembagaan GGP dan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2016, Koordinator Lanskap dalam KOLEGA Sumsel terdiri dari 4 koordinator. Koordinator lanskap 1 menangani bidang lanskap hutan rawa gambut dan kawasan ekosistem gambut. Koordinator lanskap 2 menangani bidang lanskap hutan pantai dan mangrove perairan. Koordinator lanskap 3, yaitu menangani bidang *lowland*, rawa lebak, dan lahan kering. Sedangkan koordinator lanskap 4 menangani bidang Daerah Aliran Sungai (DAS), tangkapan air dan *highland*.

Tata kerja kelembagaan KOLEGA Sumsel dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun dengan instansi terkait. Oleh karena itu struktur kelembagaan KOLEGA Sumsel terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.



3. KAJIAN KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN

Kajian kebijakan ini merupakan upaya untuk melakukan refleksi terhadap kesesuaian konsep Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (*Sustainable Landscape Management/SLM*) dengan arus utama kebijakan pembangunan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dapat dipastikan bahwa inisiatif pendekatan lanskap selaras dengan kebijakan pembangunan yang tengah bergulir dan bahkan dapat menjadi media penyempurnaan bagi implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

Arah pembangunan nasional sendiri dalam dekade terakhir diwarnai oleh berbagai terobosan kebijakan pada ranah kelola dan pemulihan lingkungan hidup dan juga perhatian pada penanggulangan kemiskinan. Perlu disadari bersama bahwa dibalik upaya-upaya kelola lingkungan hidup tersebut pembangunan di Indonesia masih diwarnai oleh keterbatasan penyediaan kebutuhan dasar bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan dan masih tingginya angka kemiskinan, termasuk di Sumatera Selatan sendiri. Sementara itu dalam 5 tahun terakhir terdapat dorongan yang kuat dalam menyiapkan infrastruktur dan jaringan transportasi guna memperlancar pertukaran barang dan jasa antar wilayah.


Jika dicermati, 10 prinsip dari pendekatan lanskap masih menitik-beratkan pada penyelenggaraan proses dan mungkin masih perlu diperkaya dengan bagaimana dengan capaian-capaian khusus yang ingin diraih dan penciptaan nilai tambah/keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional. Penyelarasan dan peningkatan konektivitas memerlukan energi tersendiri dan akan lebih mudah jika memang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang *in line* dengan hal ini.

Sebagai hasil kajian kebijakan, maka dapat dicatat berbagai dukungan dari kebijakan pembangunan yang tengah berlaku saat ini terhadap implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan nantinya, yaitu:

1. Terdapat landasan hukum yang kuat terkait dengan akses terhadap informasi publik yang merupakan faktor sangat penting untuk memupuk kepercayaan antar aktor melalui skema-skema manajemen kolaboratif.¹⁸
2. Telah adanya penataan keruangan yang membagi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara tegas pada pola pemanfaatan sumberdaya lahan¹⁹

¹⁸ Lihat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁹ Peraturan Daerah No. 5 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera selatan. Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin. Saat dokumen ini disusun RTRW Kabupaten Musi Banyuasin masih dalam proses revisi

- 
3. Beberapa substansi kebijakan mendorong pada skema-skema kolaborasi antar pihak, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan daerah penyangganya.²⁰
 4. Dalam kebijakan tentang perusahaan, dan usaha berbasis pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah menempatkan pihak swasta juga merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab cukup besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan juga pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang hidup di sekitar tempat usahanya.²¹
 5. Adanya dorongan kuat untuk memulihkan kerusakan lingkungan di tingkat nasional. Hal ini tergambar secara konkret melalui komitmen-komitmen dalam hal pengurangan emisi, perlindungan keragaman hayati, dan juga berbagai regulasi tentang perlindungan hutan dan lahan.

Saat ini, kebijakan pemerintah pusat mendukung berkembangnya skema-skema yang memperluas akses masyarakat kepada sumberdaya lahan terutama dengan berbagai dukungan terkait dengan perhutanan sosial dan juga reforma (pembaharuan) agraria. Hal ini merupakan pintu masuk yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif ke depan. Jika dilihat dari kebijakan di tingkat daerah maka kurun waktu 3 tahun terakhir banyak sekali inisiatif kebijakan di tingkat provinsi yang berorientasi pada Pembangunan Hijau, meskipun demikian perlu dikritisi bahwa orientasi ini masih belum terlalu kuat bobotnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang.


Kebijakan-kebijakan yang ada, secara mendasar memberikan berbagai peluang bagi implementasi pendekatan lanskap ini. Beberapa peluang untuk menjalankan atau mengimplementasikan pendekatan lanskap dapat dirinci dalam sub bab-sub bab berikut ini.

3.1. Pendekatan Lanskap Dalam Rencana Pembangunan

Secara nasional pemerintah Indonesia mempunyai visi tentang kondisi Indonesia dimasa yang akan datang digambarkan sebagai “Indonesia Yang Asri”. Istilah asri ini sangat sinkron dengan terwujudnya kondisi lingkungan yang baik, indah dan terpulihkan dari segala jenis kerusakan dan konflik pengelolaan. Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang

²⁰ Pasal 45 PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

²¹ Kebijakan terkait hal ini adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas



disusun sejak 10 tahun yang lalu dan saat ini memasuki tahapan ketiga dimana perencanaan tersebut masih berlaku hingga 10 tahun ke depan.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam tahapan pembangunan jangka panjangnya mempunyai agenda dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Fokus utama dari agenda tersebut adalah memperbesar kapasitas restorasi, memantapkan batas kawasan hutan, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat fungsi hutan dalam ranah sosial dan ekologi.

Jika diperhatikan isi rencana pembangunan jangka panjang yang ada pada kabupaten, belum terlihat adanya target-target terukur dalam perencanaan jangka panjang terkait dengan Persoalan-persoalan lingkungan hidup. Perlu kiranya untuk memperkuat substansi pengelolaan, perlindungan dan juga pemulihan lingkungan hidup.

Pendekatan Lanskap dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang dapat dijalankan melalui beberapa hal berikut ini:

1. Sinkronisasi agenda dalam jangka panjang, yaitu memadukan rencana-rencana dalam Pengelolaan Lanskap dengan rencana-rencana yang ada pada pemerintah pusat maupun daerah
2. Dalam menyusun indikator pengelolaan lanskap dapat mendasarkan pada indikator-indikator kinerja yang dipakai pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, karena indikator-indikator kinerja tersebut juga didasarkan pada capaian-capaian dalam *Sustainable Development Goals*
3. Pendekatan Lanskap dapat dijadikan media dalam memediasi parapihak yang terlibat konflik (tumpang tindih) dalam hal tata ruang


3.2. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan seperti:

- 1) adanya kewajiban ijin lingkungan dan AMDAL,²²
- 2) Adanya kewajiban unit-unit usaha untuk melakukan kelola sosial dan kelola lingkungan, dan
- 3) Adanya kewajiban-kewajiban terhadap usaha-usaha pengelolaan SDA terhadap upaya pemulihan lingkungan atau reklamasi.

²² Beberapa kebijakan terkait hal ini adalah:

- PP 27 tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup



Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan membuka akses masyarakat setempat. Pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya lahan ke depan banyak diwarnai oleh beberapa hal strategis yaitu:

- Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menguat
- Upaya restorasi lingkungan yang semakin ketat
- akses masyarakat yang semakin menguat


Oleh karena itu pendekatan lanskap harus dapat memberikan jawaban atas beberapa kecenderungan diatas. Terdapat beberapa peluang pengembangan kebijakan di bidang PSDA di tingkat daerah, diantaranya adalah:

1. Menguatkan koordinasi dan hubungan harmonis antara sektor *private* dan sektor publik (pemerintah daerah) dalam kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
2. Memadukan/mensinergikan agenda-agenda pembangunan daerah dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
3. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) perusahaan dan reklamasi lingkungan/lahan
4. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan di daerah dalam mendukung implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria.

3.3. Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati

Kebijakan pengelolaan hidup di Indonesia telah menunjukkan unsur-unsur kewaspadaan yang cukup tinggi terhadap resiko lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan maupun arahan penataan ruang wajib didasari oleh telaah lingkungan hidup berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun hal ini masih nampak lemah jika dilihat dari produk-produk kebijakan di tingkat daerah karena masih minimnya produk kebijakan di tingkat daerah yang mempunyai fokus sasaran pada isu-isu lingkungan hidup , apalagi jika dilihat dari praktek di lapangan maka pertimbangan lingkungan hidup masih sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah didukung oleh berbagai produk kebijakan baik yang terkait dengan pengelolaan kawasan, ekosistem, DAS, maupun berbasis spesies. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mempelopori produk kebijakan daerah tentang pengelolaan keanekaragaman hayati, namun sayang kebijakan ini baru berupa rencana aksi yang berjangka pendek. Beberapa peluang



pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi hayati yang dapat dikembangkan di daerah adalah:


1. Penyusunan rencana kelola zona penyangga di Taman Nasional dan Suaka Margasatwa secara kolaboratif antara pengelola (KPH maupun BKSDA), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan konsesi swasta yang ada pada zona penyangga
2. Pengembangan kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya ataupun tipologi ekosistem yang khas, misalnya terkait dengan pengelolaan ekosistem rawa lebak, ekosistem mangrove dan juga pesisir
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya yang diluar kawasan konservasi yang bersifat partisipatif dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal
4. Mengembangkan sistem monitoring keragaman hayati pada kawasan produksi

3.4. Pendekatan Lanskap Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya telah terbangun sistem tata kelola pemerintahan dengan segenap perangkat perencanaan, struktur kelembagaan dan juga sistem evaluasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan juga panjang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten mendasarkan penyelenggaraan pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan. Selain itu perencanaan pembangunan juga didukung oleh dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh masing masing instansi atau Organisasi Pelaksana Daerah (OPD).

Organisasi pemerintahan di daerah saat ini juga sedang menata dirinya lagi seiring diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah provinsi lebih menguat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam terutama sumberdaya hutan dan sumberdaya laut. Saat ini juga tata kelola pemerintahan di tingkat bawah sedang bergeliat seiring menguatnya peran desa dalam pembangunan. Sejak terbit UU No.6 Tahun 2016 maka kewenangan pemerintah desa dalam mengatur “dirinya” sendiri semakin kuat. Dengan adanya instrumen seperti Peraturan Desa, RPJMDes dan juga secara konkret adanya dukungan Dana Desa maka Pemerinta Desa dan masyarakatnya mempunyai cukup kekuatan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Semua inisiatif di tingkat tapak harus memperhatikan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu tata kelola pemerintahan saat in juga semakin terbuka dengan adanya Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mendapatkan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah atau data/informasi yang ada pada badan publik.



Dalam konteks tata kelola pemerintahan ini maka pendekatan lanskap dapat berperan dalam:


1. Memberikan masukan/pengaruh positif dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang terpadu dan berkelanjutan
2. Memperkuat sistem dan tata kelola sumberdaya alam yang adil dan lestari di tingkat desa dengan menggunakan instrumen yang ada, baik berupa Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
3. Melakukan sinkronisasi dan validasi data pengelolaan sumberdaya alam diantara parapihak baik pemerintah, swasta, maupun organisasi-organisasi non pemerintah (LSM) yang mempunyai inisiatif dalam pengelolaan sumberdaya alam.
4. Menyusun Rencana Aksi Kolaboratif Jangka Panjang yang dapat memberikan panduan bagi parapihak dalam pengelolaan sebuah unit lanskap tertentu.

3.5. Inovasi Kebijakan Daerah Pendukung Pendekatan Lanskap

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang dapat mempercepat capaian pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan diantaranya adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumsel yang terbit pada Bulan Mei 2017 dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 452/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Sumatera Selatan, yang diterbitkan pada Bulan Juli 2017. Kedua produk kebijakan ini merupakan dukungan yang sangat lugas bagi pengembangan pendekatan lanskap di Sumatera Selatan.

Selain itu terdapat beberapa kebijakan di daerah yang dapat mempunyai implikasi langsung dan juga harus diperhatikan dalam pengembangan pendekatan lanskap di Sumatera Selatan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bulan Desember 2016
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan / atau Lahan, pada April 2016




5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 527/KPTS/BAPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Provinsi Sumatera Selatan, pada Bulan Agustus 2017

Kebijakan tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan mencerminkan kesadaran dan pandangan tentang perlunya koordinasi dan sinergi diantara sektor-sektor berbasis lahan tersebut, sedangkan kebijakan tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara didalamnya juga mengatur tentang kegiatan reklamasi (BAB X) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat (BAB XII). Artinya jika kedua kebijakan ini dilaksanakan akan dapat mendukung pendekatan lanskap yang akan dikembangkan. Sedangkan tentang kebijakan untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta juga akan mampu memberikan percepatan dalam hal sinergi dan integrasi data pembangunan terutama data spasial atau keruangan.

Pada tahun 2007 telah terbit Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025. Dalam dokumen ini disampaikan bahwa terdapat beberapa tantangan khusus terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Sumatera Selatan , yaitu terkait dengan:

- rendahnya produktivitas lahan sawah, yang hanya sekitar 3,33 ton GKG/ha padahal targetnya adalah 5,1, ton GKG/ha, dan sebagian sawah masih panen 1 kali dalam setahun
- Luasnya lahan hutan yang gundul (tanpa vegetasi hutan)
- peningkatan kapasitas rehabilitasi dan peningkatan peran sektor kehutanan dalam ranah sosial dan ekologi. Sebagai catatan laju deforestasi di Sumatera Selatan mencapai 192.824 ha per tahun (laporan Bank Dunia dalam RPJP Sumatera Selatan 2005-2025)
- Dalam pengelolaan sumberdaya air perlu mengembangkan jaringan rigasi dan drainase untuk sawah tadah hujan dan pengembangan jaringan kelembagaan rawa dan rawa lebak.
- Untuk energi terbarukan perlu dikembangkan energi alternatif yang ekonomis bagi masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa inisiatif kebijakan di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin yang selaras dengan pendekatan lanskap diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Lelang Lebak Lebung Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun masih banyak kelemahan, namun kedua kebijakan tersebut mencerminkan keinginan pemerintah daerah kabupaten untuk mengelola sumberdaya alam secara lestari dan berkeadilan.



Saat ini pemerintah daerah sebenarnya masih mempunyai beban yang tidak ringan dalam mengimplementasikan berbagai inovasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penguatan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam. Bahkan implementasi dari kebijakan-kebijakan lama seperti kewenangan dalam memantau kegiatan pertambangan, perkebunan dan juga kehutanan belum sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.


3.6. Kebijakan dan Agenda Strategis

Dengan memperhatikan berbagai produk kebijakan terkait dengan *Sustainable Landscape Management* diatas maka dapat dianalisis beberapa kebijakan yang dapat memberikan pengaruh kuat (*significant*) dan bahkan memberikan daya ungkit (*leverage*) terhadap implementasi pendekatan lanskap di lapangan. Kebijakan dan program tersebut adalah yang terkait dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengelolaan kawasan konservasi, dan yang mendorong kolaboratif multipihak.

3.6.1. Pemulihan Ekosistem dan Pengurangan Emisi

Kebijakan dan program yang perlu diprioritaskan terkait dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi adalah sinkronisasi agenda restorasi gambut, optimalisasi rehabilitasi lahan dan restorasi lingkungan untuk pengurangan emisi, pemenuhan kewajiban reklamasi lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, program perhutanan sosial dalam menangani perambahan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi. Berikut penjelasan dari masing-masing kebijakan dan program tersebut:

- a. **Sinkronisasi agenda restorasi gambut**, dalam hal ini perlu mensinkronkan agenda dan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah dan mendorong semua pihak mempunyai dasar perencanaan dan pengelolaan yang sama berdasarkan peta ekoregion gambut yang sama.
- b. **Optimalisasi rehabilitasi lahan dan restorasi lingkungan untuk pengurangan emisi**. Penting untuk menyusun kriteria dan indikator capaian dalam kegiatan rehabilitasi ini mengingat kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama dan berulang setiap tahun namun masih sulit untuk memantau keberhasilan dan capaiannya. Perlu mencantumkan target pengurangan emisi dalam setiap inisiatif rehabilitasi lahan ataupun restorasi lingkungan
- c. **Pemenuhan kewajiban reklamasi lingkungan**. Dalam hal ini perlu dipetakan lagi tentang pihak-pihak (perusahaan) yang mempunyai kewajiban reklamasi lahan dan dipantau sejauh mana kewajiban ini telah dipenuhi.
- d. **Pengendalian kebakaran hutan dan lahan**. Perlu mengembangkan sistem pengendalian yang lebih responsive terhadap gejala terjadinya kebakaran hutan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dan berbasis teknologi informasi terkini. Perlu disusun peta zonasi daerah



rawan kebakaran dengan menetapkan tingkat kerawanan. Sistem monitoring diperkuat pada zona-zona dengan kerawanan tinggi

- e. **Sinkronisasi kebijakan dan program perhutanan sosial dalam menangani perambahan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi.** Menyusun road map ataupun rencana aksi penanganan perambahan pada kawasan konservasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.


3.6.2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Kebijakan dan program yang perlu diprioritaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria, optimalisasi pengelolaan program Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL/CSR), Dana Desa, kebijakan area tanaman kehidupan pada Kawasan HTI, penguatan kelembagaan kelompok tani dan memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam pengelolaan plasma nutfah. Berikut penjelasan dari masing-masing kebijakan dan program tersebut:

- a. **Implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria**²³. Dalam hal ini perlunya memperkuat kelembagaan baik di tingkat *stakeholder* daerah (kabupaten) dan juga kelembagaan di tingkat desa dan masyarakat. Dalam hal pembaruan agraria juga harus mementingkan pemetaan wilayah administratif desa secara tuntas, dimana hal ini seringkali menjadi persoalan yang sangat krusial bagi pengelolaan sumberdaya alam di tingkat desa dan masyarakat.
- b. **Optimalisasi pengelolaan program Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).** Dalam hal ini perlu melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan oleh perusahaan, mengevaluasinya dan disusun perencanaan yang lebih terarah dan sinergis. sedapat mungkin agenda ini juga disinkronkan dengan agenda pembangunan daerah.

²³ Beberapa kebijakan terkait hal ini adalah:

- Permen Lhk No. P.83/Menk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-li/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 37/Menhut-li/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/Menhut-li/2014 Tentang Hutan Desa
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BPN :No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan
- Permen Agraria Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang ada dalam kawasan tertentu

- 
- c. **Optimalisasi Dana Desa.** Desa-desa seharusnya mempunyai rencana dan tahapan untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu didorong untuk mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada, terutama dana desa dan akses terhadap sumberdaya lahan (melalui perhutsos dan pembaruan agraria) dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada pada mereka.²⁴
 - d. Mengoptimalkan kebijakan tentang area tanaman kehidupan pada Kawasan HTI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁵
 - e. Memperkuat kelembagaan kelompok tani petani menuju organisasi tani yang modern dan mempunyai orientasi sosial dan ekonomi yang mantap dan terukur.
 - f. Memperkuat kemampuan masyarakat lokal dalam pengelolaan plasma nutfah lokal, seperti pengembangan perikanan tangkap dan budidaya berbasis plasma nutfah lokal, pengembangan budidaya dan industri rakyat berbasis kelapa, pengembangan budidaya dan produk berbasis gambir, Pengembangan pertanian terpadu (*integrated farming*)

3.6.3. Pengelolaan Kawasan Konservasi

Terkait dengan pengelolaan lanskap Sembilang-Dangku, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dapat menjadi pedoman bagi kolaborasi dalam pengelolaan pada kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa. Beberapa substansi kebijakan yang dapat dijadikan pendukung bagi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

²⁴ Terkait hal ini perlu memperhatikan beberapa kebijakan berikut ini:

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

²⁵ Tanaman kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHKHTI) yang bersangkutan (Kemenhut 2015).



- a. adanya peluang bagi partisipasi masyarakat luas dalam pengelolaan Suaka Margasatwa dan Taman Nasional
- b. terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang dapat menjadi pedoman bersama
- c. terdapat beberapa panduan teknis dan prosedural bagi keterlibatan masyarakat
- d. Peluang pemanfaatan tradisional oleh masyarakat sekitar

Selain itu, menarik diperhatikan tentang beberapa substansi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya adalah:

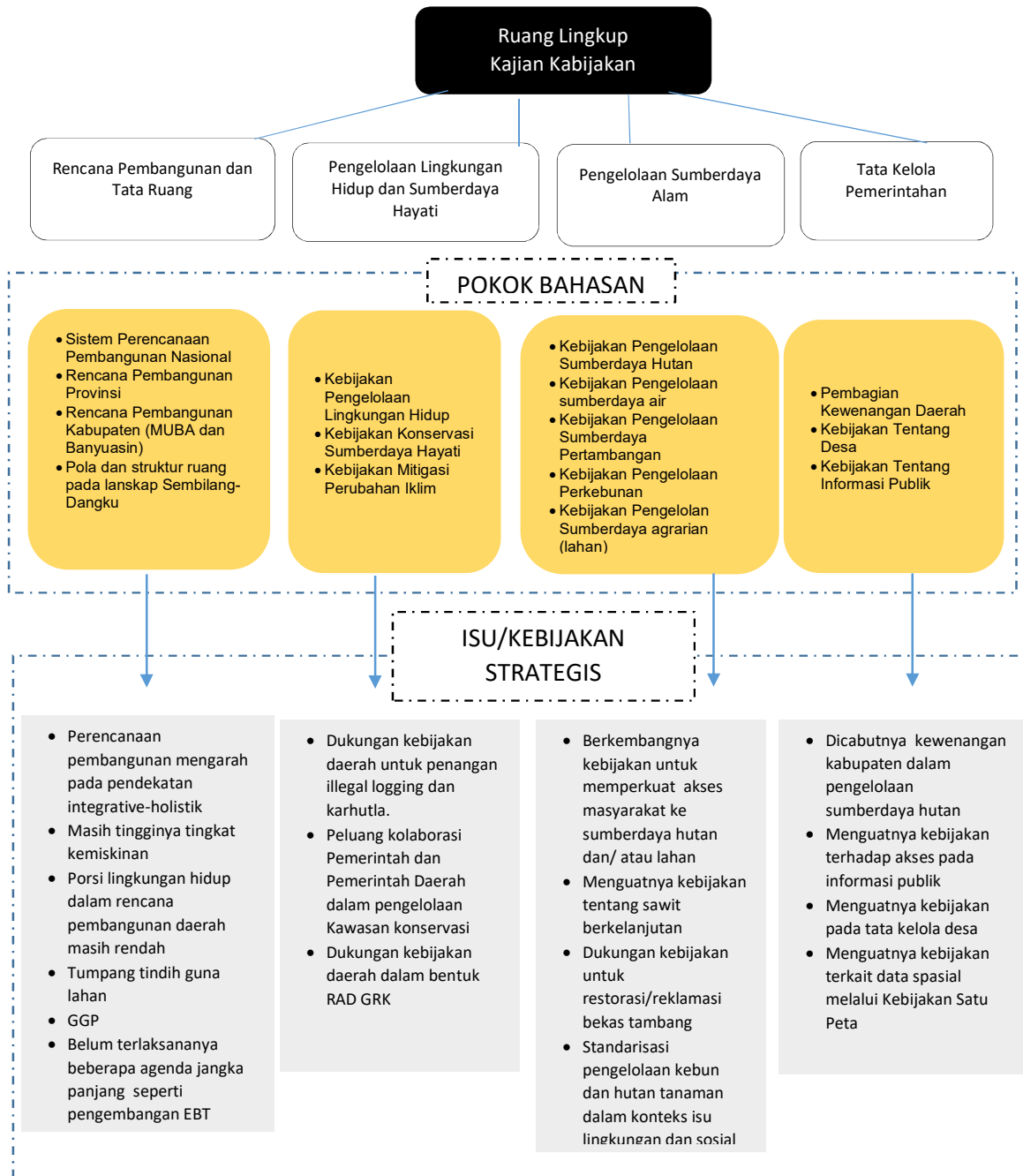
- a. terdapat kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dalam penetapan daerah penyangga, jika daerah penyangga tersebut bukan berupa hutan lindung atau hutan produksi
- b. pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk bersama-sama pemerintah pusat untuk mengelola daerah penyangga dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan
- c. pemerintah daerah dan pemerintah pusat didorong untuk melakukan sinergi dalam pengelolaan daerah penyangga.

3.6.4. Pengembangan Kebijakan yang mendukung kolaborasi antar pihak

Untuk dapat menjalankan berbagai peluang program dan kebijakan di atas perlu disusun ataupun diformulasikan sebuah skenario yang mendorong kolaborasi paripihak dengan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan mengembangkan forum multipihak (*public-private-people*) dan pengembangan visi bersama
- b. Menyusun rencana pengelolaan lanskap kolaboratif berbasis tema-tema spesifik dengan lokus area yang spesifik pula dengan capaian dan indikator kinerja yang terukur dan disepakati paripihak
- c. Membuat sistem monitoring lanskap kolaboratif (*public-private-people*) dengan basis *one map based monitoring system*.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan yang ada, maka perlu dipilih beberapa kebijakan sebagai kebijakan strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendekatan lanskap ini. Berikut ini adalah skema analisis kebijakan untuk memperoleh beberapa isu atau kebijakan prioritas untuk mewujudkan visi lanskap berkelanjutan.

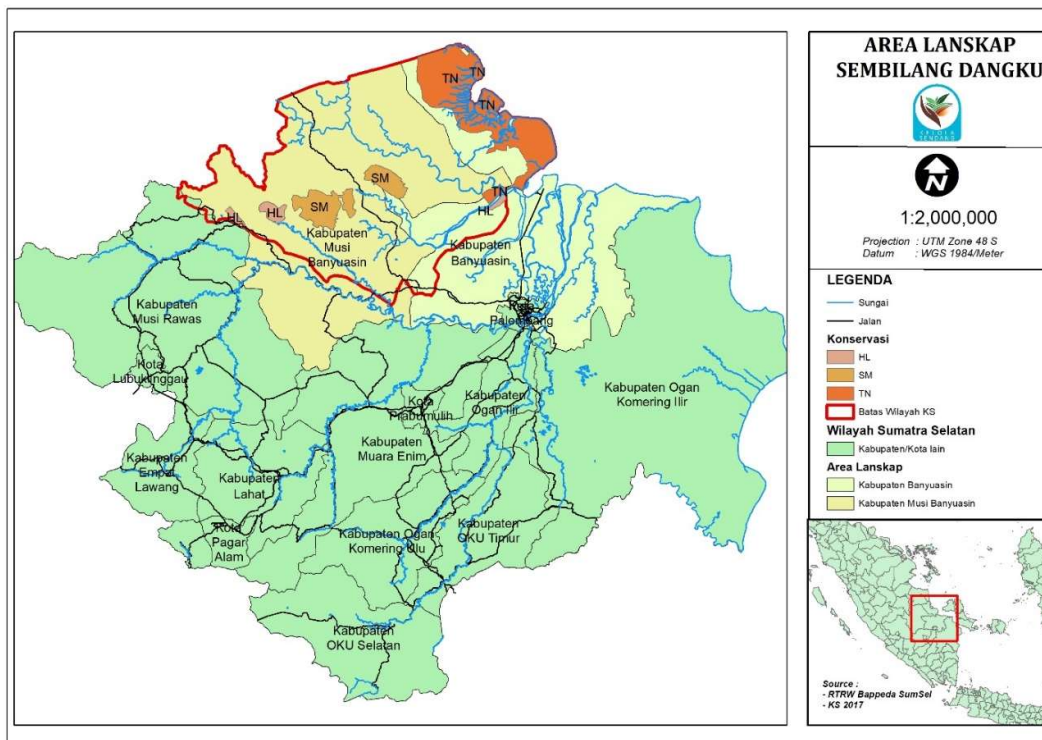


Gambar 3.1 Alur Pikir Kajian Kebijakan

4. PROFIL LANSKAP SEMBILANG DANGKU

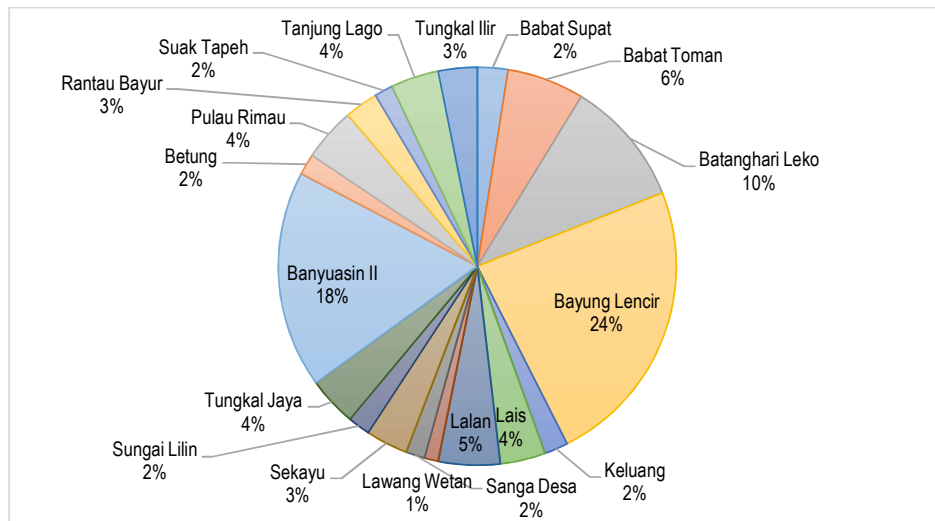
4.1. Gambaran Umum Lanskap

Lanskap Sembilang Dangku berada di bagian timur laut Provinsi Sumatera Selatan dimana sisi utara berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Disebut dengan Lanskap Sembilang Dangku karena lanskap ini membentang dari Taman Nasional Sembilang hingga Suaka Margasatwa Dangku. Lanskap Sembilang Dangku meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dengan cakupan luasan sekitar 1,6 juta ha dimana secara administratif berada di 19 kecamatan di 2 Kabupaten tersebut.



Gambar 4.1 Posisi Lanskap Sembilang Dangku Dalam Provinsi Sumatera Selatan

Dari 19 Kecamatan yang ada di Lanskap Sembilang Dangku, 12 kecamatan merupakan bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 1.339.006 ha sedangkan 7 Kecamatan lainnya dengan luas 719.562 ha masuk kedalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Luas kecamatan-kecamatan tersebut sangat bervariasi, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 4.2 Grafik rasio luas wilayah Kecamatan Pada Lanskap Sembilang-Dangku
 Sumber: Data olahan dari BPS (Banyuasin Dalam Angka 2017 dan Musi Banyuasin Dalam Angka 2017)

Kecamatan Bayung lencir memiliki rasio luasan terbesar dalam lanskap Sembilang Dangku (24%) dengan luas wilayah sekitar 484.700 Ha. Di dalam kecamatan ini terdapat kawasan hutan produksi yang berada dalam wilayah KPH Meranti dan KPH Lalan Mendis. Kecamatan dengan luasan terbesar kedua adalah Kecamatan Banyuasin II yang di dalamnya terdapat kawasan hutan konservasi yang masuk wilayah pengelolaan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

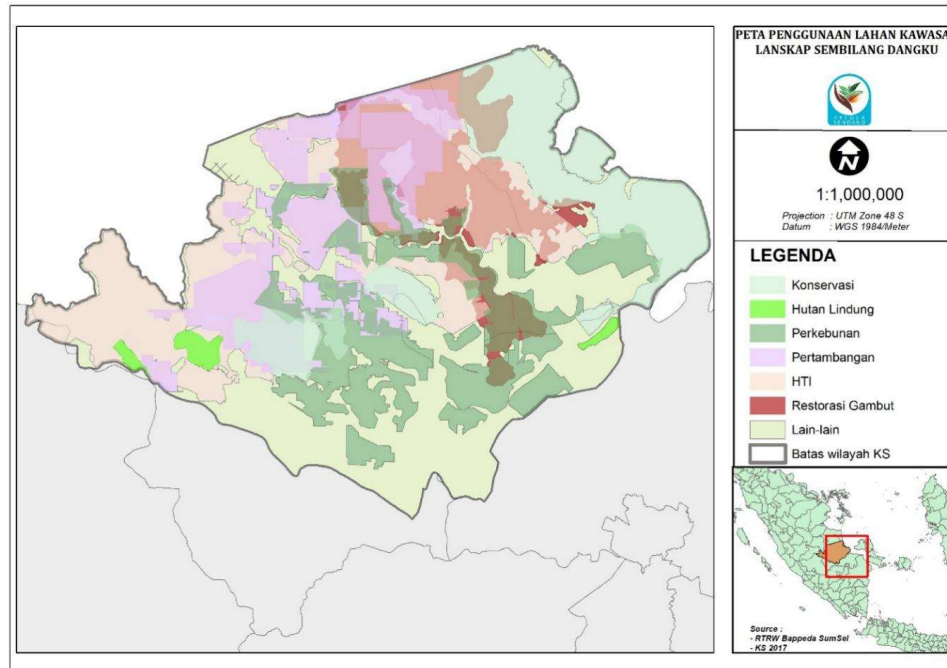
Jumlah penduduk di 19 kecamatan tersebut adalah 816.748 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 39,7 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Betung yaitu sekitar 158 jiwa/ km². Kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Batanghari Leko (11,1 jiwa/ km²) dan di Kecamatan Banyuasin II (12,1 jiwa/km²). Rendahnya kepadatan penduduk di kedua kecamatan ini disebabkan karena sebagian besar wilayah kecamatan tersebut merupakan kawasan hutan.

Detail luas wilayah dan jumlah penduduk beberapa kecamatan yang masuk pada lanskap Sembilang Dangku adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan tahun 2016

No	Kecamatan	Kabupaten	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Babat Supat	Musi Banyuasin	511,02	36.400	71,2
2	Babat Toman	Musi Banyuasin	1.291,00	32.090	24,9
3	Batanghari Leko	Musi Banyuasin	2.107,79	23.400	11,1
4	Bayung Lencir	Musi Banyuasin	4.847,00	82.620	17,0
5	Keluang	Musi Banyuasin	400,57	30.680	76,6
6	Lais	Musi Banyuasin	755,53	56.760	75,1
7	Lalan	Musi Banyuasin	1.031,00	41.080	39,8
8	Lawang Wetan	Musi Banyuasin	232,00	25.630	110,5
9	Sanga Desa	Musi Banyuasin	317,00	33.260	104,9
10	Sekayu	Musi Banyuasin	701,60	84.270	120,1
11	Sungai Lilin	Musi Banyuasin	374,36	59.250	158,3
12	Tungkal Jaya	Musi Banyuasin	821,19	44.160	53,8
13	Banyuasin II	Banyuasin	3.632,40	44.030	12,1
14	Betung	Banyuasin	354,41	56.237	158,7
15	Pulau Rimau	Banyuasin	888,64	42.165	47,4
16	Rantau Bayur	Banyuasin	556,91	42.023	75,5
17	Suak Tapeh	Banyuasin	312,70	18.034	57,7
18	Tanjung Lago	Banyuasin	802,42	39.132	48,8
19	Tungkal Ilir	Banyuasin	648,14	25.527	39,4
LUAS TOTAL			2.058.568	816.748	39,7

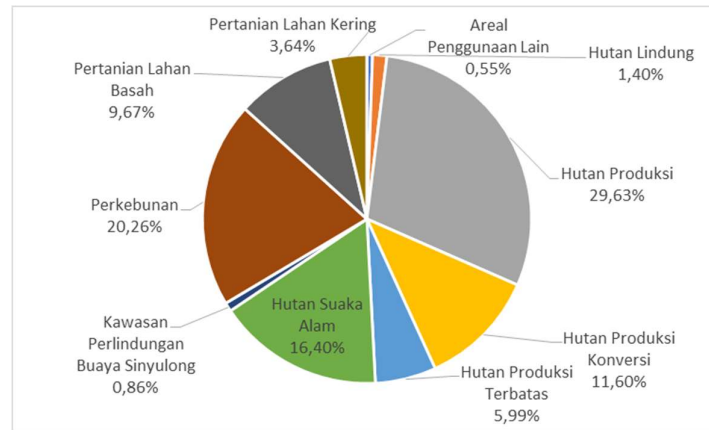
Sumber: Data olahan dari BPS (Banyuasin Dalam Angka 2017 dan Musi Banyuasin Dalam Angka 2017)



Gambar 4.3 Peta Penggunaan Lahan Pada Lanskap Sendang

Menurut analisa berdasar Peta Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin, kawasan hutan di Lanskap Sembilang Dangka menempati persentase luasan 65,02% dari total luasan lanskap 1,6 juta hektar. Kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Produksi menempati 29,63%, Hutan Suaka Alam (16,40%), Hutan Produksi Konversi (11,60%), Hutan Produksi Terbatas (5,99%) dan Hutan Lindung (1,40%). Kawasan hutan tersebut berada di dalam wilayah kelola KPHP Meranti, KPHP Lalan Mendis, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Suaka Margasatwa Dangka, dan Suaka Margasatwa Bentayan.

Wilayah di luar kawasan hutan terdiri dari kawasan perkebunan (20,26%), Pertanian lahan basah (9,67%), pertanian lahan kering (3,64%), kawasan perlindungan Buaya Sinyulong (0,86%) dan Area Penggunaan lain (0,55%). Kawasan perkebunan terdiri dari perkebunan sawit dan karet, baik yang dikelola perusahaan maupun masyarakat.



Gambar 4.4 Grafik Rasio Penggunaan Lahan di Lanskap Sembilang Dangku

Berdasarkan grafik diatas, peruntukan lahan di lanskap Sembilang Dangku didominasi oleh perkebunan dan hutan produksi yang secara bersama-sama mengambil porsi 49,89% dari total penggunaan lahan. Hal tersebut secara sepintas menggambarkan profil perekonomian kawasan lanskap Sembilang Dangku yang didominasi oleh pengusahaan lahan melalui pengembangan konsesi perkebunan dan kehutanan serta industri turunannya. Komoditi perkebunan yang menjadi andalan pada areal lanskap Sembilang Dangku yaitu Karet dan Kelapa Sawit. Paling tidak tercatat 20 perusahaan perkebunan besar swasta dan negara dan 16 perusahaan HTI yang terdapat diareal lanskap Sembilang Dangku. Hal tersebut tercermin pada tingginya PDRB sektor pertanian, perikanan dan kelautan pada Kabupaten Banyuasin yaitu sebesar 36,11% (*BPS Kabupaten Banyuasin 2012-2016*) dan 12,5% pada Kabupaten Musi Banyuasin (*BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2016*).

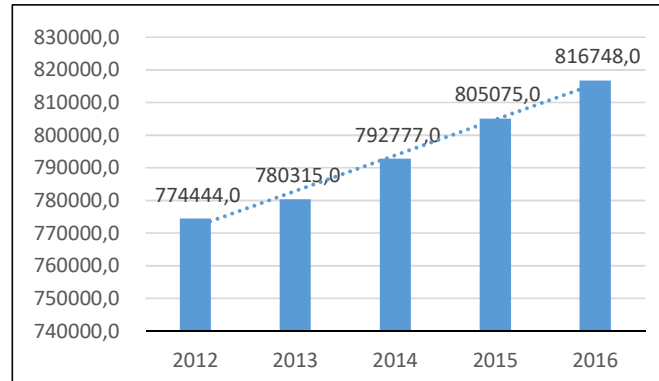
Selain itu, sektor pertambangan juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian kawasan, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sektor pertambangan dan Penggalian menyumbang 57,6% PDRB Kabupaten tersebut (*BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2012-2016*). Sektor pertambangan didominasi oleh pertambangan minyak bumi dan batubara. Tercatat sekitar 24 perusahaan yang bergerak dalam sektor tambang yang beroperasi didalam kawasan lanskap Sembilang Dangku.

Selain nilai penting lanskap bagi penghidupan masyarakat dan produksi, Lanskap Sembilang Dangku juga memiliki nilai penting bagi konservasi. Di dalam lanskap ini terdapat berbagai tipe ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ekosistem tersebut adalah hutan mangrove, hutan pantai, hutan dataran rendah, lahan gambut dan ekosistem lain yang menjadi habitat bagi hidupan liar baik flora maupun fauna. Nilai penting Lanskap Sembilang Dangku bagi konservasi terbukti dengan keberadaan 3 kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Sembilang, Suaka Margasatwa Dangku, dan Suaka Margasatwa Bentayan yang secara total mengambil porsi 16,40% dari total luas areal.

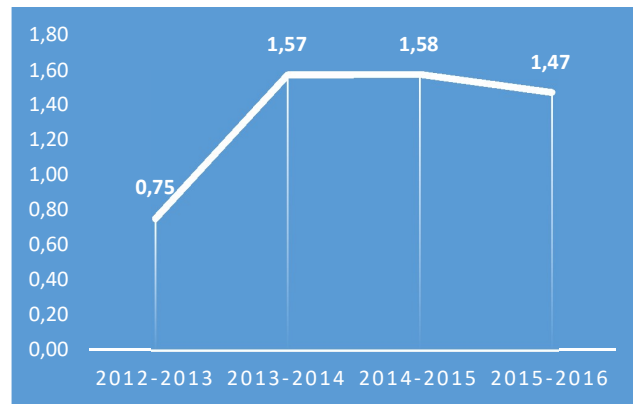
4.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

4.2.1. Dinamika Kependudukan

Dinamika kependudukan adalah telaah atas perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika kependudukan selain digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk dari satu waktu ke waktu yang lain, juga dapat untuk mempelajari dan mengantisipasi keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lain-lain.



Gambar 4.5 Perkembangan jumlah penduduk pada Lanskap Sembilang Danguku
(Sumber: Kompilasi Kecamatan dalam Angka 2012-2016)



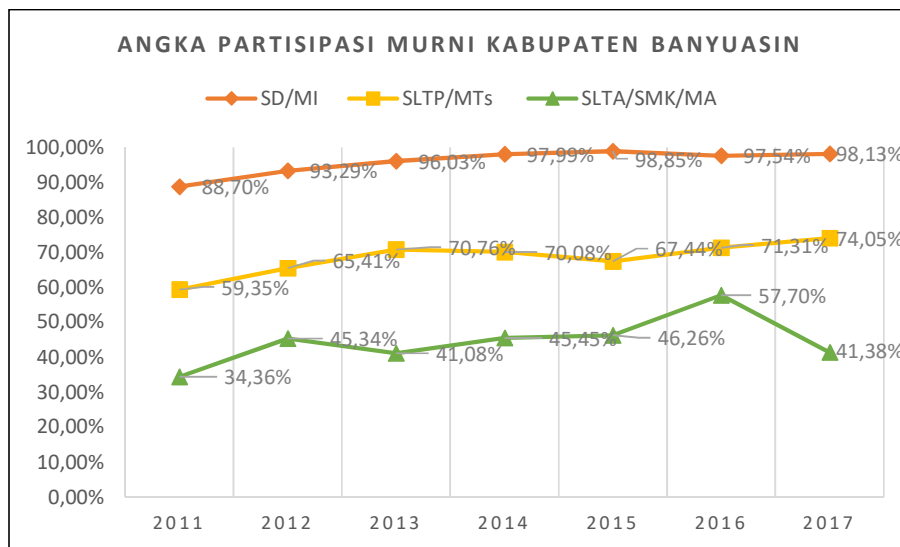
Gambar 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Lanskap Sembilang Danguku
(Sumber: Data Olahan dari Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Dalam Angka (2012-2016))

Dari grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di areal Lanskap Sembilang Danguku bernilai positif yang artinya terjadi penambahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Tercatat terjadi peningkatan sebesar 42.304 jiwa atau sekitar 5% dalam kurun 4 tahun (2012-2016). Laju pertumbuhan pertahun berkisar antara 1,47 – 1,58 % dengan nilai rerata 1,54% per tahun dimana angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka proyeksi pertumbuhan rata-rata provinsi Sumatera Selatan (1,46%) dan nasional (1,36%).

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kesejahteraan masyarakat. Secara umum kondisi pendidikan masyarakat yang berada di lanskap ini masih rendah dikarenakan masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak lulus pendidikan dasar. Kondisi kualitas pendidikan masyarakat dapat dilihat dari tingkat lulusan yang ada. Data yang tersedia dalam hal ini berupa data di tingkat kabupaten, belum tersedia data di tingkat lanskap.

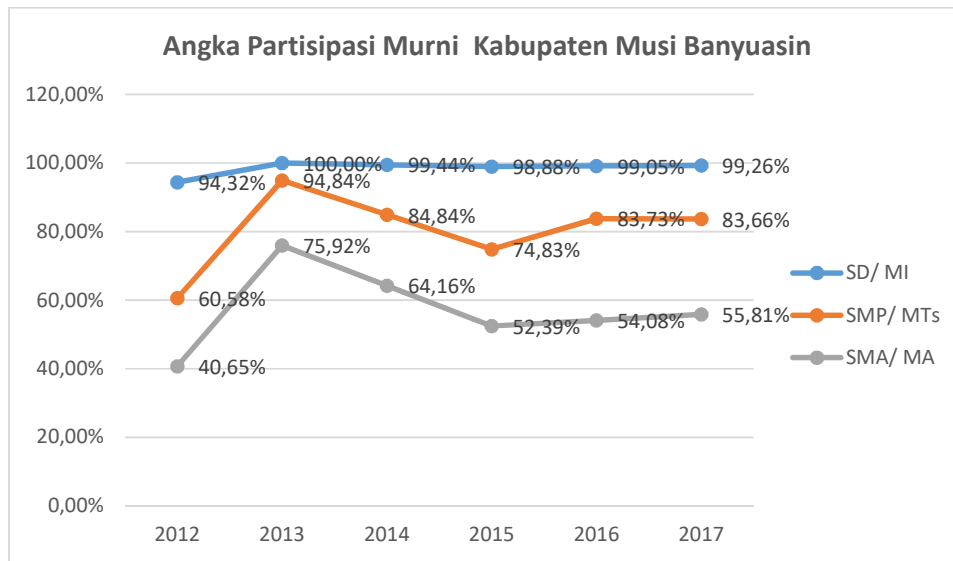
Salah satu data yang tersedia adalah data Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.



Gambar 4.7 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banyuwasin
Sumber: Kabupaten Banyuwasin dalam Angka, 2012-2017

Angka Partisipasi Murni tingkat SD dan SMP di Kabupaten Banyuwasin cenderung meningkat. Pada tingkat SD, hampir semua kelompok usia SD bersekolah, hampir mencapai 100%. Kondisi yang berbeda terdapat pada tingkat SMP yang pada tahun 2017 hanya mencapai 74,05%, yang artinya 25,95% penduduk usia SMP tidak berpartisipasi di sekolah tingkat SMP. Untuk APM tingkat SMA, angkanya cenderung fluktuatif, dengan angka APM tertinggi pada tahun 2016 (57,70%) yang menurun pada tahun 2017 hingga mencapai angka 41,38%.

Profil pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat tergambar pada Grafik Angka Partisipasi Murni di bawah ini.



Gambar 4.8 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Musi Banyuasin
Sumber: Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka, 2012-2017

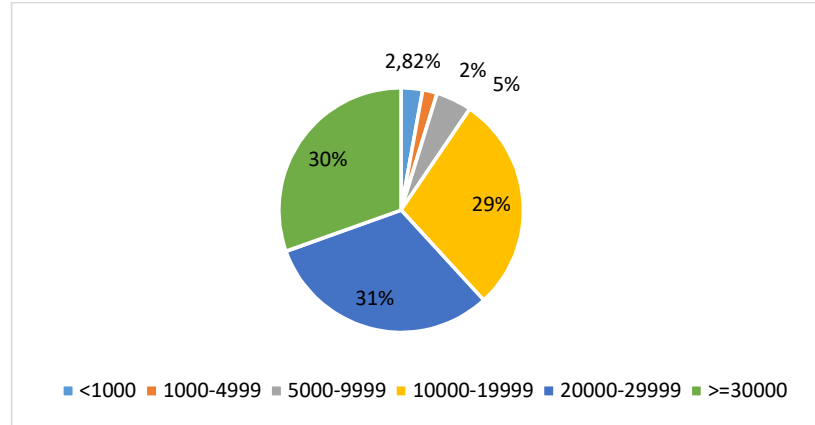
Angka Partisipasi Murni tingkat SD di Kabupaten Musi Banyuasin hampir mencapai 100%. Kondisi yang berbeda terdapat pada tingkat SMP yang pada tahun 2017 hanya mencapai 83,66%, yang artinya 16,34% penduduk usia SMP tidak berpartisipasi di sekolah tingkat SMP. Untuk APM tingkat SMA, angkanya cenderung fluktuatif, dengan angka APM tahun 2017 di angka 55,81%.

4.2.3. Aset dan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan

Jika melihat proporsi antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada didapat rata-rata ketersediaan lahan yang masih mencukupi sebagai aset sumber penghidupan masyarakat Lanskap Sembilang Dangku. Namun yang harus diingat adalah fakta bahwa sebagian lahan besar lahan yang tersedia berupa kawasan hutan negara dimana wewenang pengelolaannya diatur melalui mekanisme prosedural yang tidak selalu mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa untuk memenuhi sumber penghidupannya masyarakat berinisiatif untuk mengakses lahan hutan negara, baik secara sadar atau tidak bahwa lahan yang mereka garap merupakan kawasan hutan yang pemanfaatannya harus melalui prosedur perizinan. Dari sebuah survei yang dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga tersebut tidak memiliki izin resmi ²⁶.

²⁶ Angka Provinsi Sumatera Selatan Hasil Survey ST2013-Subsektor Rumah Tangga Usaha di Sekitar Kawasan Hutan, BPS 2014



Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Yang Menguasai Lahan Kawasan Hutan Menurut Golongan Luas Lahan (Ha) di Sumsel

Sumber: BPS 2014

Dari grafik diatas terlihat bahwa hampir seluruh rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang menguasai lahan kawasan hutan menguasai lahan lebih dari 1 Ha. Hanya sebagian kecil saja yang kurang dari 1 Ha, yaitu 10%nya saja. Dari total 29,651 rumah tangga yang menguasai lahan kawasan hutan, sebanyak 64,4 % nya tidak berizin. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat terhadap lahan hutan secara legal masih sangat terbatas.

Demikian pula dengan akses terhadap sumberdaya hutan non lahan. Dari 34,118 rumah tangga yang memungut hasil hutan tanpa menguasai lahan di kawasan hutan, hampir seluruhnya (97,7%) tidak berizin. Hanya 2,3% saja yang berizin, dengan sebagian besar izin tidak tertulis.²⁷

Tabel 4.2 Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Jenis Perizinan

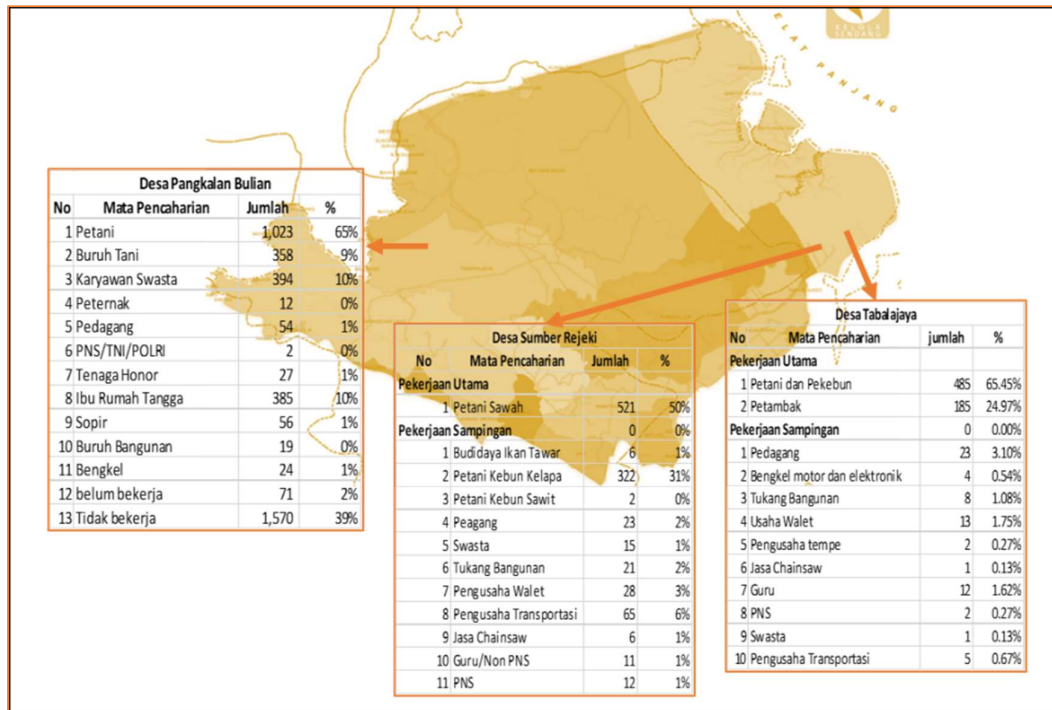
Jenis Perizinan	Pemanfaatan Kawasan Hutan	
	Menguasai Lahan Kawasan Hutan	Memungut Hasil Hutan/Menangkap Satwa Liar
A. Yang mendapat izin	10,542	775
1. Kementerian kehutanan	82	83
2. Dinas kehutanan	172	68
3. Bupati/walikota	0	0
4. Camat	49	
5. Lurah/kepala desa	2,429	154
a. tertulis	1,137	
b. tidak tertulis	1,292	154
6. Lainnya	7,810	470
a. tertulis	2,275	
b. tidak tertulis	5,535	470
B. Tidak mendapat izin	19,109	33,343
Jumlah	29,651	34,118

²⁷ Ibid

4.2.4. Mata Pencaharian

Hampir keseluruhan area Lanskap Sembilang Dangku merupakan kawasan perdesaan dengan karakter agraris yang kuat. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai petani, nelayan, buruh perkebunan, dan sektor pertanian lainnya. Pada lanskap ini masyarakat juga menjalankan beberapa aktivitas ekonomi yang bersifat ekstraktif seperti berburu, memanen madu di hutan, memanen rotan dan buah hutan. Di beberapa desa, masyarakat juga masih terlibat dalam pembalakan liar ataupun pertambangan minyak bumi illegal. Pertambangan illegal ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Data dari tiga desa di Lanskap Sembilang Dangku berikut ini dapat dijadikan gambaran profil mata pencaharian masyarakat di dalam lanskap. Data ini merupakan data dari Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin serta Desa Tabala Jaya dan Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.



Gambar 4.10 Karakteristik Mata Pencaharian Penduduk 3 Desa di Lanskap Sendang
(Sumber: Monografi Desa-KELOLA Sendang, 2017)

Data dari ketiga desa menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduknya terkait dengan kegiatan pertanian, baik sebagai petani, pekebun, maupun buruh tani atau buruh kebun. Sedangkan untuk pekerjaan di luar pertanian sangat bervariasi komposisinya di ketiga desa tersebut.

Khusus untuk desa di sekitar kawasan hutan di Sumatera Selatan, terdapat data mengenai sumber penghasilan utama masyarakat sekitar hutan yang diterbitkan oleh BPS. Data tahun 2014 ini memperlihatkan bahwa sumber penghasilan utama dari sebagian besar rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah dari usaha perkebunan (75,38%). Ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar kawasan hutan banyak menggantungkan hidupnya dari sektor perkebunan, baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Hal tersebut juga tercermin dari kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 40,36% pada tahun yang sama.

Tabel 4.3 Banyaknya Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Menurut Sumber Penghasilan Utamanya dan Status Pekerjaan

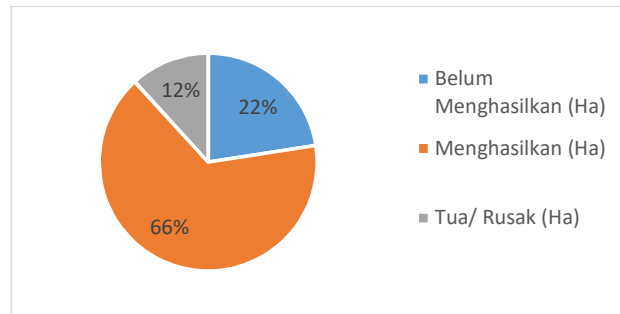
No.	Sumber Penghasilan Utama	Status Pekerjaan		Jumlah	Persentase
		Usaha	Buruh		
1	Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar	617	388	1.005	0,81%
2	Penangkaran satwa/tumbuhan liar	53	0	53	0,04%
3	Budidaya tanaman kehutanan	40	48	88	0,07%
4	Pemanfaatan wisata alam				0,00%
5	Padi/palawija	15.424	214	15.638	12,61%
6	Holtikultura	1.058	215	1.273	1,03%
7	Perkebunan	77.426	16.083	93.509	75,38%
8	Peternakan	158	31	189	0,15%
9	Perikanan	2.248		2.248	1,81%
10	Jasa pertanian	382	799	1.181	0,95%
11	Penambangan/penggalan	718	756	1.474	1,19%
12	Industri/kerajinan	187	0	187	0,15%
13	Perdagangan/hotel/restoran/rumah makan	2.541	64	2.605	2,10%
14	Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	541	356	897	0,72%
15	Sektor lain	1.417	1.561	2.978	2,40%
16	Pendapatan dan penerimaan lainnya			725	0,58%
Jumlah		102.810	20.515	124.050	100,00%

4.2.5. Komoditi Utama Pertanian

Sektor agraris merupakan sektor yang banyak menopang penghidupan masyarakat di areal Lanskap Sembilang Dangku. Sebagian besar sektor agraris khususnya pada sub sektor perkebunan seperti karet dan kelapa sawit sudah terintegrasi dengan sektor industri besar yang menampung hasil dari kebun rakyat. Pada bagian ini akan ditinjau 4 komoditi perkebunan utama yaitu karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Selain itu akan ditinjau pula hal terkait komoditi padi, perikanan lebak lebung dan peternakan.

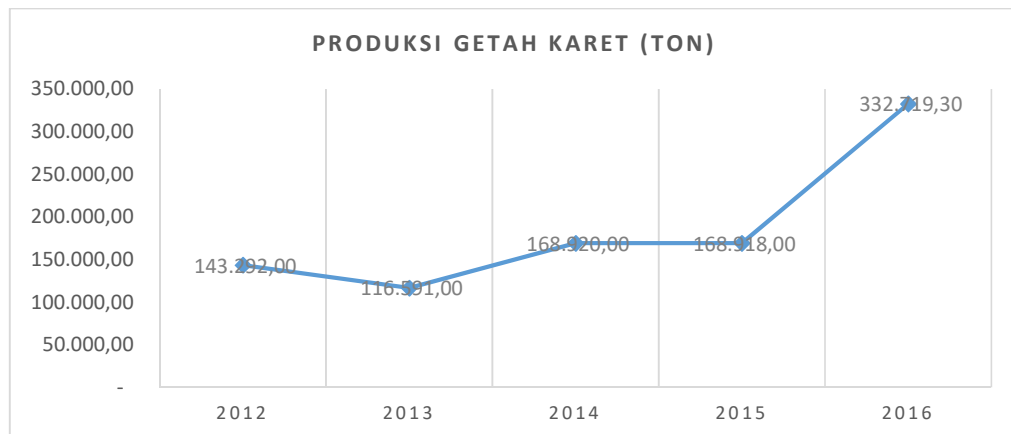
4.2.5.1. Karet

Komoditi karet di Lanskap Sendang merupakan salah satu komoditi andalan yang banyak diusahakan oleh masyarakat secara mandiri. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 69.586 petani karet di Kabupaten Musi Banyuasin dan 31.494 petani karet di Kabupaten Banyuasin.²⁸ Pada areal lanskap, luas kebun karet rakyat adalah 232.373,50 Ha yang terdiri 66% berupa tanaman usia produktif (menghasilkan), 22% tanaman belum menghasilkan, dan 12% tanaman tua/rusak.



Gambar 4.11 Kondisi Tanaman Karet pada Lanskap Sembilang Dangku
(Sumber: Kompilasi Kecamatan Dalam Angka 2016)

Dari data yang ada, semenjak tahun 2012-2015 terjadi kenaikan luasan tanaman produktif sebesar 88,47% atau rata-rata 30% dalam setahun. Produksi getah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2012-2016, yaitu sebesar 132% dengan rata-rata kenaikan per tahun 26,44%. Kenaikan produksi getah terutama terjadi dari tahun 2015-2016 dimana pada tahun 2015 produksi getah sebesar 168.918 ton dan naik hampir dua kali lipat menjadi 332.719,30 ton pada 2016.

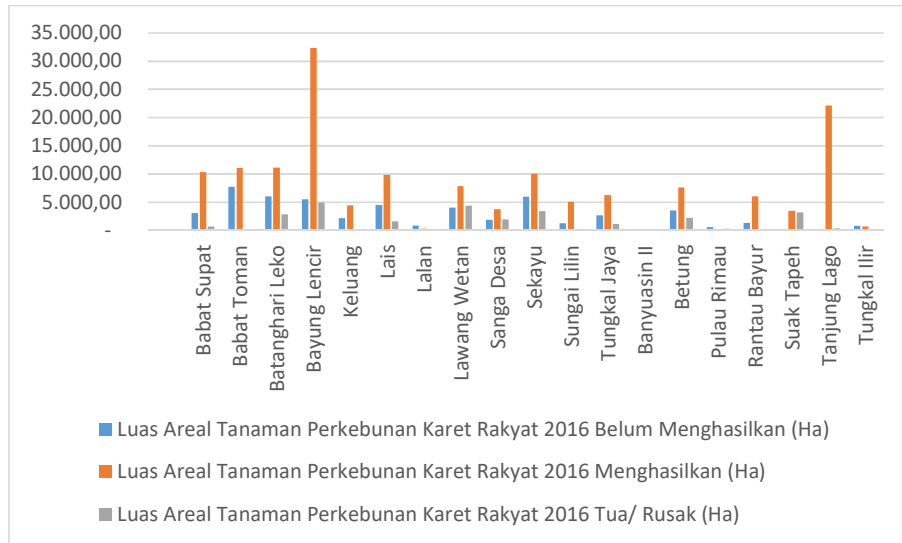


Gambar 4.12 Perkembangan Produksi Getah Karet di Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2012-2016)

²⁸ Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Karet 2015-2017.

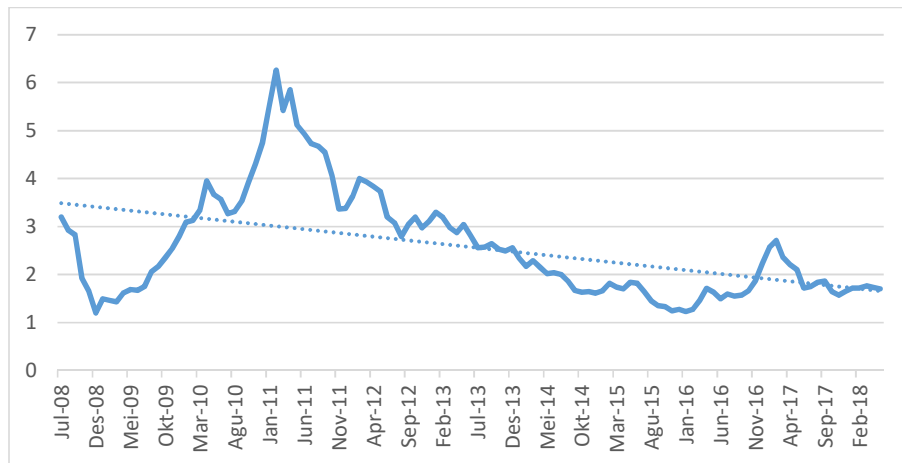


Sebaran areal karet rakyat terdapat diseluruh kecamatan yang ada di Lanskap Sendang dengan luasan terbesar di Kecamatan Bayung lencir dan Tanjung Lago. Areal karet di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh areal karet yang menghasilkan dengan luasan di Kecamatan Bayung Lencir lebih dari 30.000 Ha dan di Tanjung Lago lebih dari 20.000 Ha.



Gambar 4.13 Sebaran Luas Tanaman Karet Pada Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2017)

Karet merupakan komoditi penting bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di lanskap Sembilang Dangku dan mempunyai fluktuasi harga yang tinggi. Berikut gambaran kecenderungan (*trend*) harga karet dunia.

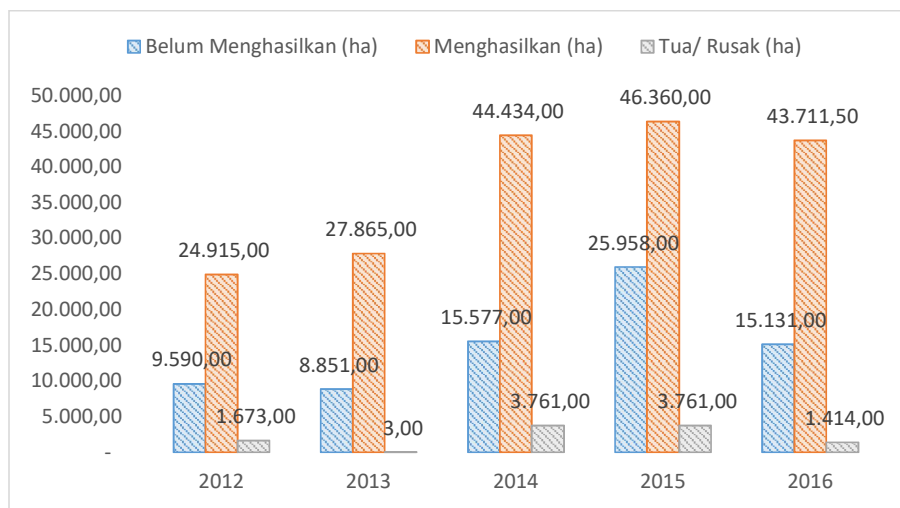


Gambar 4.14 Kecenderungan Perubahan Harga Karet Dunia (USD/kilogram)
 Sumber: indexmundi.com

Grafik di atas memperlihatkan bahwa harga karet sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada rentang tahun 2008 hingga 2018, harga mengalami penurunan drastis hingga pada titik terendah pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 2016. Harga tertinggi terjadi pada awal tahun dan terus merosot turun hingga awal 2016. Pada tahun 2017, harga karet sedikit mengalami kenaikan namun segera mengalami penurunan lagi. Dibandingkan dengan harga karet tertinggi pada awal tahun 2011, harga karet pertengahan tahun 2018 hanya sebesar 27%nya saja.

4.2.5.2. Kelapa Sawit

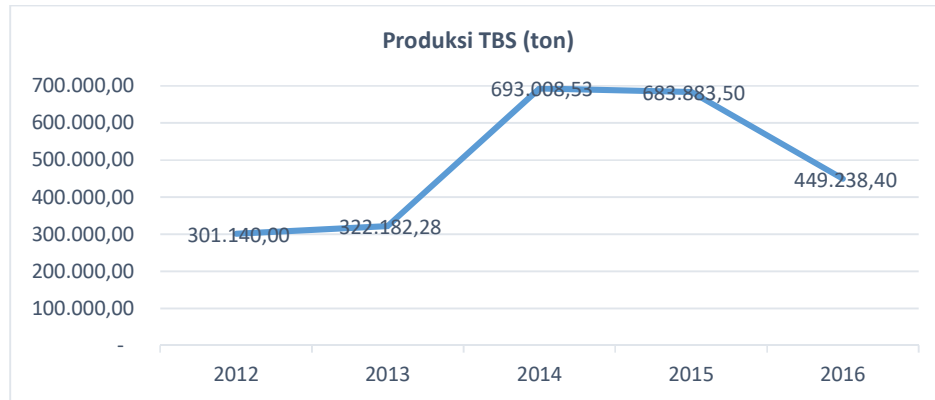
Pada Lanskap Sembilang Dangku, dari 19 kecamatan yang ada hampir seluruhnya memiliki komoditi sawit rakyat yang dibudidayakan secara mandiri oleh petani. Hanya di Kecamatan Suak Tapeh dan Tanjung Lago yang belum memiliki sawit rakyat yang sudah berproduksi. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 54.502 petani kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dan 32.685 petani kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin.²⁹Total luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat yang diusahakan sebesar 43.711,50 Ha pada tahun 2016, naik sebesar 75,44% dari tahun 2012, dimana rata-rata terdapat penambahan luasan hampir 19% per tahun.



Gambar 4.15 Kondisi Tanaman Sawit Rakyat Pada Lanskap Sembilang Dangku
 Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2012-2017)

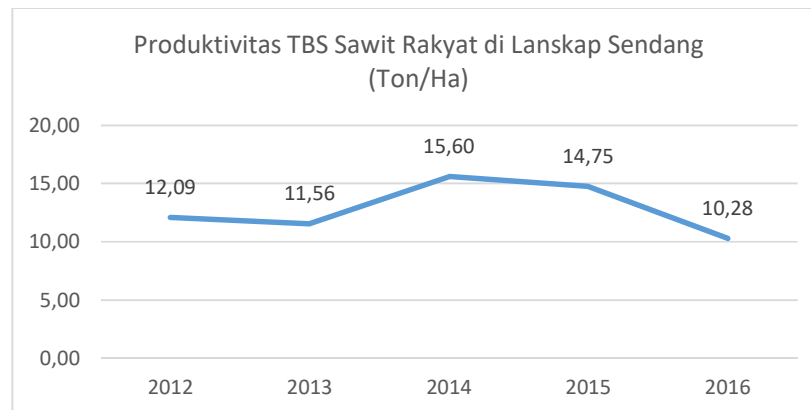
Pada sisi produksi terdapat fluktuasi jumlah produksi yang dihasilkan dari Lanskap Sendang, dimana penambahan areal panen secara konstan tidak selalu menghasilkan kenaikan produksi secara linear. Tren penurunan jumlah produksi sawit rakyat dimulai pada tahun 2015 sampai 2016, dimana produksi pada tahun 2016 turun sekitar 35% meskipun luas areal panennya hanya menurun sebesar 1,6%.

²⁹ Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa Sawit 2015-2017

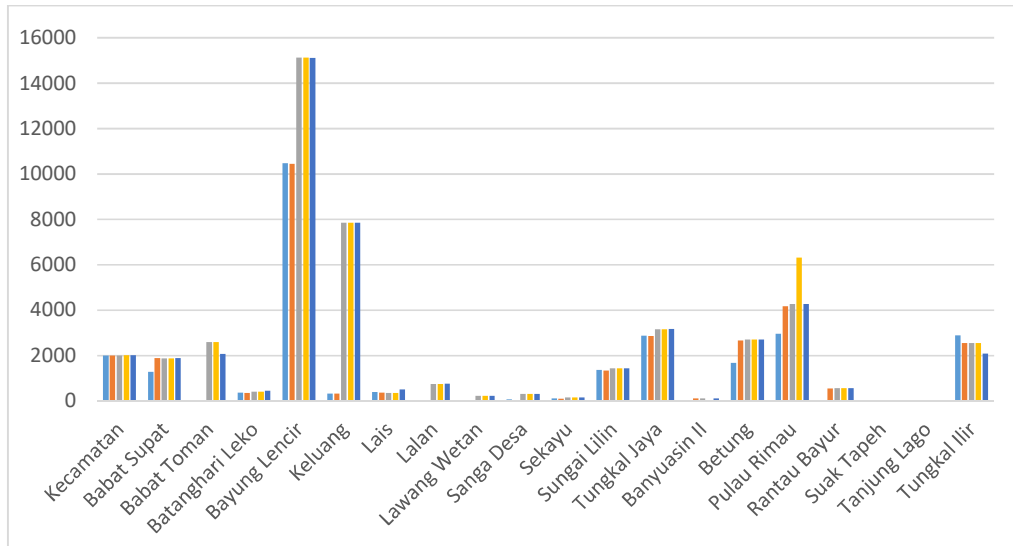


Gambar 4.16 Dinamika Produksi TBS Rakyat pada Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2013-2017)

Penurunan jumlah produksi merupakan konsekuensi dari rendahnya produktivitas sawit rakyat yang ada. Berdasarkan data yang ada produktivitas lahan sawit rakyat di lanskap berkisar 15,6 sampai 10,26 ton/ha atau kurang dari setengah target nasional yang mematok produktivitas TBS 35 ton/ha/th.



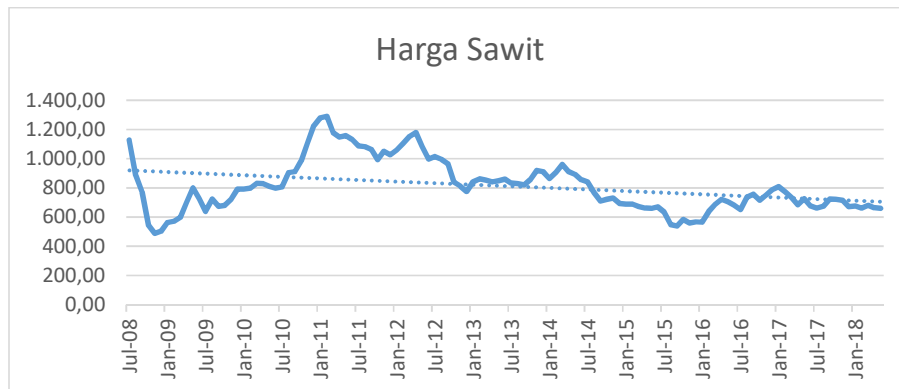
Gambar 4.17 Dinamika Produktivitas TBS Rakyat pada Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2013-2017)



Gambar 4.18 Sebaran Kebun Sawit Rakyat pada Lanskap Sendang 2012-2016

Sumber: Diolah dari Kecamatan Dalam Angka, BPS (2013-2017)

Harga normal Tandan Buah Segar (TBS) sawit berkisar pada angka Rp 1.600 – Rp 1.700 pada tahun 2015 turun drastis hingga menyentuh angka Rp 400 sebagai akibat menurunnya permintaan pasar global dan juga rendahnya nilai tukar rupiah. Di tingkat global pun harga minyak sawit dan juga minyak nabati lainnya mengalami penurunan



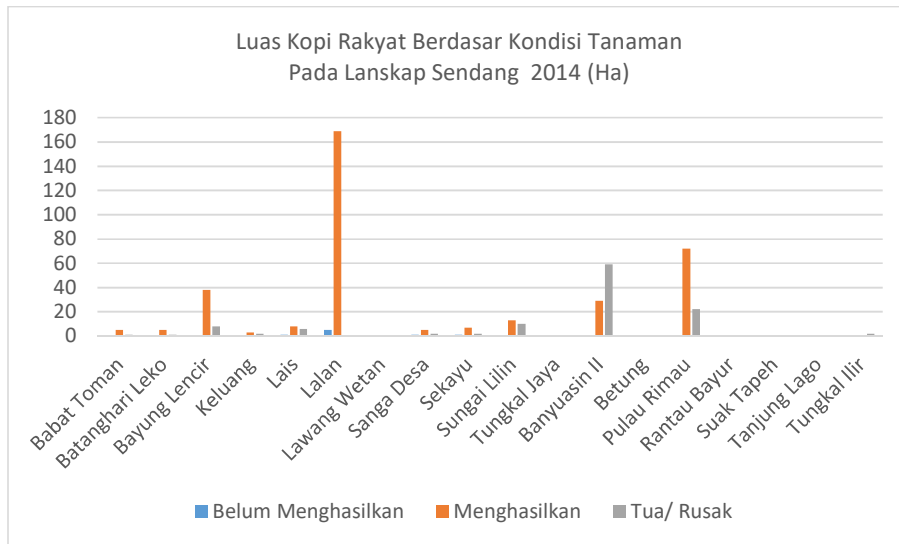
Gambar 4.19 Kecenderungan Perubahan Harga Sawit (USD/Metric Ton)

Sumber: indexmundi.com

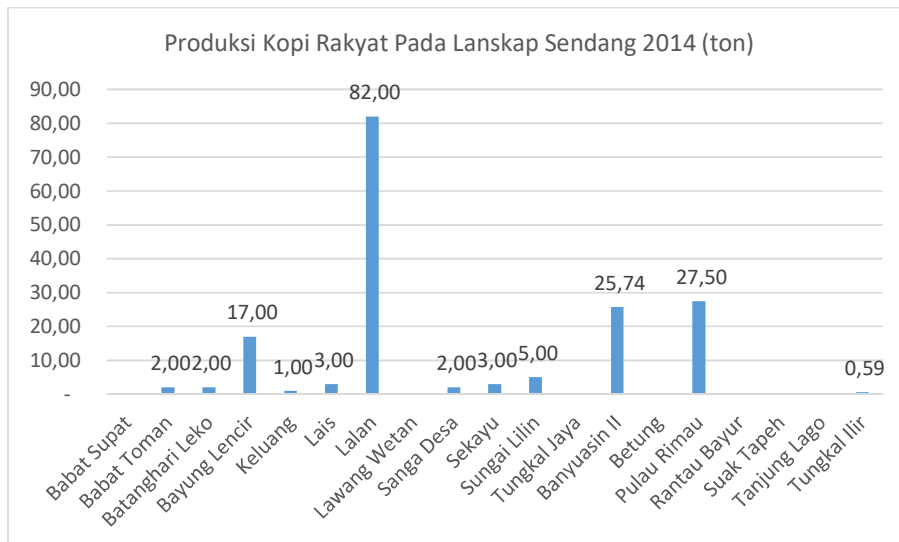
Grafik di atas memperlihatkan bahwa harga sawit sangat fluktuatif dan cenderung menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2008, harga sawit mengalami penurunan drastis hingga pada titik terendah. Setelah itu harga merangkak naik hingga mencapai puncaknya pada awal tahun 2011. Dari titik tersebut hingga pertengahan tahun 2018 harga berfluktuasi dengan kecenderungan terus menurun. Dibandingkan dengan harga di titik puncak tahun 2011 (1.290 USD/metric ton), harga di pertengahan tahun 2018 hanya 51%nya saja (660 USD/metric ton).

4.2.5.3. Kopi

Komoditi kopi juga banyak diusahakan masyarakat pada Lanskap Sembilang Dangku. Di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin banyak dibudidayakan di Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir. Sedangkan di wilayah Kabupaten Banyuasin banyak diusahakan di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Pulau Rimau.

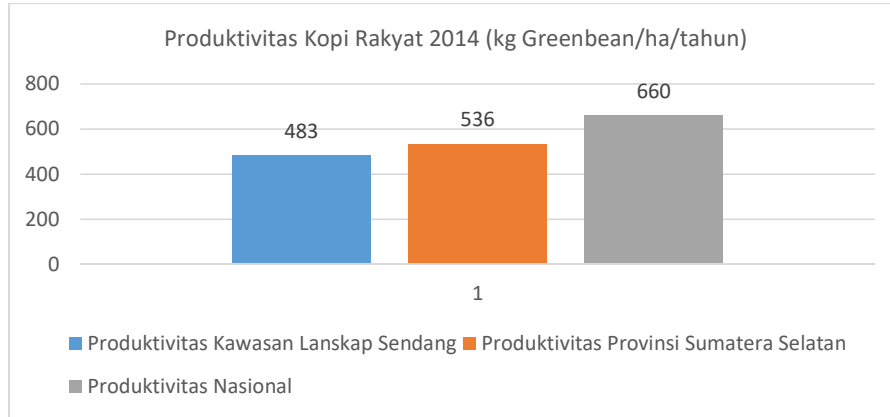


Gambar 4.20 Luas Kopi Rakyat Berdasar Kondisi Tanaman Pada Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2015)



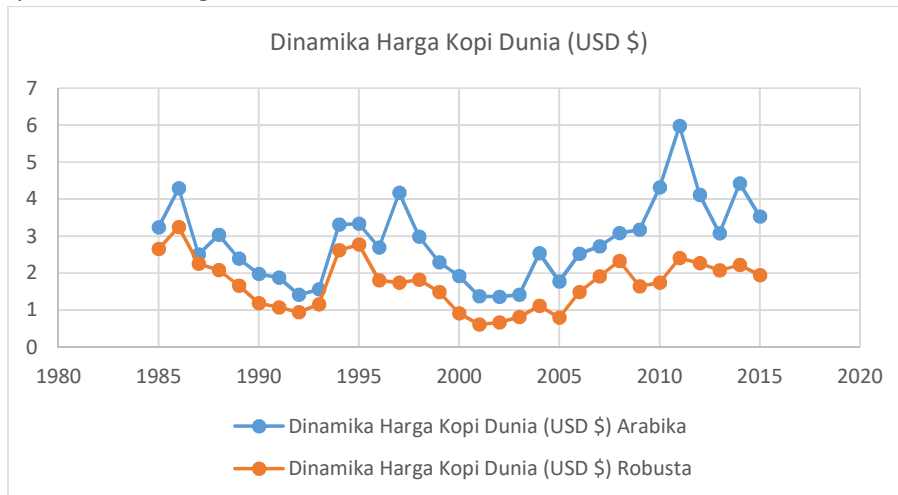
Gambar 4.21 Produksi Kopi Rakyat Pada Lanskap Sendang
Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2015)

Produktivitas tanaman kopi rakyat yang diusahakan di areal lanskap masih rendah. Masih di bawah produktivitas kopi rakyat secara nasional maupun provinsi.



Gambar 4.22 Produktivitas Kopi Rakyat
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2015)

Harga kopi dunia cukup fluktuatif terutama untuk kopi jenis arabica yang sempat mengalami lonjakan harga pada sekitar tahun 2011. Walaupun relatif lebih stabil dibanding jenis arabica, harga kopi jenis robusta juga mengalami dinamika perubahan harga.



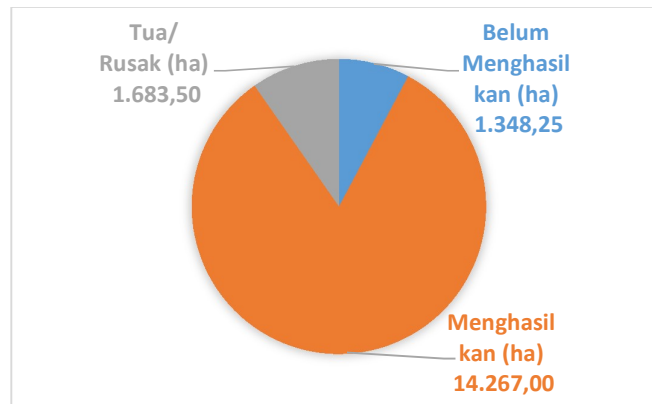
Gambar 4.23 Dinamika Harga Kopi Dunia
 Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia (2015)

4.2.5.4. Kelapa

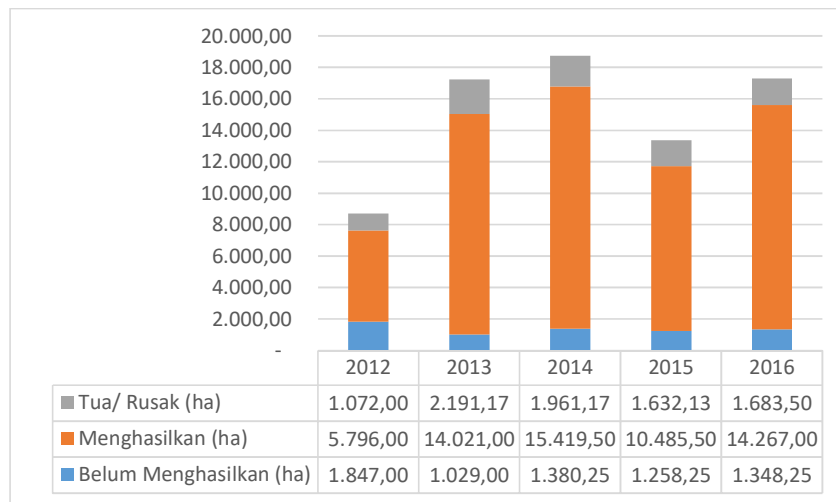
Kelapa merupakan salah satu produk unggulan areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama pada wilayah yang masuk di Kabupaten Banyuasin. Data tahun 2015 menunjukkan terdapat 14.663 petani kelapa di Kabupaten Musi Banyuasin dan 33.713

petani kelapa di Kabupaten Banyuasin.³⁰ Secara ekonomis, produk kelapa mampu bersaing dengan produk-produk perkebunan lainnya.

Produk kelapa semuanya dikelola oleh masyarakat. Pada awalnya produk kelapa dijual dalam bentuk kopra, tetapi beberapa tahun terakhir kelapa banyak dijual dalam bentuk utuh bersama tempurung dan sabutnya. Kelapa utuh ini sekarang banyak diminati oleh negara-negara seperti Tiongkok dan Thailand, sebagian juga dikirim ke Jakarta. Pada saat ini pengiriman kelapa mencapai 60-70 kontainer per hari, sehingga tidak mengherankan kelapa menempati posisi ke-12 sebagai komoditi unggulan ekspor Sumatera Selatan, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 1 triliun per tahun.

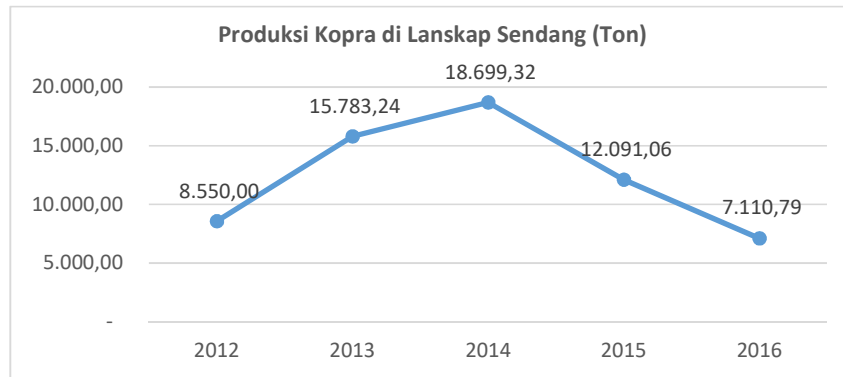


Gambar 4.24 Kondisi Tanaman Kelapa di Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017)



Gambar 4.25 Potensi Kelapa di Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017)

³⁰ Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017. Statistik Perkebunan Indonesia: Kelapa 2015-2017.

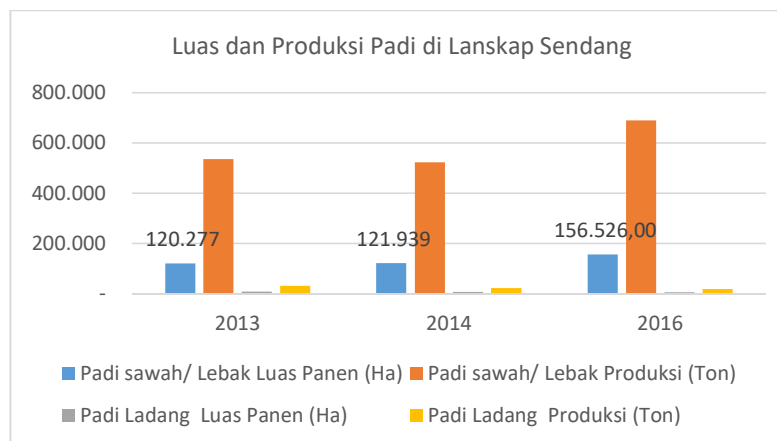


Gambar 4.26 Produksi Kopra di Lanskap Sendang
 Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2017)

Perubahan bentuk komoditi kelapa dari kopra menjadi kelapa utuh tercermin dari data turunnya produksi Kopra secara drastis di area Lanskap Sembilang Dangku, walaupun luas area tanaman kelapa yang menghasilkan semakin luas.

4.2.5.5. Padi

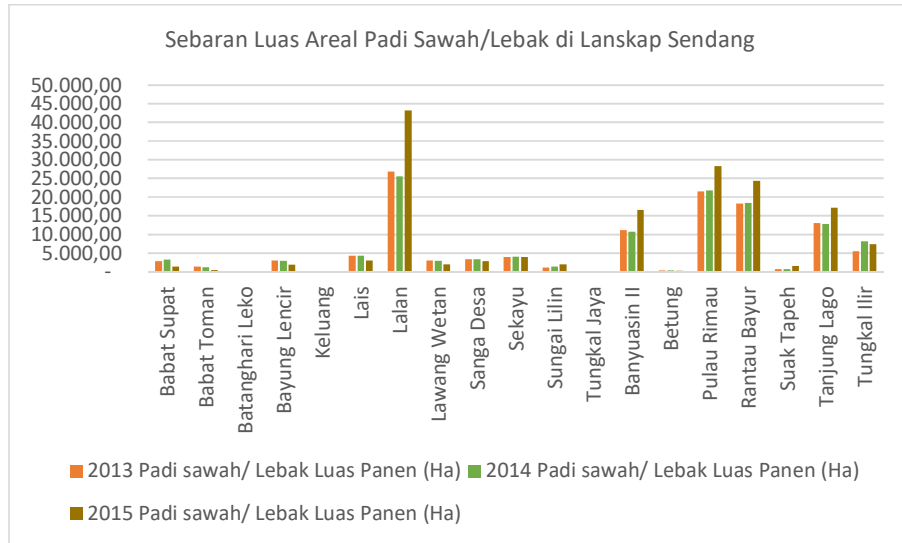
Padi merupakan salah satu komoditi unggulan pada areal Lanskap Sembilang Dangku, terutama untuk wilayah yang berada di Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut tercermin dari luasan panen yang mencapai sekitar 20% dari luas total panen provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut memiliki arti bahwa areal Lanskap Sembilang Dangku memiliki posisi dan peran yang penting bagi produksi pangan di level regional. Untuk produktivitas padi di Lanskap Sembilang Dangku mencapai 4,37 ton/ha/tahun dimana lebih rendah dari produktivitas provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 4,98 ton/ha/tahun.



Gambar 4.27 Luas dan Produksi Padi di Lanskap Sendang

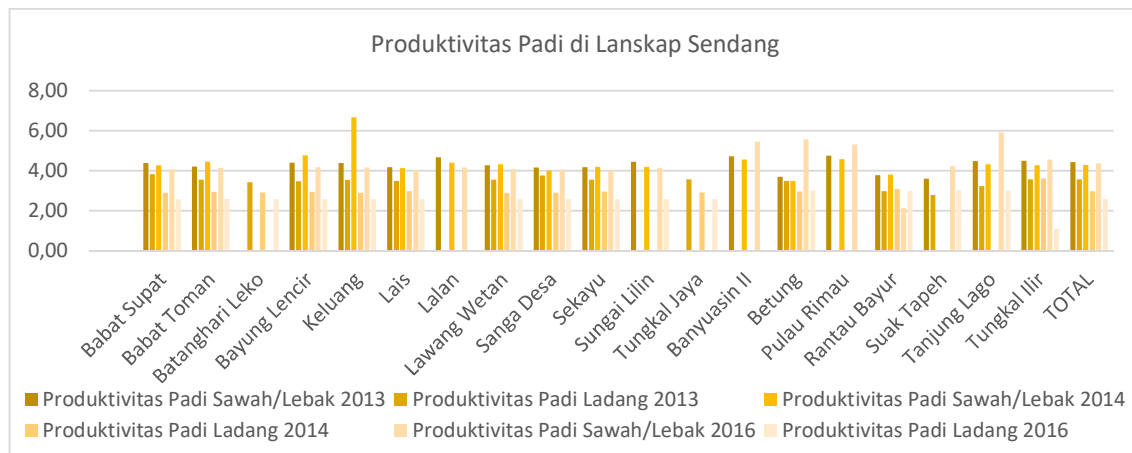


Pada areal lanskap Sembilang Dangku, pertanian padi tersebar merata di seluruh kecamatan meskipun ada yang memiliki hanya padi ladang (Kecamatan Batanghari leko dan Tungkal jaya). Sentra pertanian padi terluas ada di kecamatan Lalan, Pulau rimau, Rantau bayur, Tanjung lago dan Banyuasin II.



Gambar 4.28 Sebaran Luas Areal Padi Sawah/Lebak di Lanskap Sendang

Untuk produktivitas lahan pertanian padi, nilainya cukup merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Keluang yang produktivitas padi sawahnya pada tahun 2014 melebihi 6 ton/ Ha.



Gambar 4.29 Produktivitas Padi di Lanskap Sendang

4.2.5.6. Perikanan Lebak Lebung

Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar wilayahnya secara geografis merupakan dataran rendah yang banyak dialiri sungai dan rawa-rawa. Rawa lebak lebung merupakan rawa-rawa yang terdapat disekitar aliran sungai dimana areal tersebut tergenang saat musim penghujan dan kering saat musim kemarau. Fluktuasi ketinggian air antara musim penghujan dan musim kemarau sangat tinggi, dimana pada saat tergenang disebut sebagai lebak dan pada saat surut, sisa-sisa genangan yang ada disebut sebagai lebung; sistem pasang surut inilah yang secara bersama-sama disebut sebagai sistem lebak lebung.

Areal lebak lebung melalui sistem pasang surutnya menciptakan sebuah mekanisme pompa nutrisi alami yang berasal dari dekomposisi seresah vegetasi sehingga mengandung unsur hara tinggi yang cocok untuk kegiatan pertanian maupun perikanan. Lebak biasanya berada di antara dua buah sungai besar di dataran rendah. Berbeda dengan rawa pasang surut yang genangan airnya dipengaruhi pasang surut air laut harian, lebak tergenang selama musim hujan dan berangsurangsur kering pada musim kemarau.

Ada tiga jenis lebak berdasarkan tinggi dan lama genangan. Lebak pematang atau dangkal, bila genangan airnya kurang dari 50 cm selama kurang dari 3 bulan; lebak tengahan, dengan genangan air antara 50–100 cm selama 3—6 bulan; dan lebak dalam bila genangan airnya lebih dari 100 cm selama lebih dari 6 bulan. Kawasan lebak dalam yang menghasilkan produksi ikan secara alami dikenal dengan istilah **Lebak Lebung**.

Propinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar; potensi tersebut meliputi perairan laut dengan luas 95.000 Km² dan perairan umum seluas 2,5 juta Ha yang terdiri 15 % rawa, 43 % lebak (total rawa lebak 58%), 31%

sungai besar serta anaknya, dan 11% danau (DKp, 2002). Sekitar 146.279 hektar areal lebak lebung dikelola 220 ribu petani di Sumatera Selatan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Secara kewilayahan dari areal lebak lebung yang ada, sebanyak 58,96 persen tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir. Sisanya 41,04 persen ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Muaraenim, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, dan Kota Palembang.

Potensi lahan sawah lebak dan rawa yang dapat dikembangkan untuk budidaya ikan serta jumlah kolam/tebat/empang yang ada di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Luas Lahan Potensi Perikanan di Kabupaten Muba dan Banyuasin

Jenis Lahan	Muba (Ha)	Banyuasin (Ha)
Sawah Lebak	30.487	30.839
Rawa	109.845	220.490
Kolam/Tebat/Empang	1.385	425

Sumber: Data BPS, 2017

Tak hanya sebagai kawasan ekologis, lebak lebung membentuk kebudayaan lokal. Khususnya lewat interaksi petani dengan alam yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan terhadap alam. Sistem usaha tani yang dibangun dalam kebudayaan lebak lebung adalah sistem terpadu antara tanaman semusim (padi sawah, palawija, dan sayuran), ternak (kerbau dan itik), serta usaha penangkapan ikan.

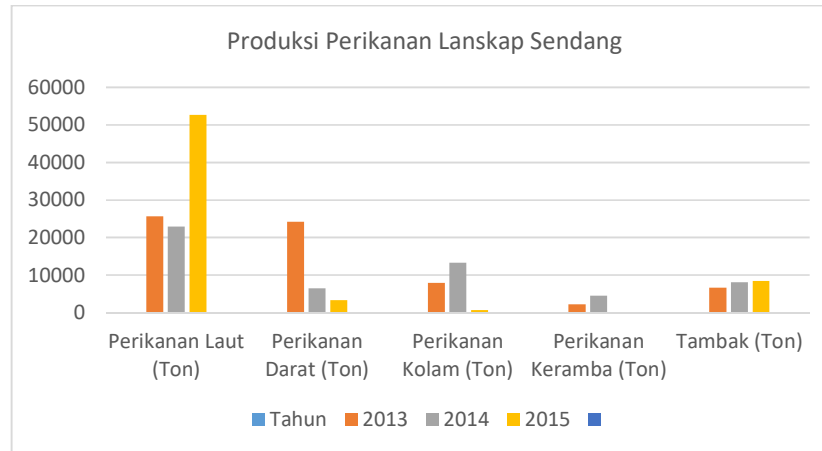
Di areal lebak lebung, pohon seperti kelapa, mangga, durian dan duku, hanya dapat ditanam di lahan yang tidak tergenang, misalnya di pinggir sungai. Musim tanam pagi di lebak hanya sekali dalam setahun. Palawija dan sayuran ditanam bersamaan dengan padi yang ditanam pada galangangalangan sawah lebak. Sedangkan pada musim hujan, petani menangkap ikan, menggembala ternak, atau mengusahakan kerajinan tangan, seperti tenun pakaian adat, anyaman tikar, dan alat rumah tangga.

Pada saat ini terdapat ancaman keberlanjutan sistem perikanan lebak lebung yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait.

Dari beberapa literatur yang ada, diindikasikan ada beberapa hal yang mengancam kelestarian lebak lebung, antara lain:

- Pencemaran perairan
- Konversi areal lebak lebung
- Kerusakan sistem tata air alami akibat pembangunan kanal-kanal
- Perubahan iklim

Pada konteks Lanskap Sendang, data yang ada menunjukkan penurunan hasil tangkapan perikanan air tawar, meskipun belum ada data yang spesifik menjelaskan koneksinya dengan perubahan pada sistem lebak lebung.

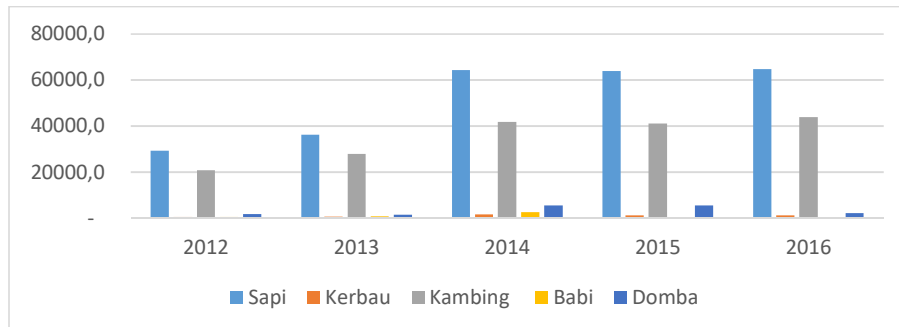


Gambar 4.30 Produksi Perikanan Lanskap Sendang

Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2014-2016)

4.2.5.7. Peternakan

Sumber protein yang didapatkan masyarakat area lanskap meliputi sumber protein hewani dari peternakan. Berikut ini gambaran jumlah ternak besar di area lanskap SENDANG tahun 2012 hingga 2016:



Gambar 4.31 Jumlah Ternak Besar di Area Lanskap Sembilang Dangku

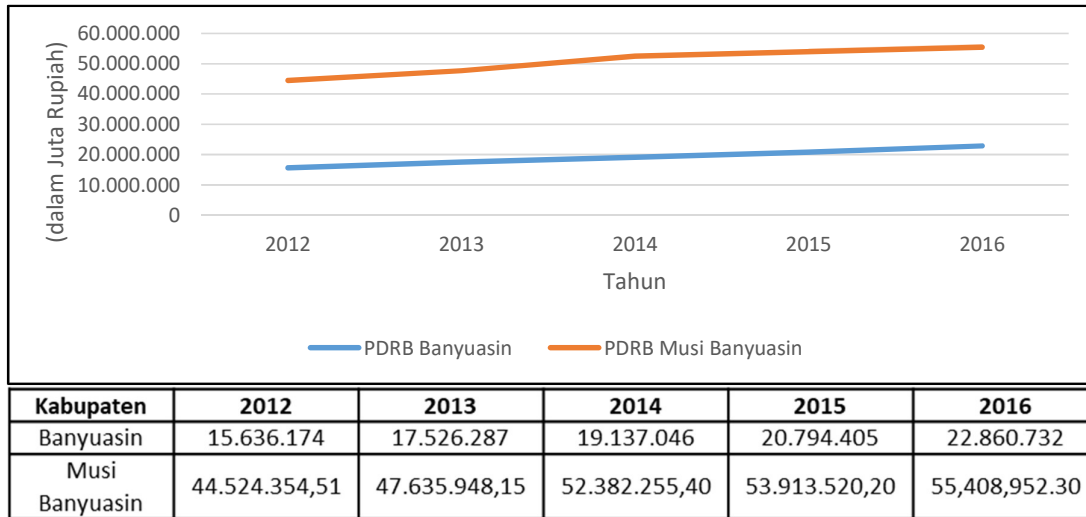
Sumber: Data olahan dari BPS Banyuasin dan Musi Banyuasin (2012-2016)

Jumlah ternak besar yang paling banyak dibudidayakan adalah ternak sapi. Pada tiap tahunnya populasi ternak sapi cenderung meningkat meskipun terlihat fluktuatif. Pada tahun 2012 populasi sapi hanya 29.357 ekor meningkat pada tahun 2016 menjadi 64.672 ekor. Kambing menjadi posisi kedua populasi terbanyak setelah sapi dengan jumlah 44.001 ekor ada tahun 2016. Kambing menjadi pilihan kedua masyarakat lanskap Sendang dalam mengkonsumsi sumber protein hewani setelah sapi.

4.2.6. Perekonomian Wilayah

4.2.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

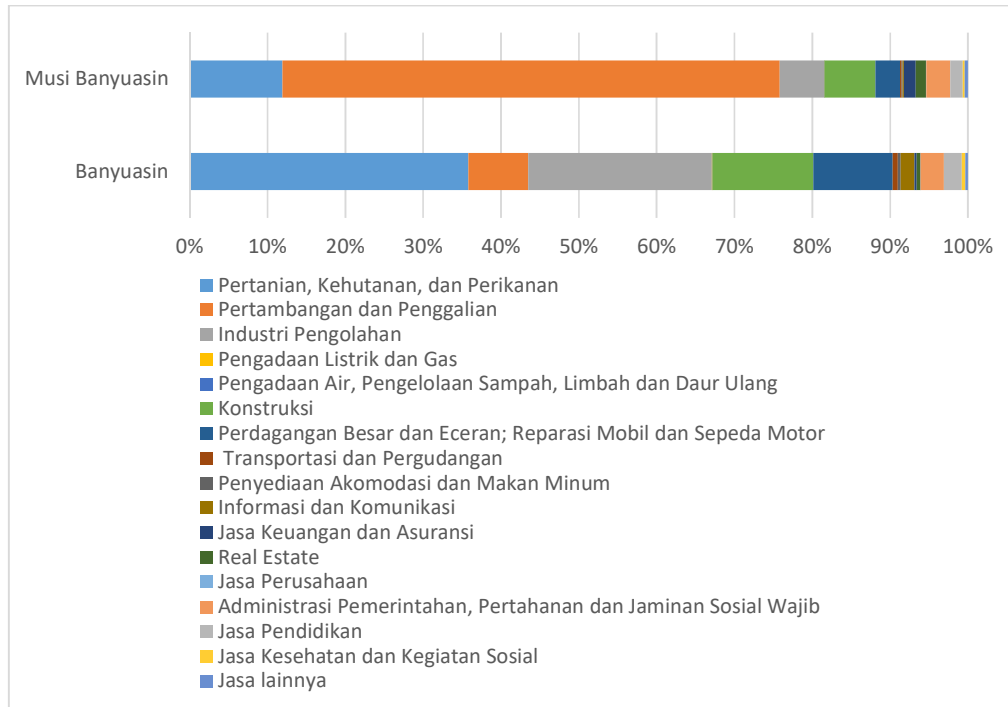
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 hingga 2016 Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



Gambar 4.32 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin
Sumber: Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Dalam Angka (2012-2016)

Kenaikan nilai PDRB Kabupaten Banyuasin terutama disumbang oleh Sektor Usaha Industri Pengolahan serta Sektor Usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan untuk Sektor Usaha Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Usaha konstruksi mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor mampu menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi pada Kabupaten tersebut. Sektor-sektor tersebut mempunyai peran besar terhadap basis perekonomian Kabupaten.



Gambar 4.33 Distribusi PDRB Setiap Sektor Kab. Musi Banyuasin dan Banyuasin (2016)

Sumber: Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin Dalam Angka, BPS 2016

Berdasarkan data gambar di atas menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Banyuasin di dominasi oleh perputaran ekonomi pada sektor agro yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Berbeda halnya dengan Kabupaten Musi Banyuasin yang perekonomiannya di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat dari distribusi PDRB ADH kedua kabupaten menunjukkan bahwa antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin mempunyai karakter perekonomian yang berbeda.

Time series data distribusi PDRB menurut sektor usaha dapat memberikan informasi perekonomian daerah terkait sektor yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten tersebut di setiap tahunnya. Berikut ini tabel distribusi sektor usaha Kabupaten Banyuasin:

Tabel 4.5 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Sektor Usaha Kabupaten Banyuwangi

No	Sektor Usaha	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*	36,39	36,6	34,54	35,26	36,11
2	Pertambangan dan Penggalian	7,94	8,23	8,85	7,12	6,43
3	Industri Pengolahan**	23,24	22,93	24,02	23,92	23,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,09	0,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	13,31	13,19	13,18	12,7	12,31
7	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,7	9,57	9,48	10,94	11,39
8	Transportasi dan Pergudangan	0,62	0,64	0,63	0,62	0,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38	0,41	0,42	0,37	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,67	1,71	1,79	1,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
12	Real Estate	0,51	0,51	0,5	0,44	0,45
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,86	3,11	3,14	2,89
15	Jasa Pendidikan	2,13	2,21	2,35	2,47	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,43	0,45	0,47	0,48
17	Jasa lainnya	0,37	0,34	0,33	0,32	0,31

Keterangan:

- = Meningkatkan * : Tertinggi pertama
 = Menurun **: Tertinggi kedua

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi (2012-2016)

Setiap tahunnya distribusi PDRB ADH Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh sektor Agro yaitu pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Pada posisi kedua diikuti oleh sektor industri pengolahan yang memungkinkan di tahun yang akan datang akan menyaingi sektor agro karena di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 hingga 2016 secara fluktuatif terdapat sektor yang meningkat dan menurun. Tercatat bahwa sektor PDRB yang meningkat meliputi sektor Industri pengolahan, Perdagangan otomotif, Transportasi, Akomodasi Pangan, Informasi Komunikasi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan serta jasa sosial.

Sektor yang menurun meliputi sektor agro, pertambangan, listrik serta gas, konstruksi, real estate, administrasi pemerintahan dan jasa lainnya. Sedangkan pada sektor pengadaan air dan limbah, jasa keuangan dan jasa perusahaan tidak mengalami pergeseran di setiap tahunnya cenderung stabil di presentase yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian menjadi sektor penyokong PDRB, lambat laun akan digantikan oleh sektor industri pengolahan karena sektor agro yang cenderung akan terus turun sedangkan sektor industri pengolahan cenderung selalu meningkat.

Perbedaan karakter perekonomian antara Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin menyebabkan juga berbedanya karakter PDRB masing-masing kabupaten di setiap tahunnya. Berikut ini Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2012 hingga 2016:

Tabel 4.6 Distribusi PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kab. Musi Banyuasin

No	Sektor Usaha	Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	11,82	11,99	11,61	12	12,15
2	Pertambangan dan Penggalian*	68,38	66,54	65,75	61,37	57,6
3	Industri Pengolahan	4,62	4,93	5,15	6,34	7,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
6	Konstruksi	5,66	6,11	6,37	7,02	7,47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,48	2,69	2,84	3,52	4,35
8	Transportasi dan Pergudangan	0,15	0,17	0,18	0,21	0,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
10	Informasi dan Komunikasi	0,13	0,14	0,14	0,16	0,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	1,45	1,49	1,66	1,82
12	Real Estate	0,96	1,11	1,26	1,54	1,78
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	2,71	2,88	3,48	3,91
15	Jasa Pendidikan	1,31	1,4	1,53	1,78	1,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,24	0,24	0,28	0,3
17	Jasa lainnya	0,36	0,4	0,42	0,46	0,49

Keterangan:

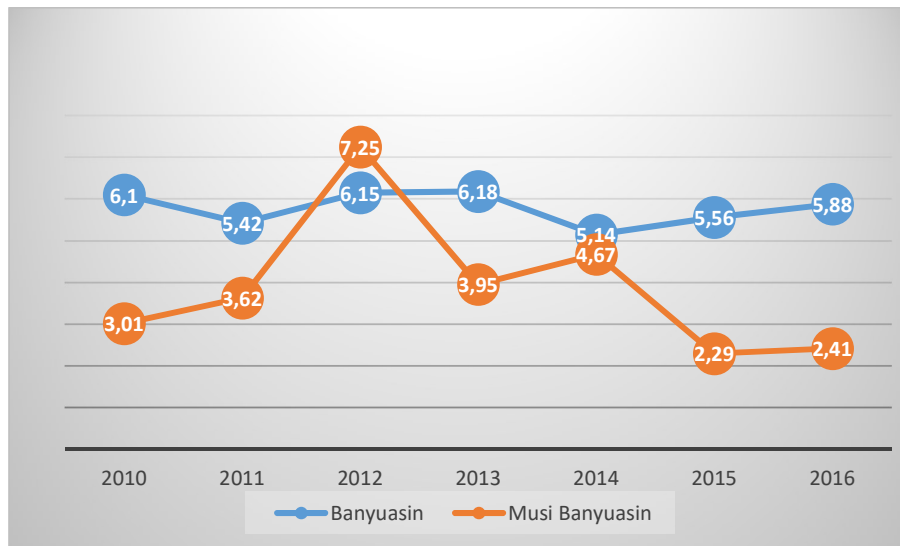
- = Meningkatkan * : Tertinggi pertama
- = Menurun **: Tertinggi kedua

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin (2012-2016)

Karakter Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin di setiap tahunnya mulai tahun 2012 hingga 2016 cenderung meningkat dan didominasi oleh sektor pertambangan, kemudian di posisi kedua jauh di bawah pertambangan adalah sektor pertanian. Meskipun Sektor pertambangan menjadi sektor tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Musi Banyuasin, tapi di setiap tahunnya sektor pertambangan mengalami penurunan. Berbeda dengan sektor yang lainnya yang selalu meningkat di setiap tahunnya. Perbedaan yang jauh antara presentase sektor pertambangan dan sektor agro tidak memungkinkan bagi sektor agro akan menggantikan posisi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah memunculkan proses perubahan kondisi perekonomian daerah tersebut dilihat dalam periode tertentu. Proses pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan kenaikan kapasitas produksi jasa/produk pada sisi nilai ekonomi dalam bentuk kenaikan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Berikut ini gambaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dari tahun 2012 hingga 2016:



Gambar 4.34 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin
Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka 2012-2017

Meskipun PDRB ADH Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin menunjukkan kenaikan nilai, tidak dengan laju pertumbuhan pada kedua kabupaten tersebut. Grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami trend yang fluktuatif tapi cenderung menurun. Hal tersebut menandakan bahwa kedua kabupaten tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang semakin tahun semakin melamban.

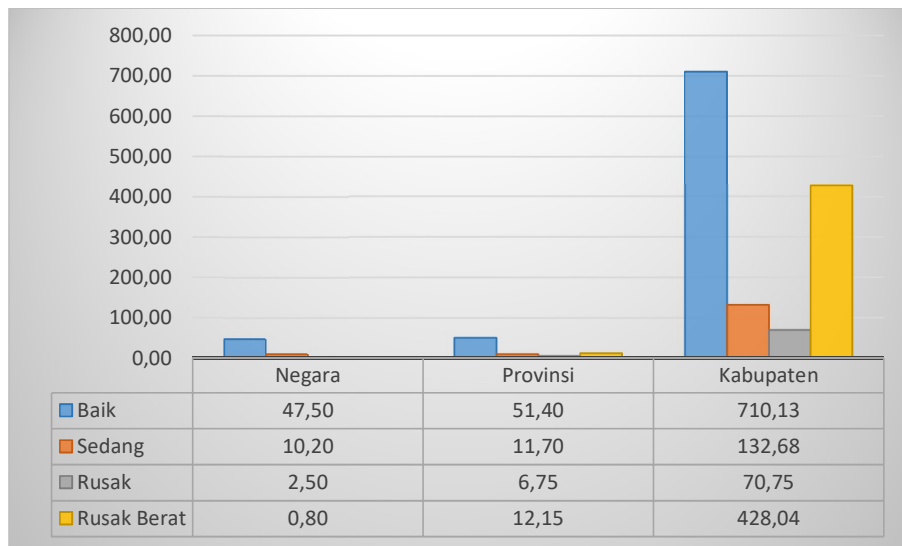
Hal tersebut kemungkinan terjadi karena terjadi penurunan sektor unggulan di masing-masing kabupaten dimana pada Banyuasin, sektor agro yang menjadi sektor unggulan penyumbang nilai PDRB terbesar mengalami penurunan. Sama halnya dengan Kabupaten Musi banyuasin yang juga mengalami penurunan pada sektor unggulan penyumbang terbesar PDRB yaitu sektor pertambangan dan penggalian.

Jika menilik pada data PDRB kedua kabupaten tersebut terlihat nilainya terus meningkat selama 2010-2016, akan tetapi jika disandingkan dengan angka pertumbuhan 2012-2016 akan tampak fluktuasi yang cenderung menurun. Hal ini menunjukkan adanya

kontraksi ekonomi pada tahun-tahun tersebut akibat penurunan vitalitas sektor unggulan seperti yang sudah dijabarkan diparagraf sebelumnya. Melemahnya permintaan dunia terhadap produk karet dan penurunan harga barang tambang seperti batubara dan minyak bumi ditengarai sebagai faktor pemicu perlambatan pertumbuhan di kedua kabupaten ini.

4.2.6.3. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sebuah keharusan yang harus diperhatikan pemerintah dalam memenuhi salah satu tujuan pelayanan publik demi memenuhi salah satu tujuan bernegara yaitu kesejahteraan. Infrastruktur utama dalam menunjang aktivitas produksi sebuah daerah adalah jalan. Semakin layak infrastruktur jalan pada daerah tersebut, maka semakin baik pula mobilitas penduduk sehingga menghasilkan produktivitas yang juga semakin baik. Berikut ini gambaran jalan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin:

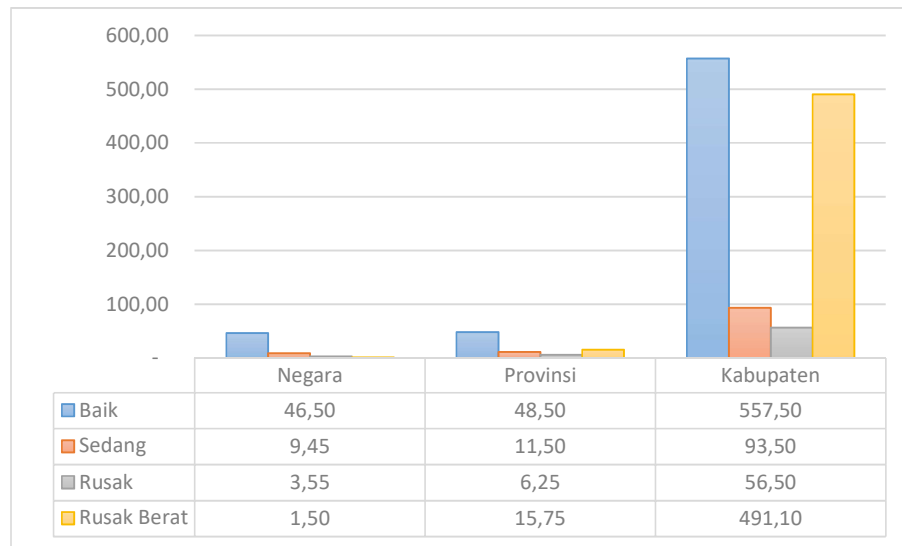


Gambar 4.35 Jalan Menurut Kondisi dan Status Jalan Kab. Banyuasin Tahun 2016

Sumber: BPS Kabupaten Banyuasin 2016

Berdasarkan pada gambar di atas jumlah jalan yang ada di Kabupaten Banyuasin sepanjang 1.484,60 km. Kabupaten Banyuasin mempunyai peran yang besar dalam mengelola jalan kabupaten dengan jumlah 1.341,60 km dengan panjang jalan yang terkondisi baik sepanjang 710,13 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik 809,03 km atau sebesar 54% dari total seluruh jalan yang ada di kabupaten Banyuasin mulai dari jalan negara, provinsi hingga kabupaten. Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin terbilang cukup memprihatinkan, 34,86 % jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat.

Tidak jauh berbeda kondisi jalan di Kabupaten Banyuasin, berikut ini gambaran kondisi jalan Kabupaten Musi Banyuasin:



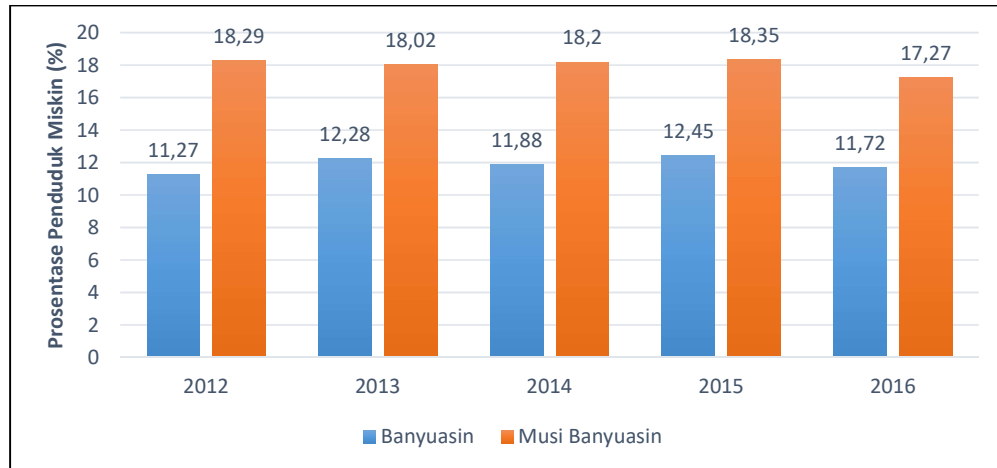
Gambar 4.36 Jalan Menurut Kondisi & Status Jalan Kabupaten Musi Banyuasin 2016

Sumber: BPS Kabupaten Musi Banyuasin 2017

Berdasarkan pada gambar di atas jumlah jalan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 1.341,60 km. Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola jalan kabupaten sepanjang 1.198,60 km dengan jalan dengan kategori baik sepanjang 557,50 km. Jumlah jalan yang masuk dalam kategori baik mulai dari jalan negara, provinsi dan kabupaten sejumlah 652,50 km atau sebesar 49% dari total seluruh jalan yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Infrastruktur di Kabupaten ini tergolong memprihatinkan karena 42,83 % berada dalam kondisi rusak dan rusak berat.

4.2.6.4. Kemiskinan

Kedua kabupaten yang ada masih mempunyai beban terhadap tingkat kemiskinan warganya. Jumlah keluarga miskin di kedua kabupaten ini dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan yang signifikan.



Gambar 4.37 Prosentase Penduduk Miskin di Kab. Banyuasin dan Musi Banyuasin
Sumber: Olahan Data BPS Banyuasin dan Musi Banyuasin (2013-2017)

Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa di kedua kabupaten presentasi penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang nyata selama kurun waktu 5 tahun (2012-2016). Sebagai perbandingan prosentase penduduk miskin pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 adalah 13,2% sedangkan angka nasional 10,86%.

4.2.6.5. Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2015: xii). Penduduk usia kurang 15 tahun meski telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak termasuk angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak semua angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan sehingga menghasilkan angka pengangguran. Berdasarkan data yang ada di dua kabupaten ini tingkat pengangguran cenderung naik dalam kurun waktu 2013-2015.

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kegiatan

Kabupaten Banyuasin				
Jenis Kegiatan Utama		2013	2014	2015
I	Angkatan Kerja	349,292	371,536	381,520
	Bekerja:	326,608	360,524	360,305
	Menganggur:	22,684	11,012	21,215
II	Bukan Angkatan Kerja	201,295	179,051	189,879
	Sekolah	36,394	47,516	56,065
	Mengurus Rumah Tangga	133,683	113,586	117,690
	Lainnya	31,218	17,949	16,124
	Jumlah	349,292	371,536	381,520
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59.32	65.48	66.77
IV	Tingkat Pengangguran	4.12	2.00	5.56
Kabupaten Musi Banyuasin				
Jenis Kegiatan Utama		2013	2014	2015
I	Angkatan Kerja	247,468	278,929	285,123
	Bekerja:	239,585	268,495	269,140
	Menganggur:	7,883	10,434	15,983
II	Bukan Angkatan Kerja	158,490	139,425	141,215
	Sekolah	31,421	37,018	36,864
	Mengurus Rumah Tangga	97,939	92,753	91,596
	Lainnya	29,130	9,654	12,755
	Jumlah	405,958	418,354	426,338
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60.96	66.67	66.88
IV	Tingkat Pengangguran	3.19	3.74	5.61

Sumber: Diolah dari Kabupaten Dalam Angka, BPS (2014-2017)


Pada tahun 2014 terjadi lonjakan serapan tenaga kerja di Kabupaten Musi Banyuasin, dengan penambahan sebesar 28.910. Hal ini diduga karena adanya ekspektasi terhadap kinerja pemerintah sehingga sektor usaha merespon secara positif dengan pembukaan lapangan kerja baru terutama pada sektor primadona yaitu kelapa sawit dan karet.³¹

Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran Kabupaten

	Tahun		
	2013	2014	2015
Banyuasin			
Angka pertumbuhan	6,18	5,14	5,56
Angka pengangguran	22.684	11.012	21.215
Musi Banyuasin			
Angka pertumbuhan	3,95	4,67	2,29
Angka pengangguran	7.883	10.434	15.983

Sumber: Kompilasi Kabupaten Dalam Angka, 2017

³¹ Trianto, Anton, 2017. Elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan.



Jika disandingkan dengan angka pertumbuhan, terdapat anomali di Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2013-2014 terjadi penurunan angka pertumbuhan lebih dari 1% yang seharusnya secara teoritis memicu penurunan serapan angkatan kerja. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, dimana terjadi peningkatan serapan kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran sebesar lebih dari 50%. Hal sebaliknya terjadi pada Kabupaten Musi Banyuasin dimana peningkatan angka pertumbuhan 0,72% dari tahun 2013-2014 tidak berdampak pada naiknya serapan angkatan kerja. Bahkan angka pengangguran meningkat sebesar 32,36% dari tahun sebelumnya.

4.3. Kondisi Biofisik

4.3.1. Kondisi Fisik

Sebagian besar wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki iklim tropis basah. Intensitas curah hujan tahunan rata-rata sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 4.000 mm di daerah pegunungan di bagian barat dan intensitas rendah di pantai timur hingga lebih rendah dari 2.000 mm. Suhu berkisar antara 24,40 - 33,40° C, dengan suhu rata-rata sebesar 27,7° C. Kelembaban udara berkisar antara 60 – 92% dengan rata-rata penyinaran matahari 51%. Kecepatan angin berkisar 3,50 knot atau 6,48 km/jam (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2016).

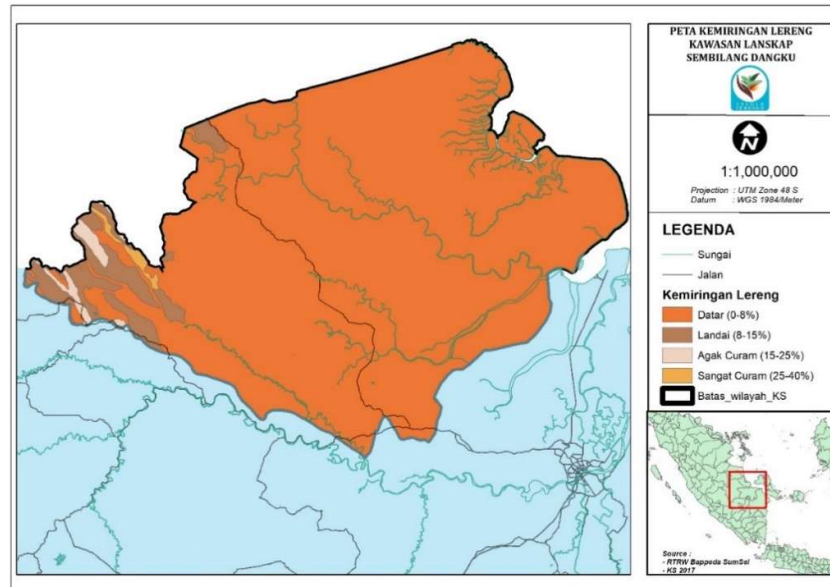
Pada Kabupaten Musi Banyuasin di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut.

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu : Organosol dan Klei Humus di dataran rendah atau rawa-rawa, Alluvial di sepanjang sungai Musi dan Padzolik di daerah berbukitbukit. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada di bagian Timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil.

Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata-rata 26,100 – 27,400 Celcius dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4 % - 85,5 % dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu organosol: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa, Klei Humus: terdapat di dataran rendah/rawa-rawa, Alluvial: terdapat di sepanjang sungai, dan Polzoik: terdapat di daerah berbukit-bukit.

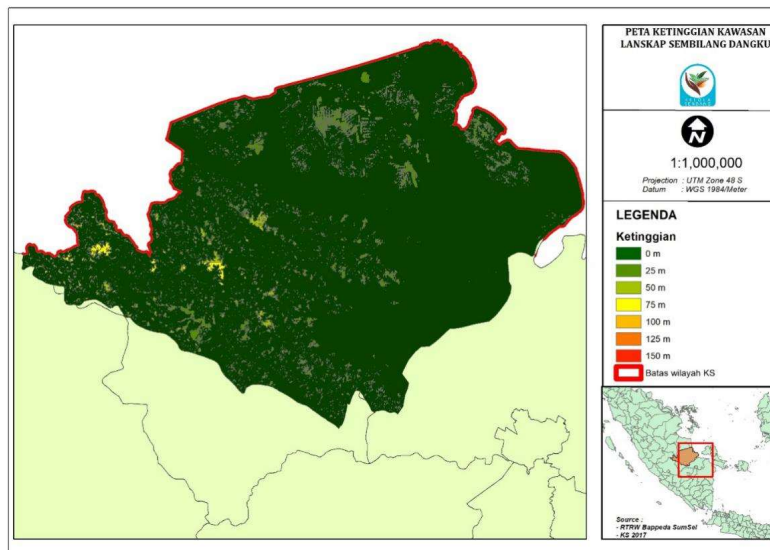
4.3.1.1. Topografi

Secara topografis hampir keseluruhan lanskap ini merupakan daratan yang datar. Kondisi daratan yang landai hingga curam hanya terdapat di bagian barat Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar 4.38 Peta Kemiringan Lereng Lanskap Sembilang Dangku

Sebagian besar daratan di Lanskap Sembilang Dangku berada pada ketinggian 0-25 m di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan besarnya luas lahan yang terpengaruh pasang surut dan pembentukan rawa-rawa.

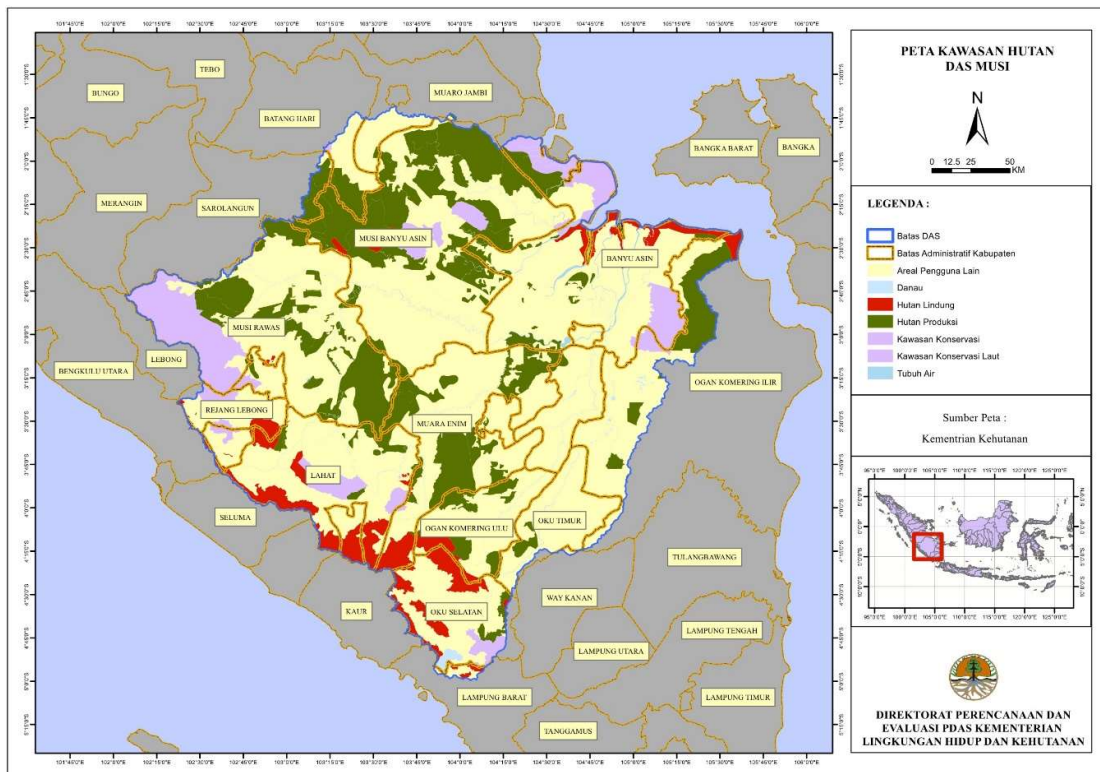


Gambar 4.39 Peta Ketinggian Kawasan Lanskap Sembilang Dangku

4.3.1.2. Daerah Aliran Sungai

Lanskap Sembilang Dangku berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi. DAS Musi merupakan wilayah kerja BPDASHL Musi dan termasuk 15 DAS prioritas yang menjadi target RPJMN Tahun 2015 - 2019 berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 tahun 2015. Sungai Musi merupakan salah satu sungai terbesar di Indonesia. Daerah aliran Sungai (DAS) Musi terletak diantara 1°40'-5° Lintang Selatan (LS) dan 102°7'-108° Bujur Timur (BT).

DAS Musi dapat dibagi menjadi 14 sub DAS yang membentang pada 4 (empat) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung dengan total luas wilayahnya sebesar 5.348.641 ha. Cakupan wilayah dominan DAS Musi berada di Provinsi Sumatera Selatan (95%). Sedangkan Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Lampung masing-masing adalah 4%; 0,6%; dan 0,4%.

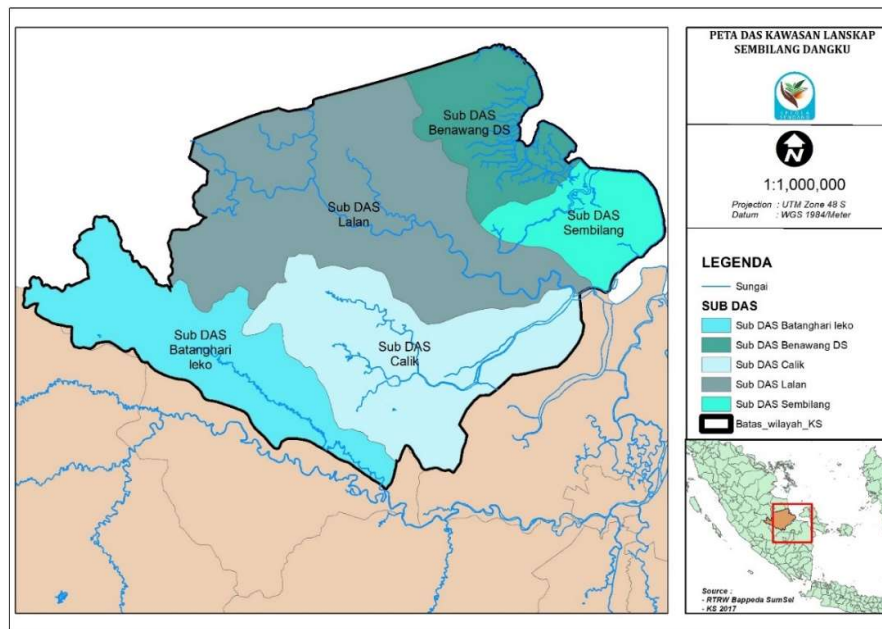


Gambar 4.40 Peta Kawasan Hutan DAS Musi

Sungai ini memiliki panjang sekitar 750 km dengan fluktuasi air mencapai 6-7 meter setiap tahunnya. Potensi sumber daya perikanan di Sungai Musi tergolong besar, terutama di daerah rawa banjirannya yang terletak di daerah tengah DAS Musi. Proses banjir di DAS Musi disebabkan oleh 2 variabel yaitu berupa daerah rawan kebanjiran dan daerah rawan pasokan air banjir maka penanganan bencana banjir dilakukan secara

integratif hulu dan hilir. Di daerah hulu dilakukan dengan konservasi tanah dan air, penggunaan vegetasi permanen pada sistem lahan dengan keterlerangan >25% (perbukitan dan pegunungan), melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Di daerah hilir dilakukan kegiatan mitigasi berupa peningkatan kapasitas saluran drainase, pembuatan tanggul-tanggul dan tidak melakukan pengurugan terhadap daerah alamiah tampungan air³².

Lanskap Sembilang Dangku terletak pada 5 Sub DAS. Kelima Sub Das tersebut adalah: 1) Sub DAS Benawang; 2) Sub DAS Sembilang; 3) Sub DAS Lalan; 4) Sub DAS Calik.dan 5) Sub DAS Batanghari Leko.



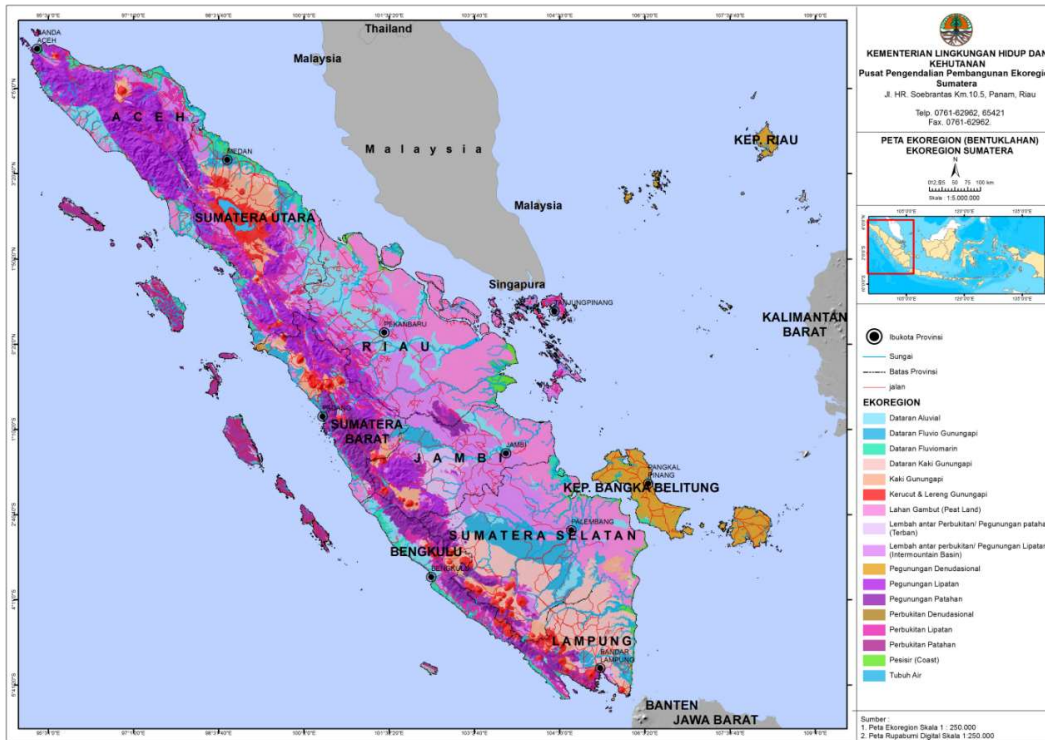
Gambar 4.41 Peta DAS pada lanskap Sembilang Dangku

4.3.1.3. Ekoregion

Menurut Peta Ekoregion Sumatera yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2013, di dalam Lanskap Sembilang Dangku terdapat lima jenis satuan ekoregion bentang lahan. Satuan ekoregion tersebut adalah dataran fluviomarin, dataran aluvial, lahan gambut, lembah antar perbukitan, dan pesisir.³³

³² Pramono, I. B., & Putra, P. B. (2017). Tipologi Daerah Aliran Sungai untuk Mitigasi Bencana Banjir di Daerah Aliran Sungai Musi. *Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, 1(2), 143-165.

³³ KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION SUMATERA. *Deskripsi Peta Ekoregion Sumatera Skala 1 : 250.000*




Gambar 4.42 Peta Ekoregion Sumatera

Sumber: KLHK 2013

Satuan ekoregion bentang lahan dataran gambut menempati area di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sungai Gelang dan Kecamatan Lalan di Kabupaten Musi Banyuasin serta Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Pulau Rimau. Karakteristik bentang lahan ini ditandai dengan topografi berupa dataran, morfologi atau relief datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, hingga berombak (3-8%). Asal proses utama bentang lahan dataran gambut adalah aktivitas organik, yaitu hasil pembusukan sisa aktivitas vegetasi lahan basah, seperti rawa-rawa pada dataran rendah (*low land*), yang kemudian membentuk lapisan gambut yang relatif tebal dengan penyebaran luas di dataran rendah bagian timur Sumatera.

Ekoregion Dataran Gambut rentan atau berpotensi terhadap kerawanan lingkungan berupa bahaya kebakaran dan kualitas sumberdaya air dan tanah yang rendah, karena sifat kemasaman yang sangat tinggi (pH sangat rendah, mencapai <4), atau kandungan sulfat (SO₄⁼) yang tinggi akibat proses reduksi bahan-bahan organik yang menghasilkan lapisan pirit.

Cakupan satuan ekoregion bentang lahan dataran aluvial menempati area di sebagian wilayah Kecamatan Bayung Lencir. Karakteristik bentang lahan pada satuan Ekoregion Dataran Aluvial, dicirikan dengan morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter. Dataran ini terbentuk dari proses utama aliran sungai (*fluvial*) yang membawa material bahan-bahan aluvium dari berbagai



sumber di daerah hulu (*hinterland*) dan diendapkan di bagian bawah (*low land*) dengan struktur berlapis. Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai.

Permasalahan sumberdaya alam non-hayati dan kerawanan lingkungan secara umum pada satuan ekoregion dataran aluvial adalah adanya potensi menciptakan angin puting beliung apabila kondisi tekanan udara tidak stabil dan tidak merata. Hal ini disebabkan kondisi morfologi yang berupa dataran yang sangat luas. Perkembangan wilayah dapat memicu masalah pemanfaatan lahan dan konflik penataan ruang berupa konversi lahan sawah menjadi lahan-lahan permukiman, pengembangan wilayah perkotaan, konflik sosial, dan pencemaran air, tanah, dan udara, yang bergantung kepada tingkat perkembangan wilayahnya.

Satuan ekoregion bentang lahan dataran fluvio-marin menempati area di sebagian wilayah Banyuasin II. Morfologi dataran pada bentang lahan ini memiliki relief datar dan terkadang agak cekung, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <25 meter. Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (*marine*) pada masa lalu yang membentuk endapan lempung marin di bagian bawah, dan sekarang tertutup oleh endapan sungai (*fluvial*) yang membentuk lapisan aluvial di bagian atas. Material atau batuan utama penyusun berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa campuran lempung dan pasir fluvial, dan endapan lempung marin (biasanya berwarna keabu-abuan) yang membentuk lapisan di bagian bawah.

Permasalahan Sumberdaya Alam Non-hayati dan Kerawanan Lingkungan secara umum pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-marin adalah meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar ketika musim penghujan, yang berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir. Kondisi morfologinya yang berupa dataran relatif agak cekung dan berada pada bagian hilir aliran sungai dan merupakan daerah transisi dari fluvial ke wilayah pesisir, maka kecepatan aliran sungai sedikit terhambat. Material penyusun yang didominasi oleh endapan lempung yang mempunyai sifat kembang kerut tanah yang tinggi, yang menyebabkan bangunan infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser. Air tanah di bentang lahan ini berasa payau hingga asin, dengan nilai daya hantar listrik tinggi.

Satuan ekoregion bentang lahan dataran pesisir dengan pantai berlumpur memiliki morfologi dataran dengan relief datar, kemiringan lereng 0-3%, beda tinggi rerata <15 meter. Terbentuk dari proses utama aktivitas gelombang (*marine*) yang berasosiasi dengan aliran sungai (*fluvial*) yang membawa material sedimen terlarut tinggi, diendapkan di sepanjang kanan-kiri muara membentuk rata-rata lumpur (*mudflat*) atau rawa-rawa payau (*salt marsh*) dan delta. Material atau batuan utama penyusunnya berupa bahan-bahan aluvium hasil pengendapan aliran sungai di bagian atas berupa lumpur (*mud*), yaitu campuran antara lempung dan pasir halus.

Permasalahan Sumberdaya Alam Non-hayati dan Kerawanan Lingkungan secara umum pada satuan ekoregion ini adalah meluapnya aliran sungai pada saat debit aliran besar

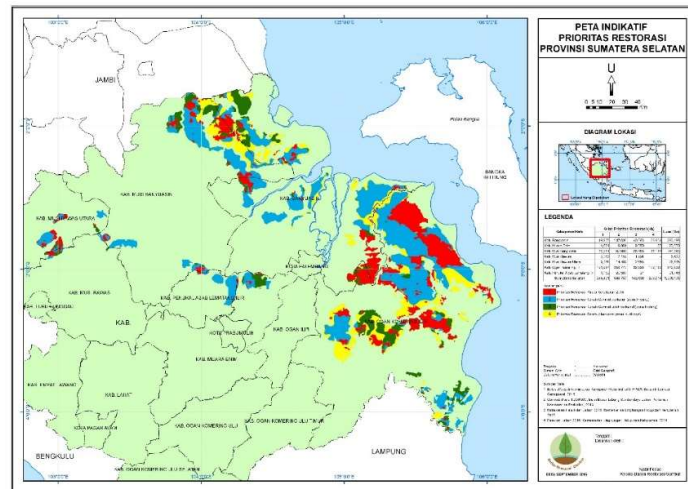
ketika musim penghujan, yang berpotensi terhadap proses penggenangan dan banjir, drainase buruk, lingkungan kumuh, pencemaran, dan kesehatan masyarakat buruk. Permasalahan lain adalah infrastruktur jalan aspal dan pondasi bangunan lainnya cepat rusak, patah, atau menggeser, berpotensi untuk dijumpainya jebakan-jebakan air laut, yang berpengaruh terhadap airtanah berasa payau hingga asin, dengan nilai daya hantar listrik tinggi pula.

Permasalahan sosial ekonomi yang sering timbul di bantang lahan ini adalah konflik sosial berupa status kepemilikan lahan, tata ruang wilayah, dan tumpang-tindih kebijakan di antara instansi terkait akibat perkembangan rataan pasang surut dan delta yang membentuk lahan-lahan baru yang berpotensi terhadap intensitas perubahan garis pantai. Terkait pendapatan masyarakat, pengendapan material sedimen yang intensif menyebabkan pendangkalan muara (estuari), laguna, dan perairan laut dangkal, yang berpotensi menurunnya produktivitas penangkapan perikanan laut. Masalah lainnya adalah konversi hutan mangrove untuk lahan tambak (*illegal logging*), pertumbuhan permukiman yang tidak teratur, dan meningkatnya biaya konservasi lingkungan.


4.3.1.4. Kawasan Hidrologis Gambut

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017, terdapat 32 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Sumsel. Target restorasi gambut di Provinsi Sumsel dalam kurun waktu 2016-2020 diharapkan mencapai angka 848.325 Hektare yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Sebagian besar target restorasi tersebut berada dalam kawasan budidaya berizin, selebihnya berada dikawasan hutan lindung dan kawasan budidaya tidak berizin.

Badan Restorasi Gambut (BRG) memprioritaskan kegiatan restorasi gambut di 8 KHG yang terletak di 3 Kabupaten yakni Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar 4.43 Peta Indikatif Prioritas Restorasi Provinsi Sumatera Selatan



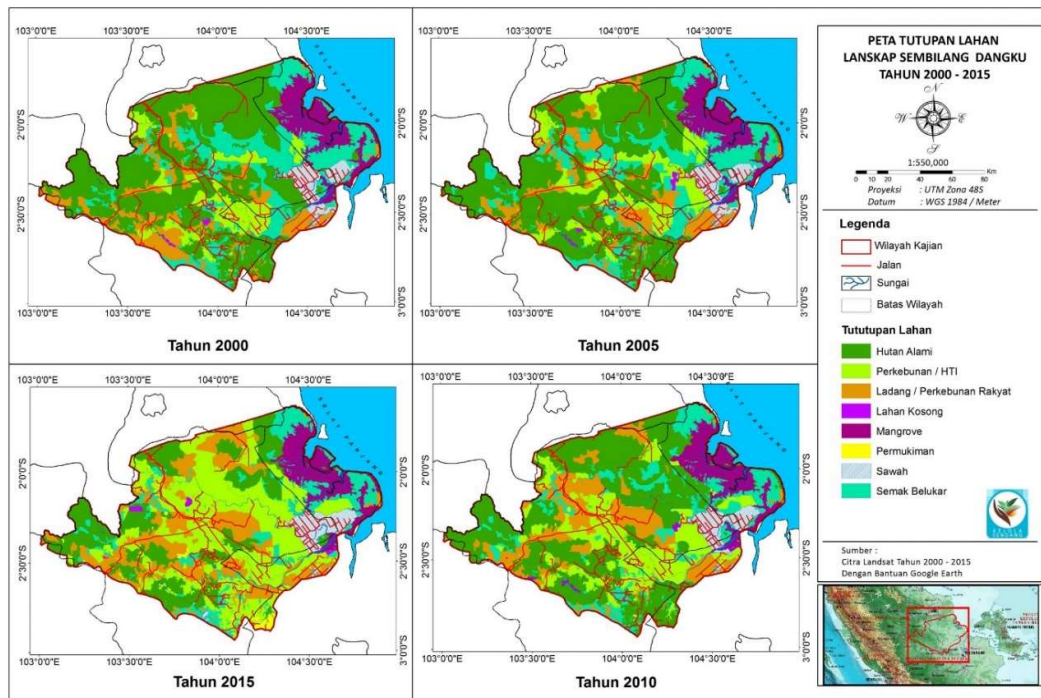
Penetapan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) prioritas di Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan kriteria perlindungan gambut. Kriteria tersebut *pertama* berdasarkan ketebalan tiga meter atau lebih. *Kedua*, kawasan plasma nutfah spesifik atau endemik. *Ketiga*, adanya spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Keempat*, perlindungan cagar budaya. *Kelima*, ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi.

Delapan KHG prioritas di Sumsel adalah: *Pertama*, KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Banyuasin. Tepatnya berada di Kecamatan Bayunglincir dan Banyuasin II. *Kedua*, KHG Sungai Sugihan-Sungai Saleh yang berada di Kabupaten Banyuasin. Tepatnya di Kecamatan Banyuasin I. *Ketiga*, KHG Sungai Cawang-Sungai Air Lanang di Muba. Tepatnya Kecamatan Bayunglincir. *Keempat*, KHG Sungai Medak-Sungai Cawang di Kecamatan Bayunglincir Kabupaten Muba.

Prioritas KHG berikutnya atau *Kelima*, adalah KHG Sungai Sembilang-Sungai Cawang di Kecamatan Bayunglincir dan Muaratelang di Kabupaten Muba dan Banyuasin. *Keenam*, KHG Sungai Sibumbang-Sungai Batok di Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (OKI) OKI, yang meliputi Kecamatan Rantau Alai, Air Sugihan, Cengal, Kayuagung, Lempuing, Pampangan, Pedamaran, dan Tulungselapan. *Ketujuh*, KHG Sungai Lumpur-Sungai Jeruju di Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sedangkan yang *Kedelapan*, KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur di Kecamatan Pampangan di Kabupaten OKI.

4.3.2. Tutupan Lahan

Lanskap Sembilang Dangku mengalami perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir luasan hutan alam mengalami penurunan yang sangat drastis. Dilain pihak tutupan lahan berupa perkebunan dan hutan tanaman mengalami peningkatan. Tutupan lahan lainnya seperti ladang dan juga sawah mengalami peningkatan meskipun dalam laju yang jauh lebih lambat. Secara umum perubahan tutupan lahan di Lanskap Sendang menggambarkan kebutuhan yang tinggi akan areal perkebunan/hutan tanaman dan juga kebutuhan lahan budidaya masyarakat.



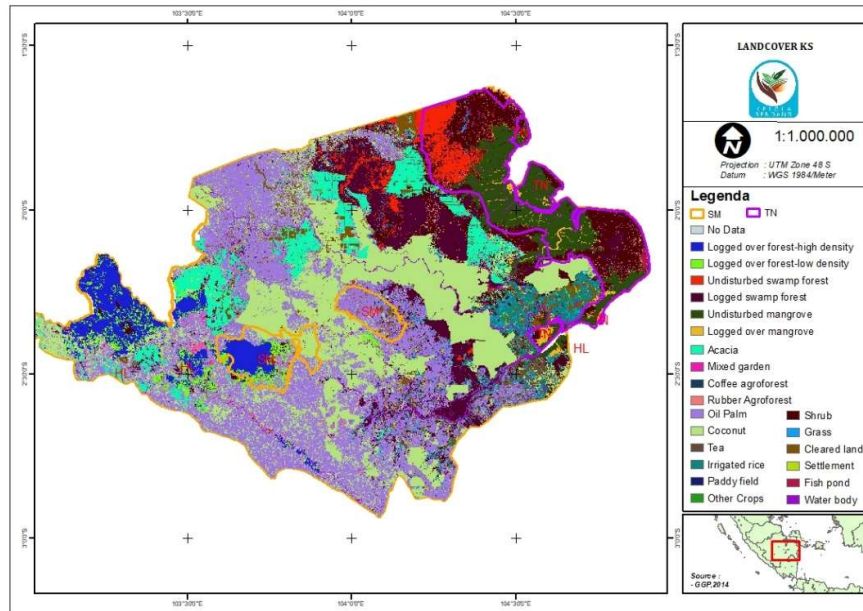
Gambar 4.44 Peta perubahan tutupan lahan Lanskap Sembilang Dangku (2000-2015)

Sumber: Hasil analisis citra lansat

Kondisi tutupan lahan tahun 2015 telah mengalami banyak perubahan dibandingkan 15 tahun yang lalu. Paling tidak beberapa kecenderungan yang terjadi pada tutupan lahan pada lanskap Sembilang Dangku yaitu:

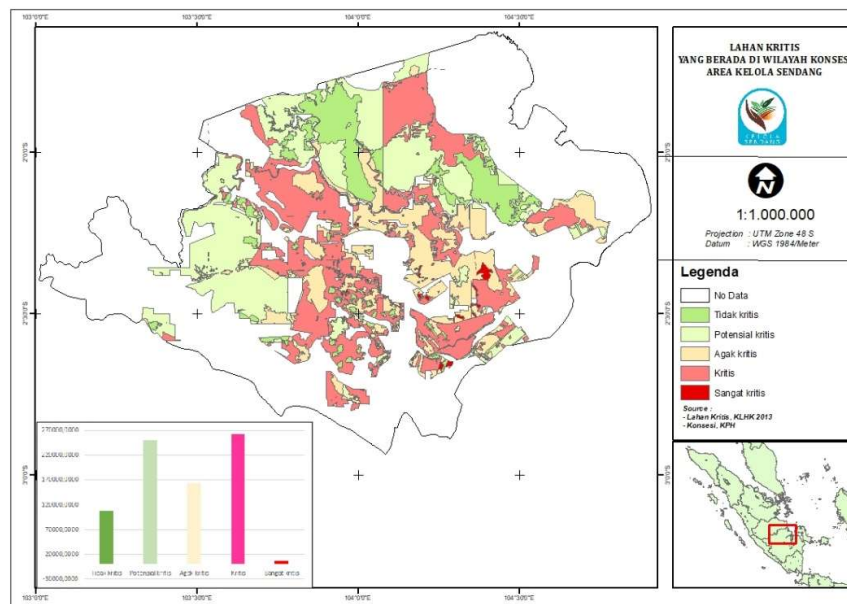
- Berkurangnya ekosistem hutan alam tropis
- Berkurangnya ekosistem rawa gambut
- Berkembangnya areal perkebunan dan hutan tanaman
- Berkembangnya areal persawahan meskipun dalam laju yang rendah

Terkait tutupan lahan, dokumen GGP Sumsel menyajikan Peta Tutupan Lahan Tahun 2014 yang komposisinya hampir sama dengan peta Tahun 2015 di atas. Di kedua peta tersebut areal lanskap didominasi perkebunan. Peta dari dokumen GGP Sumsel memperlihatkan bahwa 48,63% areal lanskap pada Tahun 2014 adalah perkebunan, baik perkebunan kelapa maupun kelapa sawit.

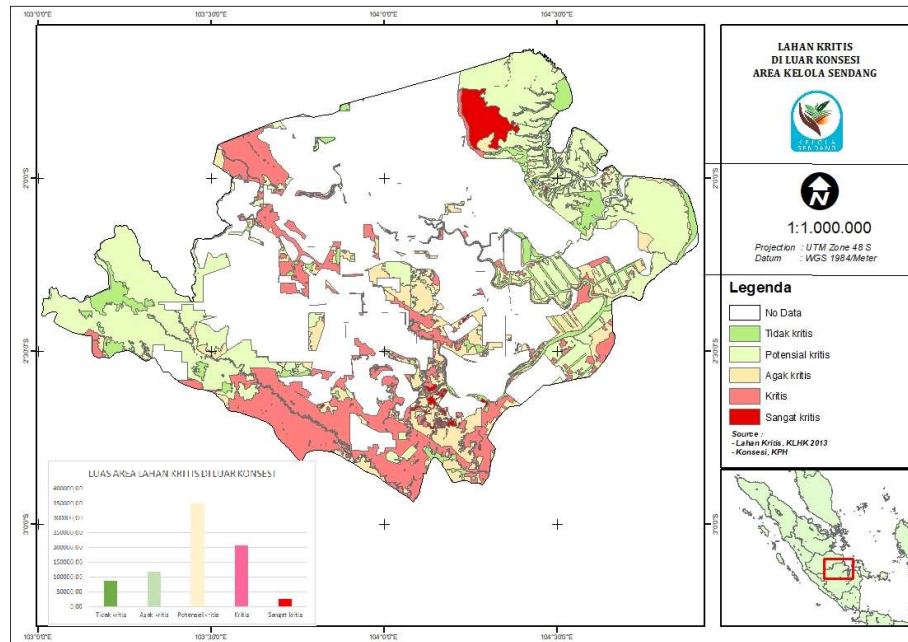


Gambar 4.45 Peta Tutupan Lahan Area KELOLA Sendang 2014
 Sumber Peta: Dokumen GGP Sumsel

Kondisi tutupan lahan di kawasan hutan berdasarkan Peta Lahan Kritis KLHK Tahun 2013 dan Peta Konsesi Hutan dari KPH menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di area konsesi berstatus kritis dan potensial kritis. Sedangkan untuk di luar konsesi, lahan yang sangat kritis sebagian besar berada di kawasan Taman Nasional Sembilang. Kondisi kekritisan lahan ini kemungkinan besar terjadi koreksi yang signifikan akibat peristiwa kebakaran hutan di Sumatera Selatan tahun 2015.

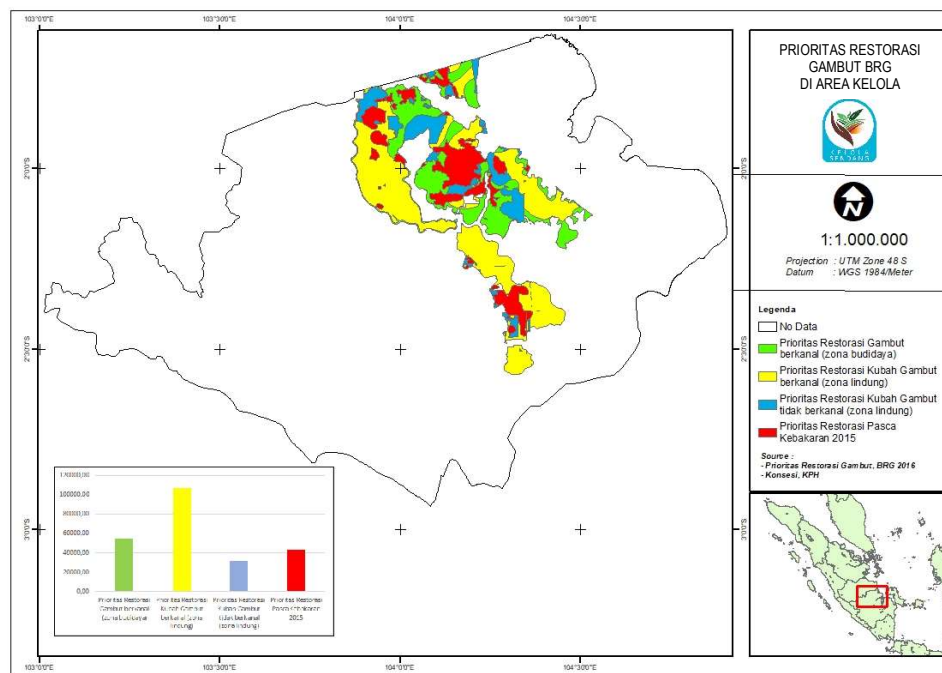


Gambar 4.46. Lahan Kritis di Dalam Konsesi di Area Lanskap Sendang



Gambar 4.47 Lahan Kritis di Luar Konsesi di Area Lanskap Sendang

Peristiwa kebakaran hutan Tahun 2015 menimbulkan keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya adalah Badang Restorasi Gambut (BRG) yang menetapkan sebagian area Lanskap Sembilang Dangku sebagai prioritas kegiatan restorasi gambut BRG.



Gambar 4.48 Prioritas Restorasi Gambut BRG di Area Lanskap Sendang



4.3.3. Keanekaragaman Hayati pada Lanskap Sembilang Dangku

4.3.3.1. Tipe-tipe ekosistem alami


Berdasarkan tipe ekosistem alami di Sumatera Selatan yang terdapat dalam dokumen Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Lanskap Sembilang Dangku memiliki berbagai tipe ekosistem alami. Tipe ekosistem alami tersebut terdiri dari ekosistem marin, ekosistem perairan tawar, ekosistem semi teresterial dan ekosistem terestrial. Ekosistem marin terdiri dari ekosistem laut dan terumbu karang. Sedangkan ekosistem perairan terdiri dari ekosistem sungai dan riparian. Ekosistem semi teresterial yang terdapat di lanskap Sembilang Dangku adalah ekosistem mangrove. Untuk ekosistem terestrial, terdapat ekosistem dataran rendah berupa hutan pantai, hutan dipterokarpa, rawa lebak, rawa padang surut dan rawa gambut.

Ekosistem sungai di lanskap Sembilang dangku termasuk dalam zona tengah dan zona hilir dari Sungai Musi. Zona tengah (*middle stream*) mempunyai kecepatan arus lambat. Arus yang lambat menyebabkan pada daerah ini air tidak banyak berganti, sehingga menyebabkan kualitas air di zona tengah sungai lebih jelek daripada zona hulu. Zona tengah umumnya banyak terdapat anak-anak sungai yang bermuara di sungai utama, sehingga sifat ekologisnya juga sangat kompleks. Perairan zona hilir sungai sangat dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut, sehingga sifat fisika, biologi dan kimianya sedikit agak berbeda dengan perairan sungai di zona hulu dan zona tengah. Zona hilir sungai biasanya subur karena di daerah ini terdapat banyak jebakan nutrisi akibat pertemuan antara air laut dengan air tawar. Selain berbagai karakteristik itu, zona hilir Sungai Musi, merupakan kawasan industri.³⁴

Ekosistem riparian adalah ekosistem yang terbentuk di kanan kiri sungai. Ekosistem ini sangat penting karena mempunyai berbagai fungsi ekologis, diantaranya : (a) sebagai habitat dan koridor flora fauna fungsinya akan sangat terlihat pada saat musim kemarau, (b) mencegah aliran permukaan masuk ke dalam sungai sehingga mengurangi total suspended solid (TSS) yang masuk ke perairan.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak diantara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan. Mangrove sendiri merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan yang menyediakan berbagai jenis produk dan pelayanan lingkungan seperti proteksi terhadap abrasi, pengendali intrusi air laut, mengurangi tiupan angin kencang, mengurangi tinggi dan kecepatan arus gelombang, rekreasi, dan pembersih air dari polutan. Hutan mangrove di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di sepanjang pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Ekosistem mangrove di Taman Nasional Sembilang merupakan ekosistem mangrove terluas di pantai timur Sumatera dan di kawasan barat Indonesia.

³⁴ Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 2017.



Ekosistem hutan mangrove di kawasan Sembilang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat sekitar 17 spesies mangrove sejati atau sekitar 43% dari seluruh spesies mangrove di Indonesia, 6 spesies mangrove ikutan, 8 spesies tumbuhan hutan rawa, 5 spesies tumbuhan air dan 6 spesies tumbuhan paku. Spesies mangrove sejati yang ditemukan antara lain *Sonneratia alba*, *Avicennia marina*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, dan *Xylocarpus granatum*.³⁵


Di daerah pesisir biasanya berkembang hutan mangrove dan hutan pantai. Hutan mangrove tumbuh pada habitat berlumpur sedangkan hutan pantai tumbuh pada habitat berpasir, kerikil dan berbatu. Ekosistem hutan pantai dijumpai pada daerah kering tepi pantai dengan kondisi tanah berpasir atau berbatu dan berada pada garis pasang tertinggi. Pada ekosistem hutan ini tumbuh beberapa spesies pohon seperti *Barringtonia speciosa*, *Terminalia catappa*, *Calophyllum inophyllum*, *Hibiscus tiliaceus*, *Thespesia populnea*, *Casuarina equisetifolia*, dan *Pisonia grandis*. Hutan pantai di lanskap Sembilang Dangku terdapat di Taman Nasional Sembilang.

Ekosistem hutan dataran rendah yang masih berupa tutupan hutan alam sebagian besar berada di kawasan hutan produksi Sungai Kapas-Meranti dan kawasan Suaka Margasatwa Dangku. Sebagian kecil dari kawasan hutan produksi S. Kapas dan kawasan hutan produksi Rawas Lakitan termasuk dalam kategori berbukit elevasi rendah. Eksistensi ekosistem hutan dataran rendah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dikatakan sebagai ekosistem hutan alam yang tersisa (*remnant forest*). Berdasarkan hasil kajian risiko kehilangan biodiversitas, maka ekosistem hutan alam yang tersisa di kawasan hutan produksi S. Kapas, S. Meranti, S. Rawas Lakitan, dan kawasan Suaka Margasatwa Dangku ini sudah termasuk dalam kategori “*critically endangered eco-floristic sectors*” (Laumonier, et al., 2010 dalam Dokumen Sehati Sumsel 2017-2021).

Tipologi lahan ekosistem rawa terbesar di Sumatera Selatan, yaitu lahan rawa yang meliputi rawa lebak dan rawa pasang surut. Sedangkan tipologi lahan rawa berdasarkan jenis dan kondisi tanah, terdapat dua jenis tanah yaitu tanah mineral (terdiri atas tanah *aluvial* dan *glei humus*) dan tanah gambut (*peat soils*). Pada saat ini jasa ekosistem rawa lebak telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti perikanan, sumber air baku, peternakan, pertanian, transportasi.

Rawa lebak dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu rawa lebak banjir, rawa lebak tadah hujan dan rawa lebak campuran. Rawa lebak banjir merupakan salah satu tipe ekosistem yang produktif bagi perikanan air tawar. Airnya bersumber dari limpahan anak Sungai Komering (Batanghari Air Padang), air bersifat agak masam (pH 5,5 – 6). Fluktuasi volume airnya tinggi (sangat bervariasi sepanjang tahun) karena dipengaruhi oleh musim. Ciri khas yang lain dari rawa lebak banjir adalah, hamparannya luas, perairannya dangkal, sinar matahari dapat menembus sampai lapisan dasar perairan,

³⁵ Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 2017.



banyak terdapat vegetasi air, daun-daun yang jatuh ke perairan merupakan sumber nutrisi dan pakan alami.³⁶

Tipe rawa lebak banjiran yang ditemui termasuk rawa lebak kumpai, rawa banjiran hutan rawang, sungai mati (*oxbow lake*) dan lebung-lebung (cekungan atau alur-alur air di daerah rawa). Untuk DAS Musi, tipe rawa lebak kumpai dan lebung banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan tipe rawa banjiran hutan rawang dan sungai mati (*Oxbow lake*) banyak terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Rawa lebak tadah hujan merupakan cekungan, sumber air utama dari air hujan, air berwarna coklat hitam, air bersifat masam (pH 4,5), jenis ikan didominasi oleh ikan hitam (ikan rawa), vegetasi rumputan dan tanaman bawah, hanya terdapat pemanfaatan perikanan tangkap, musim kemarau bagian rawa yang kering ditanami semangka dan padang gembala kerbau, di sekitar rawa terdapat pemukiman, kebun karet dan hutan rawa sekunder (hutan gelam). Dari ekosistem rawa, pada kelompok tanaman pangan ditemukan spesies tanaman padi lokal spesifik lahan rawa lebak.³⁷

Di Sumatera Selatan Lahan rawa pasang surut lebih banyak tersebar di sisi timur wilayah provinsi Sumatera Selatan (wilayahnya mencakup dua kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin), umumnya merupakan daerah payau yang dipengaruhi pasang surut air laut. Vegetasinya kebanyakan berupa tumbuhan *Palmae* dan hutan kayu rawa (bakau). Selain vegetasi tersebut, saat ini sebagian besar kawasan rawa pasang surut tersebut sudah dibuka menjadi lokasi persawahan untuk pertanaman padi dan jagung serta tanaman sayur-sayuran oleh masyarakat setempat.

Ekosistem perairan rawa Sumatera Selatan termasuk di Lanskap Sembilang Dangku, umumnya bertipe gambut. Hal ini dicirikan dengan perairan yang berarus lambat atau tidak berarus, warna air kehitaman, pH dan oksigen rendah dan banyak mengandung logam alkali. Rawa gambut di Sumatera Selatan ditandai dengan tingkat keasaman yang ekstrem rendah, anaerobik dan kondisi miskin unsur hara. Asal nama rawa gambut karena substrat mereka adalah gambut terdiri dari tanaman detritus yang secara bertahap melepaskan tanin dan asam organik dalam air, kondisi kurang buffer menghasilkan nilai pH-nya rendah. Selain itu, perairan di rawa gambut memiliki kandungan ambient oksigen rendah, konsekuensi lain dari pembusukan tanaman.

Gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh adanya akumulasi bahan organik yang berlangsung dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik yang terdapat di lantai hutan lahan basah. Secara alami, tanah gambut terdapat pada lapisan

³⁶ Muthmainnah, D., Dahlan, Z., Susanto, R. H., Gaffar, A. K., & Priadi, D. P. (2012). Pola pengelolaan rawa lebak berbasis keterpaduan ekologi-ekonomi-sosial-budaya untuk pemanfaatan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 4(2), 59-67.

³⁷ Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 2017.

tanah paling atas. Di bawahnya terdapat lapisan tanah aluvial pada kedalaman yang bervariasi. Disebut sebagai lahan gambut apabila ketebalan gambut lebih dari 50 cm.

Rawa gambut merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dan memainkan peranan penting dalam perekonomian negara, diantaranya berupa ketersediaan berbagai produk hutan berupa kayu maupun non-kayu. Disamping itu, lahan gambut juga memberikan berbagai jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diantaranya berupa pasokan air, pengendalian banjir serta berbagai manfaat lainnya. Hutan rawa gambut juga berperan sangat penting sebagai penyimpan dan penyerap karbon, penyimpan sumberdaya genetik (plasma nutfah), serta keanekaragaman hayati lainnya.³⁸

4.3.3.2. Beberapa Species Penting


Dalam penyusunan Dokumen Sehati Sumsel 2017-2021 keanekaragaman hayati satwa yang telah berhasil dikumpulkan terdiri dari 65 spesies amfibi, 71 spesies reptilia, 81 spesies mamalia (11 spesies primata; 70 spesies non-primata), 334 spesies burung/aves, dan 133 spesies *arthropoda* (Lampiran 11), dan biota perairan yang terdiri dari 270 spesies ikan, 75 spesies *zooplankton*, 66 spesies *perifiton*, 79 spesies *zoobenthos*. Jumlah keanekaragaman satwaliar Provinsi Sumatera Selatan dalam daftar tersebut hanya sebagian dari seluruh populasi satwaliar di Provinsi Sumatera Selatan yang sampai saat ini masih belum dapat diidentifikasi jumlahnya.

Tabel 4.9 Jenis-jenis primata dan status konservasinya di Sumatera Selatan

No.	Nama Jenis	Nama Lokal	Status Konservasi IUCN
1	<i>Nycticebus coucang</i>	kukang	Vulnerable
2	<i>Cephalopachus bancanus</i>	tarsius, tangkasi, krabuku, mentilin, pelilean	Vulnerable (sebagai <i>Tarsius bancanus</i>)
3	<i>Macaca nemestrina</i>	beruk	Vulnerable
4	<i>Macaca fascicularis</i>	monyet ekor panjang	Least Concern
5	<i>Presbytis melalophos</i>	simpai, surili	Near Threatened (sebagai <i>P. melalophos melalophos</i>)
6	<i>Presbytis sumatrana</i>	simpai, cingkek	Endangered (sebagai <i>P. melalophos sumatranus</i>)
7	<i>Presbytis mitrata</i>	simpai	Endangered (sebagai <i>P. melalophos mitrata</i>)
8	<i>Presbytis femoralis</i>	cingkek, simpai	Near Threatened
9	<i>Trachypithecus cristatus</i>	lutung kelabu	Near Threatened
10	<i>Hylobates agilis</i>	owa, ungko	Endangered
11	<i>Symphalangus syndactylus</i>	siamang	Endangered

Sumber: Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 2017

³⁸ Ibid



Di kawasan Lanskap Sembilang Dangku terdapat beberapa spesies mamalia non primata yang diidentifikasi terdapat di beberapa lokasi. Diantaranya adalah di Hutan Harapan yang saat ini merupakan kawasan hutan produksi untuk tujuan restorasi ekosistem. Lokasi ini merupakan habitat bagi dua spesies prioritas konservasi Sumatera Selatan, yaitu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) serta 58 spesies mamalia non-primata lainnya.


Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera juga ditemukan di kawasan TN Sembilang, bersama dengan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa Sambar (*Rusa unicolor*), dan 16 spesies mamalia non-primata lainnya. Di SM Dangku, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) menjadi prioritas utama konservasi (*key species*), karena termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang dan *red list* IUCN dengan status *critically endangered*. Selain itu terdapat beberapa satwa lainnya seperti gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus scrofa*) dan 15 spesies mamalia non-primata lainnya.

Burung Indonesia telah mengidentifikasi 40 Daerah Penting bagi Burung dan Keanekaragaman Hayati (DPB) di Wilayah Sumatera dan 7 DPB di wilayah Sumatera Selatan. Wilayah DPB tersebut adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang, Tanjung Selokan, Tanjung Koyan, Dataran Banjir Ogan Komering, Gunung Dempo dan Meranti.

Kawasan Sembilang, merupakan habitat burung air dan termasuk salah satu tujuan dari jalur terbang burung migran. Hutan mangrove yang lebat, sungai-sungai yang berkeluk-luk dan dataran lumpur yang luas tempat persinggahan dan mencari makan bagi burung-burung migran maupun burung penetap. Kunjungan ke hutan mangrove dan pengamatan satwa dapat dilakukan dengan menyusuri sungai-sungai di TN Sembilang. Kawasan ini menjadi tempat berbiak Bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), Bangau storm (*Ciconia stormi*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Elang wallace (*Spizaetus nanus*), Mentok rimba (*Cairina scutulata*), Gajahan timur (*Numenius madagascariensis*), Trinil nordmann (*Tringa guttifer*), Trinil-lumpur Asia (*Limnodromus semipalmatus*) (Gambar 4.42), Merpati-hutan perak (*Columba argentina*), Punai besar (*Treron capellei*), dan Raja-udang kalung-biru (*Alcedo euryzona*).

Kawasan Meranti, khususnya Hutan Harapan, merupakan rumah bagi 307 jenis burung dengan 9 jenis burung terancam punah, 2 jenis endemik, 66 jenis dilindungi peraturan perundangan RI dan 29 jenis migran. Salah satu jenis genting adalah Bangau storm (*Ciconia stormi*) dan rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) yang termasuk dalam apendiks I (CITES). Keanekaragaman jenis lainnya adalah 64 jenis mamalia, 71 jenis reptil dan 123 jenis ikan.

Jenis burung pemigran yang melintasi dan singgah ke Sumatera sangat tinggi termasuk salah satu tujuan adalah Taman Nasional Sembilang. Termasuk jenis-jenis burung



pemangsa seperti elang-alap shikra (*Accipiter badius*), jenis burung pantai seperti gajah besar (*Numenius arquata*), biru laut ekor hitam (*Limosa limosa*), trinil bedaran (*Xenus cinereus*), jenis burung teresterial seperti sikatan pantat kuning (*Ficedula zanthopygia*) serta banyak berbagai jenis burung lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan tercatat 114.000 burung migran singgah di Taman Nasional Sembilang.

Sumatera Selatan adalah region dengan biodiversitas ikan yang tinggi, paling tidak terdapat 233 spesies ikan terkelompok dalam 38 familia hanya dari Sungai Musi beserta anak-anak sungainya. Jenis ikan pada ekosistem rawa/rawa banjiran terdiri atau dua kelompok, yaitu kelompok ikan hitam (*black fish*) dan kelompok ikan putih (*white fish*). Contoh kelompok ikan hitam, yaitu betok (*Anabas testudineus*), gabus (*Channa striata*), sepat siam (*Trichogaster pectoralis*) dan tembakang (*Helostoma temmenckii*). Contoh kelompok ikan putih, yaitu lais (*Cryptopterus spp.*), baung (*Mystus nemurus*), patin (*Pangasius spp.*), jelawat (*Leprobarbus hoeveni*) dan lampam (*Barbodes schwanefeldii*). Ikan yang hidup di perairan rawa terutama dari kelompok ikan hitam pada umumnya mempunyai alat pernapasan tambahan sehingga dapat hidup di perairan yang oksigennya rendah dan asam.

Ekosistem perairan tawar di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi dan Sungai Lematang, juga menjadi habitat bagi salah satu jenis ikan pari air tawar raksasa (*Urogymnus polylepis*). Jenis ikan pari air tawar yang terkategori Endangered (IUCN 2013) ini memiliki karakteristik ukuran tubuh yang sangat besar, bisa mencapai 600 kg dan diameter badan mencapai 2 m. Sebanyak delapan laporan tertangkapnya ikan pari air tawar ini di perairan Sumatera Selatan antara 2011-2016, empat di Sungai Musi, tiga di Sungai Lematang dan satu di Sungai Bungin.³⁹

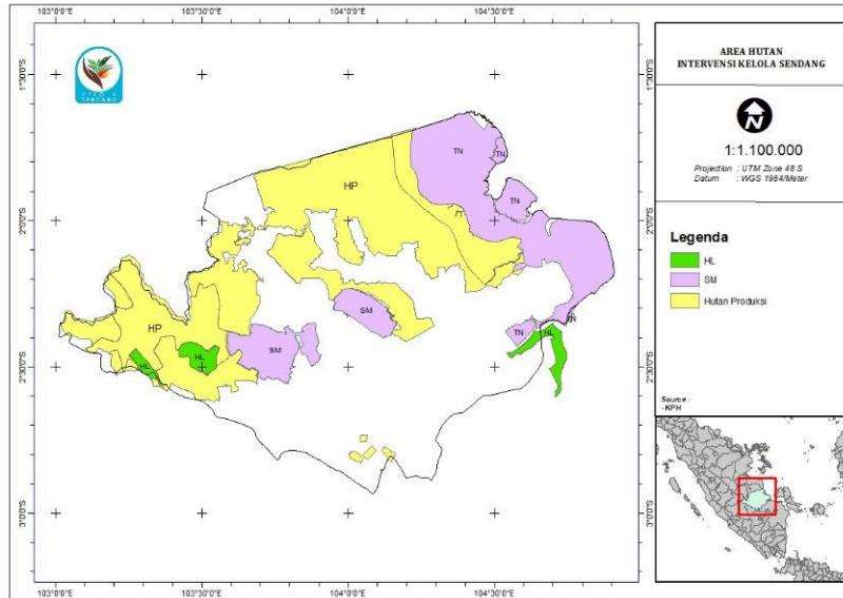
4.4. Peruntukan Lahan Kawasan Hutan dan Perkebunan

Lanskap Sembilng Dangku didominasi oleh kawasan hutan dan perkebunan. Kawasan hutan melingkupi 63,62 % dari total luas area lanskap, terdiri dari hutan produksi (29,63%), Hutan Produksi Konversi (11,60%), Hutan Produksi Terbatas (5,99%), Hutan Suaka Alam (16,40%). Kawasan Perkebunan mencakup luasan 20,26% dari total area lanskap.

4.4.1. Kawasan Hutan

Kawasan hutan di lanskap Sembilang Dangku terbagi menjadi beberapa fungsi kawasan, yaitu hutan lindung, hutan produksi dan juga kawasan konservasi. Kawasan hutan ini berada dalam 2 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yaitu: KPHP Meranti dan KPHP Lalan Mangsang Mendis, 1 taman nasional, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, dan 2 Suaka Marga Satwa, yaitu SM Dangku dan SM Bentayan.

³⁹ Dokumen Sehati Sumsel (2017-2021), Dinas Kehutanan Sumatera Selatan 2017.




Gambar 4.49 Peta Kawasan Hutan di Lanskap Sembilang Danguk

Kawasan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang berada di Lanskap Sembilang adalah Seksi Pengelolaan Wilayah (SPW) II Sembilang dengan luas 202.896 Ha. Sedangkan untuk KPH Produksi, KPHP Lalan Mendis memiliki luasan 265.953 Ha dan KPHP Meranti luasannya 244.162 Ha. Untuk kawasan berupa suaka marga satwa, SM Danguk memiliki luasan 47.996,45 Ha (SK Menteri KLHK Np. 866/2014) dan SM Bentayan dengan luas 23.220 Ha.

4.4.1.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi di Lanskap Sembilang Danguk saat ini berada dalam wilayah KPHP Meranti dan KPHP Lalan Mendis. KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis (LMM) terdiri dari 2 (dua) kelompok hutan yaitu Hutan Produksi (HP) Lalan dan Hutan Produksi Mangsang Mendis. Letak HP Lalan secara geografis berada pada 01°42' - 02°25' LS dan 103°40' - 104°28' BT, sedangkan HP Mangsang Mendis berada pada 02°09' - 02°25' LS 103°51' - 104°20' BT. Berdasarkan rancang bangun dan hasil tata batas yang dilakukan oleh BPKH Wilayah II Palembang tahun 2002 serta arahan pencadangan KPHP/KPHL Propinsi Sumatera Selatan dari Badan Planologi Departemen Kehutanan, luas KPHP Unit III LMM ± 279.094 ha, yang merupakan gabungan dari 2 kawasan hutan produksi, yaitu HP Lalan seluas ± 210.434 ha dan HP Mangsang Mendis seluas ± 68.660 ha. Menurut data yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009, bahwa luas HP Lalan Mangsang Mendis adalah 377.340 ha yang terdiri dari HP Lalan 206.734 ha dan luas HP Mangsang Mendis adalah 170.570 ha.⁴⁰

⁴⁰ RPJHP KPHP Unit III Lalan Mangsang Mendis Tahun 2014 - 2023



KPHP Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin telah ditetapkan wilayah kelolanya melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.689/Menhut-VII/2012. Sedangkan Organisasi pengelolaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi KPH Kabupaten Musi Banyuasin dan selanjutnya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit IV Meranti disahkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor SK: 7216/Menhut-II/Reg.1/1/2014 pada tanggal 03 Desember 2014.⁴¹

4.4.1.2. Kawasan Hutan Lindung

Terdapat 3 unit hutan lindung di Lanskap Sembilang Dangku. Dua diantaranya berada di wilayah KPHP Meranti di Kabupaten Musi Banyuasin dan satu hutan lindung berada di KPHL Unit I Banyuasin.

4.4.1.3. Kawasan Konservasi

Terdapat 3 kawasan konservasi dalam lanskap Sembilang Dangku, yaitu: Taman Nasional Sembilang, Suaka Margasatwa Bentayan dan Suaka Margasatwa Dangku. Taman Nasional Sembilang berada pada wilayah Kabupaten Banyuasin yang didominasi oleh ekosistem mangrove dan hutan rawa dataran rendah. Suaka Margasatwa Dangku berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Suaka Margasatwa Bentayan berada di wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin.


Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang

Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang merupakan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan penggabungan dari UPT Taman Nasional Berbak di Provinsi Jambi dan UPT Taman Nasional Sembilang di Provinsi Sumatera Selatan. Penggabungan ini berdasarkan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 menjadi UPT Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Dalam UPT ini kawasan Taman Nasional Sembilang menjadi SPTN Wilayah II/ Sunsang/ Sungai Sembilang yang merupakan bagian dari Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Tahun 1994, Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan Hutan Suaka Alam Sembilang dengan luas 205.750 Ha. Tahun 1996/1997, dilakukan penilaian dengan hasil bahwa kawasan Hutan Suaka Alam Sembilang memenuhi kriteria sebagai kawasan pelestarian dalam bentuk taman nasional. Selanjutnya pada Tanggal 19 Maret 2003, ditetapkan sebagai Taman Nasional Sembilang dengan luas 202.896,31 Ha melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 95/Kpts-II/2003.

Taman Nasional Sembilang merupakan kawasan mangrove terluas di Indonesia bagian barat yang relatif utuh dengan keragaman jenis mangrove yang tinggi. Kawasan Sembilang juga merupakan perwakilan hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan riparian (tepi sungai) di Propinsi Sumatera Selatan. Tumbuhan yang ada di daratan

⁴¹ RPJHPd KPHP Meranti 2017



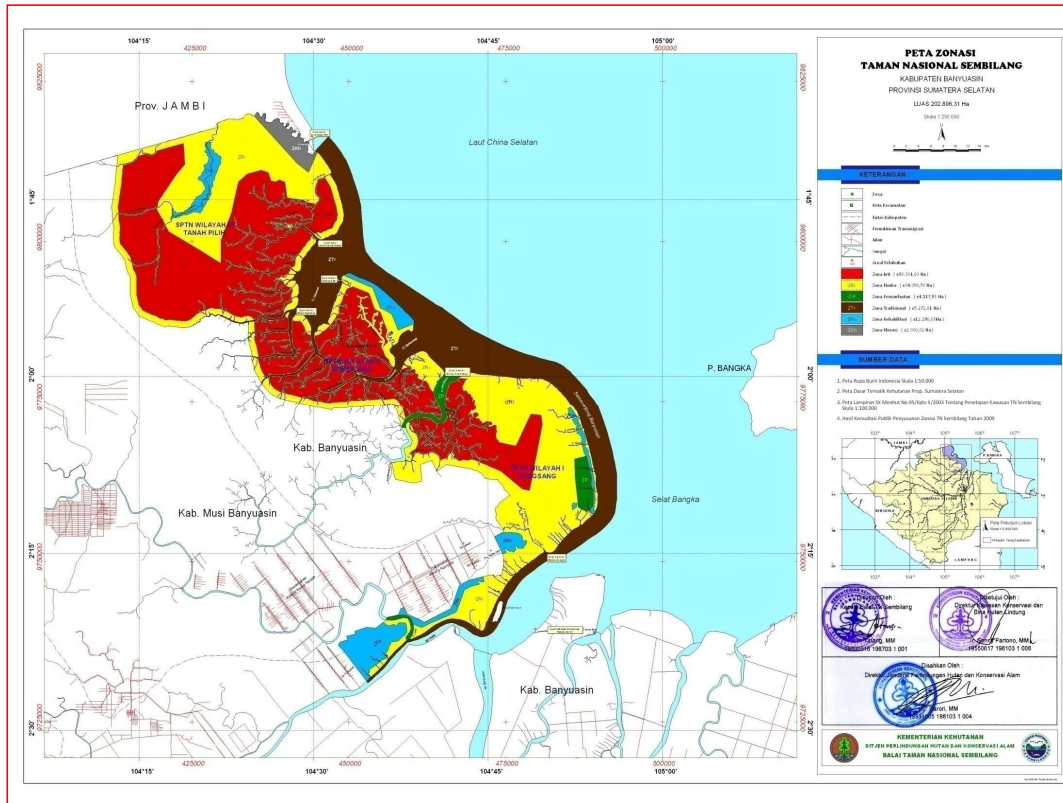
dan perairan dicirikan dengan adanya paku gajah (*Acrostichum aureum*), nipah (*Nypa fruticans*), cemara laut (*Casuarina equisetifolia*), pandan (*Pandanus tectorius*), waru laut (*Hibiscus tiliaceus*), nibung (*Oncosperma tigillaria*), jelutung (*Dyera costulata*), menggeris (*Koompassia excelsa*), gelam tikus (*Syzygium inophylla*), *Rhizophora sp.*, *Sonneratia alba*, dan *Bruguiera gimnorrhiza*.

Kawasan Sembilang merupakan habitat harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), tapir (*Tapirus indicus*), kucing mas (*Catopuma temminckii temminckii*), rusa sambar (*Cervus unicolor equinus*), lumba-lumba air tawar (*Orcaella brevirostris*), siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*), buaya (*Crocodylus porosus*), biawak (*Varanus salvator*), labi-labi besar/penyu air tawar (*Chitra indica*), ikan sembilang (*Plotusus canius*), blekok asia (*Limnodromus semipalmatus*), trinil tutul (*Pseudototanus guttifer*), undan putih (*Pelecanus onocrotalus*), bluwok putih (*Mycteria cinerea*), bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), dara laut sayap putih (*Chlidonias leucoptera*), dan lain-lain.

Kawasan Sembilang terletak di pesisir timur provinsi Sumatera Selatan yang secara astronomi berada antara 104°11' - 104°57' BT dan 01°38' - 02°28' LS sedangkan secara geografis berbatasan dengan : di sebelah Utara dengan Sungai Benu dan batas Provinsi Jambi - di sebelah Timur dengan Selat Bangka, Sungai Banyuasin – di sebelah Selatan dengan Sungai Banyuasin, Sungai Air Calik, dan pemukiman transmigrasi Karang Agung Ilir - di sebelah Barat dengan Hutan Produksi, HTI PT. Sumber Hijau Permai, Perkebunan Sawit (PT. Raja Palma, PT. Citra Indo Niaga) dan APL Kab. Banyuasin. Secara administratif pemerintahan Kawasan Sembilang terletak di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Tujuan pengelolaan Taman Nasional Sembilang yang dirumuskan dalam RPJPTN Sembilang 2015-2028 adalah “Mengukuhkan model pengelolaan lahan basah yang mampu menyelenggarakan fungsi konservasi, sedemikian rupa, sehingga berpengaruh nyata terhadap fungsi sistem penyangga kehidupan dan penopang sistem sosial, ekonomi dan budaya pada tingkat komunitas dan wilayah”. Pengelolaan dilakukan dengan membagi kawasan menjadi beberapa zona. Zona tersebut adalah Zona Inti (+83.361,69 Ha), Zona Rimba (+94.956,59 Ha), Zona Pemanfaatan (+4.117,83 Ha), Zona Tradisional (+5.272,61 Ha), Zona Rehabilitasi (+12.285,67 Ha), dan Zona Khusus (+2.900,92 Ha).⁴²

⁴² Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Sembilang Periode 2015-2024 (RPJPTN Sembilang 2015-2024)



Gambar 4.50 Peta Zonasi Taman Nasional Sembilang
 Sumber: RPJP TN Sembilang Periode 2015-2024

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Sembilang. Permasalahan tersebut adalah perambahan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah, pengambilan biota perairan dengan pukat harimau (*trawl*), ncaman punahnya material genetik spesies flora (misalnya jenis nibung) akibat pengambilan secara terus menerus di dalam kawasan tanpa adanya upaya konservasi jenis (budidaya), kebakaran hutan yang diindikasikan akibat aktifitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Sembilang serta adanya pemegang IUPHHK-HT di sekitar kawasan Sembilang yang belum memiliki ikatan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang.

Terdapat dua kawasan pemukiman yang berada di dalam wilayah pengelolaan SPTN Wilayah II Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang, yaitu Desa Tanah Pilih dan Dusun Sei Sembilang Desa Sungsang IV. Kedua pemukiman ini berada di lokasi yang minim akses. Baik terkait akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik maupun transportasi.

Fasilitas pendidikan formal yang ada di Dusun Sembilang adalah satu unit Sekolah Dasar dan 1 unit PAUD. Pembangunan sekolah tingkat SMP tidak dimungkinkan karena batasan-batasan dari pengelola taman nasional. Angka putus sekolah di dusun ini cukup

tinggi. Sekolah tingkat SMP terdekat terletak di Desa Sungsang IV yang berjarak 1,5 jam dari Dusun Sembilang.

Air bersih di Dusun Sei Sembilang didapat dari pengumpulan air hujan, sumur bor dan air galon. Air dari sumur bor masih bersifat payau sehingga tidak dipergunakan untuk air minum.



Gambar 4.51 Warga Dusun Sei Sembilang Mengambil Air dari Sumur Bor

Terkait sanitasi, selain fasilitas MCK yang sangat terbatas, terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah padat. Sampah menumpuk diberbagai tempat baik di sekitar tempat tinggal maupun di tempat terbuka.

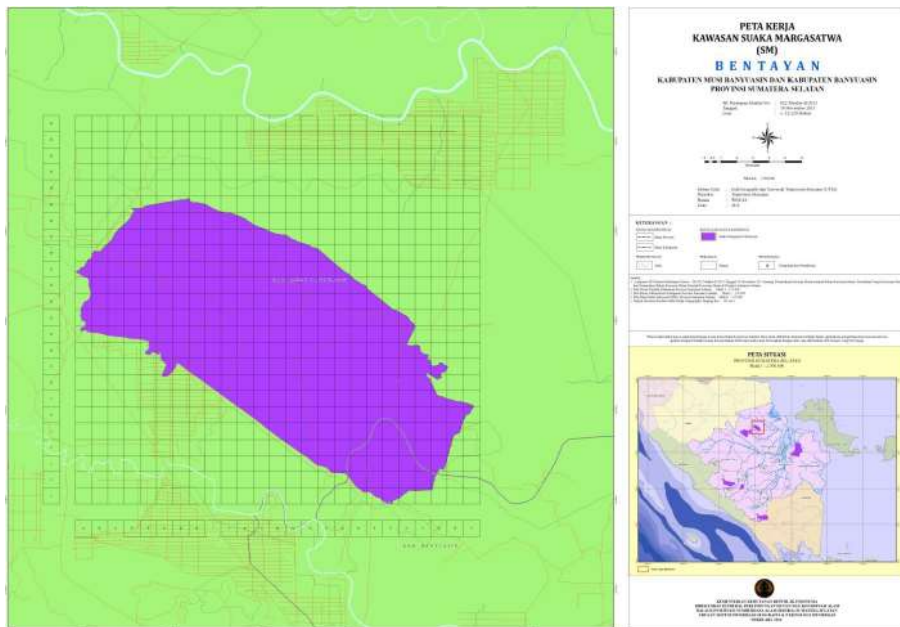


Gambar 4.52 Tumpukan Sampah di Dusun Sei Sembilang

Suaka Margasatwa Bentayan

Suaka Margasatwa (SM) Bentayan adalah sebuah kawasan konservasi yang terletak berdekatan dengan SM Dangku, yang secara geografis berada pada posisi 103° 38 - 104° 4 Bujur Timur dan 2° 04 - 2° 30 Lintang Selatan. SM Bentayan ditunjuk sebagai suaka margasatwa sejak tahun 2001 berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan 76/Kpts-II/2001 dengan luas wilayah +23.220 Ha. Secara administratif pemerintahan, SM Bentayan terletak di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. SM Bentayan termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah yang didominasi flora jenis famili Dipterocarpaceae antara lain meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung, durian, dan terentang. Selain itu terdapat beberapa jenis lainnya seperti laban (*Vitex pubescens*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*), manggeris (*Kompasea sp.*), merbau (*Instia binua*), tembesu (*Fagraea fragrans*), dan beberapa jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*).

Beberapa satwa dilindungi yang ada di SM Bentayan antara lain beruang madu (*Helarctos malayanus*), rusa (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), buaya (*Crocodylus spp.*), trenggiling (*Manis javanicus*), landak (*Proicidhra biujri*), serta berbagai jenis burung seperti raja udang dan bubut.



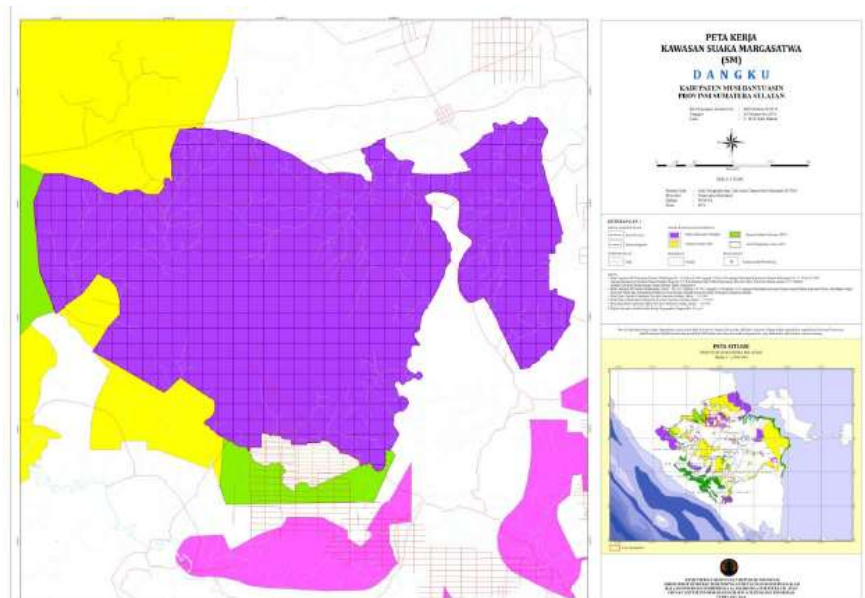
Gambar 4.53 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan

Suaka Margasatwa Bentayan hampir keseluruhannya telah mengalami perombakan. Kondisi didalam SM Bentayan sekarang suah berupa semak belukar, kebun kelapa sawit dan kebun karet masyarakat. Didalam kawasan ini terdapat 3 dusun (Belido 1, Belido 2, Belido 3) lengkap dengan sarana prasarana, seperti Sekolah Dasar, SMP, masjid, pura,

tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan kantor kepala dusun serta balai pertemuan. Dusun Belido 1 dan Belido 2 masuk wilayah Desa Simpang Tungkal, sedangkan Dusun Belido 3 masuk wilayah Desa Suka Damai. Terdapat sekitar 1643 jiwa dan 382 KK yang bermukim di 3 dusun ini⁴³.

Suaka Margasatwa Dangku


Suaka Margasatwa (SM) Dangku adalah kawasan konservasi yang terletak di bagian tengah selatan Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak pada posisi 103^o 38' - 104^o 4' Bujur Timur dan 2^o 04' - 2^o 30' Lintang Selatan. SM Dangku ditetapkan sebagai suaka margasatwa berdasarkan SK. 866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Jo. SK 454/Menhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 dengan luas 47.996,45 ha. Secara administratif, SM Dangku terletak di Kabupaten Musi Banyuasin.



Gambar 4.54 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Dangku

SM Dangku memiliki tipe ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis flora yang didominasi Famili Dipterocarpaceae antara lain meranti (*Shorea spp.*), pulai (*Alstonia spp.*), jelutung (*Dyera spp.*), durian (*Durio sp.*), dan terentang. Selain itu terdapat flora jenis-jenis lainnya seperti manggaris (*Kompasea sp.*), tembesu (*Fagraea fagrans*), merbau (*Instia binua*), medang (*Litsea sp.*), merawan (*Hopea mangarawan*),

⁴³ Didi Tahyudin, Jurnal Mimbar, FKIP Universitas Sriwijaya, vol. 30 No.2 (Desember, 2014), Potensi Konflik dan Pola Penguasaan Kawasan Suaka Margasatwa Bentayan di Sumatera Selatan



balam, dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti rotan (*Calamus sp.*), resak, pandan, dan semak belukar.

Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) menjadi sasaran utama konservasi (key spesies) SM Dangku karena termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang dan red list IUCN dengan status critically endangered. Selain itu terdapat beberapa satwa lainnya seperti gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), tapir (*Tapirus indicus*), rusa sambar (*Rusa unicolor*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), landak (*Hystrix brachyura*), babi hutan (*Sus scrofa*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), buaya (*Crocodylus spp.*), dan beberapa satwa burung dilindungi seperti rangkong (*Buceros sp.*), raja udang, dan elang.

Seperti juga pada SM Bentayan, SM Dangku juga mengalami berbagai permasalahan pengelolaan berupa tumpang tindih kawasan, perambahan oleh masyarakat, penambangan minyak tradisional (*illegal tapping*) dan *illegal logging*.

4.4.2. Kawasan Perkebunan


Luas kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat di kab Musi Banyuasin, luas total 103.970 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 31.579 ha, tanaman produktif 68, 634 ha dan tanaman 3.757 ha. Total produksi TBS 279.459 ton dengan produktivitas rata-rata 4.072 kg/ha/ tahun. Jumlah petani total 54.502 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat 54.296 ha, terdiri dari tanaman muda 27.385 ha, tanaman dewasa/produktif 26.911 ha, tanaman tua tidak ada. Total produksi 43.479 ton. Produktivitas lahan 1616 kg/ha/tahun. Jumlah petani 32.686 orang.

Untuk luas perkebunan sawit yang dikelola perusahaan negara, di Kabupaten Musi Banyuasin luas total 7.685 ha. Terdiri 2.187 ha tanaman muda, 5.498 ha tanaman produktif. Produksi total 18.516 ton/th dengan produktivitas 3368 kg/ha/th, dengan jumlah tenaga kerja 3843 orang. Sedangkan untuk kabupaten Banyuasin, luas total perkebunan sawit negara 22315 ha. Terdiri dari 2.141 ha tanaman tua, 20.052 ha tanaman produktif, 122 ha tanaman tua. Jumlah produksi 66.652 ton/th. Produktivitas 3.324 kg/ha/th dan jumlah tenaga kerjanya 11.158 orang.⁴⁴

Luas total perkebunan sawit besar swasta nasional di kabupaten Musi Banyuasin adalah 145.180 ha. Terdiri dari 26.555 ha tanaman muda, 118.625 tanaman produktif. Jumlah produksi total 453.225 ton/th, dengan produktivitas 3821 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 72.590 orang. Untuk kabupaten banyuasin, luas totalnya 57.813 ha dengan 10.422 ha tanaman muda, 47.391 tanaman produktif. Produksi total 171.436 ton/th dengan produktivitas 3617 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 28.907 orang.⁴⁵

⁴⁴ Statistik Perkebunan Indonesia Komoditi Kelapa Sawit 2015-2017. Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian.

⁴⁵ Ibid



Luas kawasan perkebunan kelapa karet rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, luas total 132.524 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 15.228 ha, tanaman produktif 114.604 ha dan tanaman tua 2.692 ha. Total produksi 105.078 ton dengan produktivitas rata-rata 917 kg/ha/ tahun. Jumlah petani total 69.586 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan karet rakyat 56.655 ha, terdiri dari tanaman muda 6.821 ha, tanaman dewasa/produktif 48.581 ha, tanaman tua 1.253 ha. Total produksi 77.992 ton. Produktivitas lahan 1605 kg/ha/tahun. Jumlah petani 31.494 orang.

Di Kabupaten Musi Banyuasin tidak terdapat perkebunan karet negara. Sedangkan di Kabupaten Banyuasin, luas total perkebunan karet negara 4.937 ha. Terdiri dari 1.797 ha tanaman muda, dan 3.139 ha tanaman produktif. Jumlah produksi 5.149 ton/th. Produktivitas 1.640 kg/ha/th dan jumlah tenaga kerjanya 1.735 orang.⁴⁶

Luas total perkebunan karet swasta nasional di kabupaten Musi Banyuasin adalah 759 ha. Terdiri dari 364 ha tanaman muda, 326 ha tanaman produktif dan 68 ha tanaman tua. Jumlah produksi total 581 ton/th, dengan produktivitas 1.780 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 373 orang. Untuk Kabupaten Banyuasin, luas totalnya 1.920 ha dengan 799 ha tanaman muda, 1005 tanaman produktif, dan 117 ha tanaman tua. Produksi total 1.706 ton/th dengan produktivitas 1.698 kg/ha/th. Jumlah tenaga kerja 945 orang.⁴⁷

Luas kawasan perkebunan kelapa rakyat di kab Musi Banyuasin, luas total 4.951 ha. Yang terdiri dari tanaman muda seluas 865 ha, tanaman produktif 3.897 ha dan tanaman tua 189 ha. Total produksi kopra 5.002 ton dengan produktivitas rata-rata 1.284 kg/ha/ tahun. Jumlah petani total 14.663 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Banyuasin luas kawasan perkebunan kelapa rakyat 47.285 ha, terdiri dari tanaman muda 2.065 ha, tanaman dewasa/produktif 37.639 ha, tanaman tua 7.581 ha. Total produksi kopra 44.269 ton, dengan produktivitas lahan 1.176 kg/ha/tahun. Jumlah petani 33.713 orang. Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin tidak terdapat perkebunan kelapa yang dikelola oleh perusahaan negara maupun swasta.⁴⁸

⁴⁶ Statistik Perkebunan Indonesia Komoditi Karet 2015-2017. Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Statistik Perkebunan Indonesia Komoditi Kepala 2015-2017. Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian.



5. PEMANGKU KEPENTINGAN

Lanskap Sembilang Dangku mempunyai beragam potensi sumberdaya alam dimana banyak pihak hadir dengan beragam kepentingan dan misi yang mereka jalankan. Sejumlah perusahaan di bidang perkebunan, kehutanan dan juga pertambangan menjalankan operasinya di areal ini. Demikian juga beberapa instansi pemerintah pusat yang khusus menangani kawasan dan urusan konservasi juga menjalankan kewenangan dan tugasnya. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga perusahaan restorasi juga menjalankan programnya di beberapa lokasi di lanskap Sembilang Dangku ini. Dengan demikian secara aktual lanskap ini diampu oleh berbagai pemangku pihak dengan berbagai kepentingan, wewenang dan misinya masing-masing.

Dalam menjalankan pendekatan lanskap perlu dilakukan pemetaan terhadap para pihak atau para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Jika dicermati maka parapihak dan perannya pada lanskap Sembilang Dangku dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: pemerintah, swasta, LSM dan pihak lainnya seperti Perguruan Tinggi dan juga forum-forum komunikasi yang berkembang yang mempengaruhi dinamika lanskap Sembilang Dangku.

5.1. Pemangku Kepentingan dari Pemerintah

Instansi pemerintah yang berperan dan berkepentingan dengan pengelolaan lanskap Sembilang Dangku ini dapat dibagi ke dalam 2 tingkatan, yaitu instansi/lembaga vertikal yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang menjalankan kewenangannya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan lembaga pemerintah daerah berupa dinas atau badan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Tabel 5.1 Pemangku Kepentingan dari Pemerintah Pusat

No.	Nama Lembaga	Fungsi Utama Terkait Pengelolaan Lanskap
1.	Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru; b) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; c) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional; d) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; e) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; f) Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; g) Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar; h) Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; i) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; j) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.⁴⁹
2.	Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang	<ul style="list-style-type: none"> a) pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan; b) pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; c) pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan; d) pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial; e) pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan; f) pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; g) pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; h) pelaksanaan pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; i) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.⁵⁰
3.	BP DAS Musi	<ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan dan evaluasi pengelolaan DAS b) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung.⁵¹

⁴⁹ Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 8 /Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumberdaya Alam

⁵⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

⁵¹ Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 15/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai



4.	Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Selatan	Melaksanakan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktivitas hutan, keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan ⁵²
5.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang	Melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan.
6.	Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera	<p>a) Kegiatan Sosialisasi/kampanye pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Pembinaan masyarakat peduli api (MPA)</p> <p>b) Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah dalam penurunan gas rumah kaca.</p>
7.	Badan Pertanahan Nasional	Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁵³
8.	Badan Restorasi Gambut	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
9	Badan Pusat Statistik	Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. ⁵⁴

⁵² Statistik Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2013, hal 13

⁵³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

⁵⁴ UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik



Tabel 5.2 Pemangku Kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

	Instansi /Lembaga	Fungsi Utama Terkait Pengelolaan Lanskap
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah • Pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasi, perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi • Pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri.
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	Merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup: Pemulihan Kerusakan Lingkungan akses terbuka, Restorasi Gambut, Reboisasi Penghijauan, Reklamasi Ex-Tambang, Pengamanan Kebakaran, Perlindungan Hutan
3	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan	Perijinan, perencanaan, penyusunan program, pengkoordinasian, pemantauan, pelaksanaan, pembinaan dan penyediaan data kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi
4	Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam ekosistem, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. • Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan para pihak di provinsi.
5	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	Mengoptimalkan Pemanfaatan lahan, meningkatkan kualitas SDM, memfasilitasi penyediaan bahan baku di bidang perkebunan
6	Dinas Pertanian	Pengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian, organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian.
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan Kesehatan hewan serta tugas pembantuan.
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sarana prasarana jalan.
9	Dinas Perindustrian	Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan (Peningkatan teknologi, diversifikasi, fasilitasi sertifikasi)

Selain itu terdapat lembaga diluar dinas atau badan yang juga dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang juga dapat mendukung implementasi dari pendekatan lanskap ini.

Tabel 5.3 Pemangku Kepentingan Dari Pemerintah Kabupaten

Nama Lembaga	Fungsi Utama Dalam Pendekatan Lanskap
Kabupaten Banyuasin	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin Dan Dokumen Pendukung Lainnya • Pengkoordinasian Dan Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, Dan Tahunan Daerah; • Penyusunan rencana penataan ruang, lingkungan hidup, fisik dan prasarana;
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin	Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, serta evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk keanekaragaman hayati dan pengendalian perubahan iklim;
Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin	Pembinaan teknis pertanian dan usaha pertanian
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin	Peningkatan diversitas pangan dan gizi masyarakat
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Banyuasin	Peningkatan infrastruktur wilayah, termasuk pengembangan irigasi rawa
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyuasin	Pengembangan Dan Penguatan Sentra – Sentra Produksi/Klaster Dan Meningkatkan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Industri Kreatif Berbasis Sumber Daya Lokal
Kabupaten Musi Banyuasin	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan • Melakukan Evaluasi dan Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin	Mengembangkan jaringan jalan/jembatan untuk meningkatkan interkoneksi wilayah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin	Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan
Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan potensi perkebunan rakyat • Memantau praktek pengelolaan perkebunan swasta
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin	Mengembangkan potensi pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lanskap sembilang-dangku
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan, produksi dan diversifikasi pangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin	Peningkatan infrastruktur wilayah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa
Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin	Mengembangkan potensi perikanan secara berkelanjutan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin	Mendukung penciptaan nilai tambah dan komoditi dan menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan agroindustry
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin	Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat
Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (P2KA) dan Sumber Daya Alam (SDA)	Mempercepat penyelesaian konflik agrarian dan sumberdaya alam di lanskap

Dalam analisis terhadap para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan ini perlu kita perhatikan tentang hubungan antara lembaga vertikal dan lembaga pemerintah daerah. Dalam hal ini peran Bappeda Provinsi dapat menjadi lembaga yang dapat mendorong koordinasi dan sinergi antar lembaga vertikal dan antara lembaga vertikal dan lembaga di daerah.

Selain lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai bidang tertentu, pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam juga memerlukan dukungan dari aspek penegakan hukum. Oleh karena itu juga perlu dicatat keterlibatan institusi penegak hukum seperti Polri maupun kejaksaan. Dalam hal pengembangan kebijakan sangat penting artinya pendekatan lanskap juga mendorong keterlibatan legislative daerah untuk bersama-sama mengembangkan berbagai kebijakan yang menjamin keberlanjutan lanskap.

5.2. Perusahaan-Perusahaan di Lanskap Sembilang Dangku

Seperti yang disampaikan pada awal bab ini bahwa pada lanskap Sembilang Dangku ini terdapat beberapa pihak swasta yang menjalankan usahanya. Berikut ini adalah daftar sejumlah perusahaan yang menjankan usaha di bidang pertambangan, kehutanan dan juga perkebunan di Lanskap Sembilang Dangku.

Tabel 5.4 Daftar Perusahaan Pertambangan di Lanskap Sembilang Dangku

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Bumi Perdana Sempurna	13	Manggala Ekawati Lestari
2	Conocophillips Grissik-Dayung	14	Mentari Naluri Sejahtera
3	Conocophillips Grissik-Gelam	15	Nusa Indah Permai
4	Conocophillips Suban-Dayung	16	Putra Muba Coal 2
5	Guna Energi Indonesia	17	Putra Muba Coal 3
6	Inti Permana	18	Putra Muba Coal 4
7	Intiputra Kanaan 1	19	Ralita Jaya Mandiri
8	Intiputra Kanaan 2	20	Rimba Subur Lestari
9	Intiputra Kanaan 3	21	Sentosa Kurnia Energi
10	Intiputra Kanaan 4	22	Sumatra Resource
11	Lapindo	23	Tempirai Multiguna Energi Indo
12	Manggala Alam Lestari	24	Usaha Energi Indonesia

Tabel 5.5 Daftar Perusahaan HTI di Lanskap Sembilang Dangku

No.	Nama Perusahaan
1	PT BUMI PRATAMA USAHA JAYA
2	PT BUMI SRIWIJAYA SEJAHTERA
3	PT RESTORASI EKOSISTEM INDONESIA
4	PT RICKIM MAS JAYA
5	PT SUMBER HIJAU PERMAI
6	PT TIESICO CAHAYA PERTIWI
7	PT TRI PUPA JAYA
8	PT WAHANA AGRO MULIA
9	PT. BUMI PERSADA PERMAI
10	PT. GLOBAL ALAM LESTARI
11	PT. PAKERIN
12	PT. RIMBA HUTANI MAS
13	PT. SENTOSA BAHAGIA BERSAMA
14	PT. TUNAS HUTAN PRATAMA
15	PT. WANA LESTARI MAKMUR SUKSES
16	PT.BUMI PERSADA PERMAI

Perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan ini tergabung dalam sebuah asosiasi pengusaha hutan, yaitu APhi. Di Sumatera Selatan terdapat 1 anggota APhi pemegang IUPHHK-HA dan 17 anggota pemegang IUPHHK-HT.

Tabel 5.6 Daftar Perusahaan Perkebunan di Lanskap Sembilang Dangku

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi
1	PT. Hindoli	Kelurahan Sungai Lilin (Kec. Sungai Lilin)
2	PT. Hindoli	Desa Tanjung alam (Kec. Keluang)
3	PT. Musi Banyuasin Indah	Desa Selabu II (Kec. Batanghari Leko)
4	PT. Pinago Utama	Desa Bruge (Kec. Sanga Desa)
5	PT. Guthrie Pecconia Indonesia	Desa Sungai Medak (kec. Sekayu)
6	PT. Sentosa Mulia Bahagia	Kec. Tungkal Jaya
7	PT. Wana Potensi Guna	Kec. Sanga Desa
8	PT. Pinang Witmas Sejatu	Esa Mangsang (Kec. Bayung Lencir)
9	PT. Lonsum Babat Toman	Kec. Babat Toman
10	PT. Berkas Sawit Sejati	Kec. Bayung Lencir
11	PT Banyu Kahuripan Indonesia	Kec. Lalan
12	PT Banyu Kahuripan Indonesia	Kec. Bayung Lencir
13	PT. Mentari Subur Abadi	Kec. Bayung Lencir
14	PT. Musi Agro Sejahtera	Kec. Lalan
15	PT Lonsum bayung Lencir	Kec. Bayung Lencir
16	PT. Bastian Olah Sawit	Kec. Bayung Lencir
17	PT. Sejati Palma Sejahtera	Kec. Bayung Lencir
18	PT. Bina Karya Eka Mandiri	Kec. Bayung Lencir
19	PT. Bayung Agro Sawita	Kec. Bayung Lencir
20.	PTPN VII	

Sumber : Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan MUBA 2016



Selain perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di tingkat tapak sebenarnya lanskap Sembilang Dangku juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang merupakan pembeli produk yang dihasilkan dari lanskap Sembilang Dangku. Perusahaan tersebut adalah para pembeli produk sawit maupun CPO, perusahaan pengolahan produk hutan terutama kayu dan juga perusahaan pembeli bahan atau hasil pertambangan. Para pembeli ini dapat berupa perusahaan-perusahaan skala regional, nasional maupun tingkat global seperti Unilever, Wilmar, maupun Nestle.

5.3. Lembaga Swadaya Masyarakat

Dinamika pembangunan di Sumatera Selatan mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi. Wilayah ini mempunyai banyak potensi sumberdaya alam sekaligus pusat-pusat industri dan perdagangan. Potensi ekonomi yang ada ini berbanding lurus dengan berbagai resiko pembangunan itu sendiri, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan juga konflik pemanfaatan sumberdaya. Oleh karenanya banyak pihak merasa perlu untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan, termasuk beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat. Banyak inisiatif dan program Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai kontribusi masyarakat sipil terhadap proses pembangunan yang ada di Sumatera Selatan.

Tabel 5.7 Daftar LSM Yang Berkegiatan di Lanskap Sembilang Dangku

No	Nama	No	Nama
1.	WALHI	8.	SNV
2.	HaKI	9.	Deltares
3.	Lingkar Hijau	10.	ICRAF
4.	Wahana Bumi Hijau	11.	WRI
5.	PINUS	12.	IDH
6.	AMAN Sumsel	13.	Yayasan Belantara
7.	Daemeter		

Lembaga-lembaga internasional seperti lembaga donor, lembaga sertifikasi (RSPO), kedutaan negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap produk hijau dari Indonesia juga merupakan para pemangku kepentingan yang perlu diperhatikan pengaruh dan kontribusinya dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan di Sembilang Dangku. Lembaga-lembaga internasional ini memberikan kontribusinya melalui kerjasama dengan pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.



5.4. Para Pemangku Kepentingan Lainnya

Selain beberapa pihak yang disebutkan diatas masih banyak pihak-pihak lain yang berekepentingan terhadap keberlanjutan pengelolaan lanskap Sendang. Beberapa diantaranya adalah:

- Pemerintah Desa dan Warga Desa
- Forum-forum multipihak : Forum DAS, Forum Dangku
- Koperasi dan Asosiasi Petani
- Pedagang dan Pengepul di tingkat tapak
- Perguruan Tinggi
- Kelompok Kerja-Kelompok Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten

5.5. Mengembangkan Sinergitas Para Pemangku Kepentingan

Dilihat dari pemetaan diatas, maka tergambarakan betapa banyak pihak yang berkepentingan terdapat peran, wewenang, dan juga kepentingan parapihak yang dapat disinergikan atau dipadukan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa sinergi atau keterpaduan ini jika dikembangkan akan mampu meningkatkan efektifitas pembangunan yang dijalankan. Artinya terdapat beberapa agenda pembangunan yang dapat diusung secara bersama-sama oleh para pihak diatas, misalnya :

- Penanganan dan pengendalian *illegal logging* dan perambahan kawasan konservasi memerlukan sinergi yang kuat antara BKSDA, Taman Nasional, BPN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, LSM dan juga Pemerintah Desa di sekitar lokasi.
- Dalam pengembangan potensi lahan hutan (KPH) dibutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan-KPH), Pemerintah Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian) dan juga pemerintah desa.
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (air dan sanitasi) memerlukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Dinas PU), LSM, dan juga perusahaan yang mengelola dana CSR di bidang ini.
- Sinergi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Instansi Pusat dalam menyusun rencana penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan pemetaan parapihak kita masih dapat menyusun banyak lagi agenda pembangunan yang seharusnya dikelola secara sinergis dan integratif oleh para pihak seperti yang digambarkan pada contoh diatas.



6. ISU STRATEGIS LANSKAP SEMBILANG DANGKU

Lanskap Sembilang Dangku merupakan lanskap multifungsi baik untuk fungsi penghidupan masyarakat, fungsi produksi dan juga fungsi konservasi. Fungsi konservasi di dalam lanskap ini direpresentasikan oleh keberadaan Taman Nasional dan 2 Suaka Margasatwa. Pada kawasan budidaya sebagian besar lahan pada lanskap Sembilang Dangku merupakan kawasan hutan produksi dan juga kawasan perkebunan. Selain itu terdapat beberapa wilayah pertambangan. Di luar itu merupakan lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat baik berupa ladang, kebun rakyat, persawahan dan juga kawasan/areal budidaya perikanan darat.

Sejumlah persoalan masih dirasakan oleh para pihak dalam mengembangkan perekonomian, konservasi atau menata kehidupan sosial masyarakat. Hubungan antar aktor atau parapihak yang menjalankan perannya pada lanskap Sembilang Dangku ini masih diwarnai sejumlah konflik. Produksi berbasis sumberdaya lahan masih diwarnai oleh persoalan rendahnya tingkat produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas langkah yang diambil baru sebatas perluasan area budidaya (ekstensifikasi). Disisi lain, komoditi-komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat belum menghasilkan nilai tambah dikarenakan belum berkembangnya industri pengolahan/turunannya. Selain itu persoalan kebutuhan dasar seperti aksesibilitas, pemenuhan kebutuhan air bersih dan juga energi listrik masih menjadi persoalan di banyak desa di lanskap Sembilang Dangku ini.

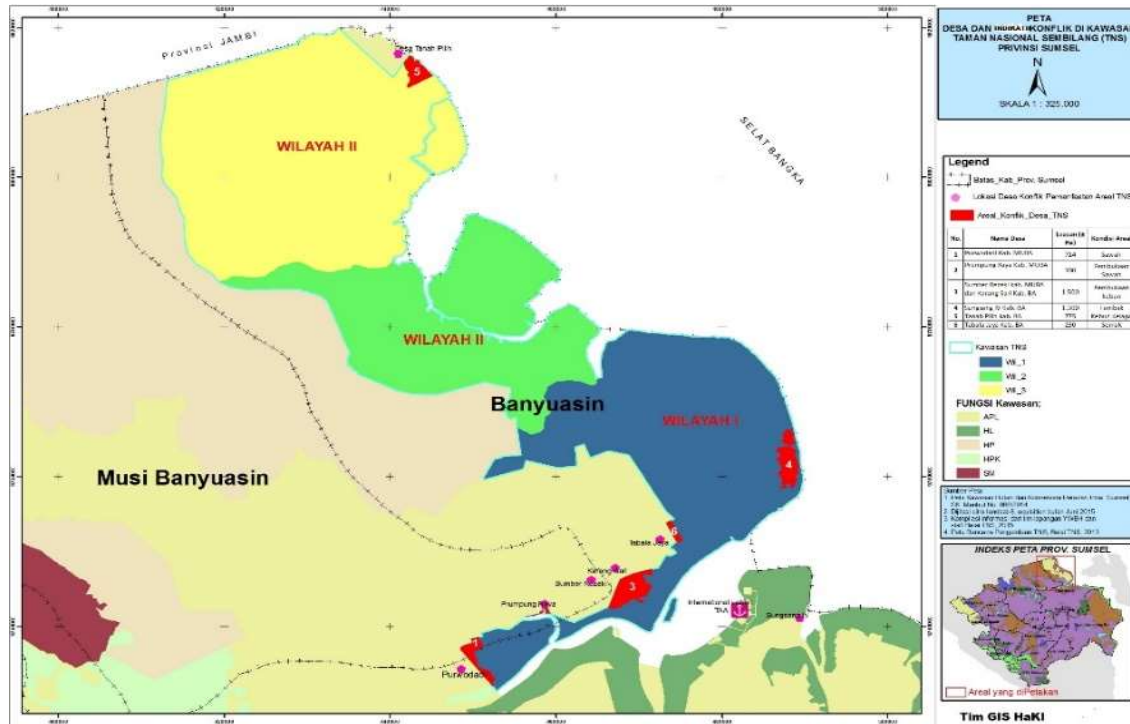
6.1. Konflik Pemanfaatan Lahan

Pada lanskap Sembilang Dangku ini banyak dijumpai kasus konflik pemanfaatan lahan. Konflik pemanfaatan lahan ini terjadi antara beberapa pemangku kepentingan. Berdasarkan pihak/pemangku kepentingan yang terlibat maka konflik pemanfaatan lahan ini dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- Konflik masyarakat dengan perusahaan
- Konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, misalnya dalam hal batas kepemilikan ataupun batas antar desa
- Konflik antara perusahaan dengan perusahaan terkait dengan batas konsesi antar perusahaan
- Konflik antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya batas desa dengan batas kawasan hutan
- Konflik antara perusahaan dengan pemerintah, misalnya konsesi perusahaan dengan kawasan hutan/kawasan konservasi

Wujud konflik pemanfaatan lahan yang paling mengemuka pada lanskap Sembilang Dangku adalah antara masyarakat dengan kawasan konservasi. Saat ini kawasan-kawasan konservasi tersebut mengalami tekanan perambahan lahan yang cukup tinggi. Di Taman Nasional Berbak dan Sembilang SPTN Wilayah II terdapat perambahan kawasan oleh masyarakat.

Di bawah ini adalah peta konflik lahan di Taman Nasional Sembilang menurut studi yang dilakukan pada tahun 2016.⁵⁵



Gambar 6.1 Peta konflik lahan di Taman Nasional Sembilang

Suaka Margasatwa Bentayan mempunyai persoalan yang cukup pelik karena sebagian besar kawasannya telah dirambah oleh masyarakat. Hingga tahun 2017 dilaporkan telah ada 1.449 KK yang merambah kawasan Bentayan. Suaka Margasatwa Bentayan juga mempunyai persoalan tumpang tindih lahan dengan PT London Sumatera seluas 31,615 ha.

Selain SM Bentayan, SM Dangku juga mengalami konflik pemanfaatan lahan dengan masyarakat dan perusahaan. Perambahan terjadi di 4 lokasi yaitu Sungai Napuh (242 KK), Sungai Petai (555 KK), Sungai Biduk (139 KK), dan Rebon Jaro (66 KK), sementara itu dalam hal *illegal logging* terdapat 6 *sawmill* yang beroperasi di sekitar kawasan yang diduga menggunakan bahan baku dari dalam kawasan. Tumpang tindih kawasan terjadi antara kawasan SM Dangku dan PT. BSS, PT MBI, PT. PSM PT BTS.⁵⁶

⁵⁵ Studi Laju Degradasi Dan Deforestasi Serta Kondisi Tutupan Hutan Melalui Kajian Spasial Dan Data Sekunder Di Kawasan Taman Nasional Sembilang, Konsorsium Bentang Alam Sembilang (KiBAS), 2016

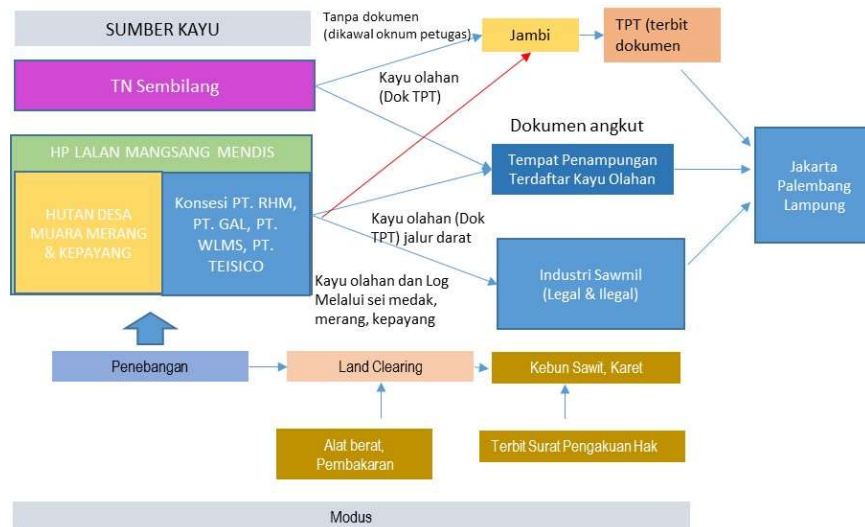
⁵⁶ Potensi dan Permasalahan Pada Wilayah Seksi Konservasi Wilayah I, Disampaikan pada Rapat Kerja Penanganan Gangguan KK Balai KSDA Sumsel, Palembang 09 Maret 2017.



Gambar 6.2. Perambahan di kawasan Suaka Marga Satwa Danguku
 Sumber: Balai KSDA Sumatera Selatan

6.2. Pembalakan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin

Gangguan kawasan hutan berupa pembalakan liar (*Illegal logging*) dan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) masih terus terjadi di Kabupaten Banyuasin maupun Musi Banyuasin. Dari pemantauan yang dilakukan kegiatan pembalakan liar ini berlangsung di kawasan konservasi maupun hutan produksi.



Gambar 6.3 Alur jaringan illegal logging di Kab. Banyuasin dan Kab. Musi Banyuasin
 Sumber: Rencana Operasi Gabungan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi TN Sembilang Kabupaten Banyuasin. 2016

Taman Nasional Sembilang merupakan salah satu di dalam lanskap yang mengalami degradasi akibat kegiatan pembalakan liar. Dalam kurun waktu antara 2013-2015 terjadi deforestasi seluas 3714,89 ha.⁵⁷



Gambar 6.4 Rakit Log dan Tumpukan Kayu di Kawasan TN Sembilang

Sumber: Rencana Operasi Gabungan Penanganan Tindak Pidana Kehutanan di Kawasan Konservasi TN Sembilang Kabupaten Banyuasin. 2016

Pembalakan liar juga berlangsung sangat intensif di kawasan Hutan Desa Muara Merang dan Desa Kepayang. Studi degradasi hutan yang dilakukan WBH Sumsel menunjukkan, Hutan Desa Kepayang yang luasnya enam ribu hektar dengan hutan kerapatan tinggi sebesar 29 persen pada 2010 turun drastis menjadi 12 persen pada 2013. Sedangkan hutan kerapatan sedangnya mengalami peningkatan dari 21 persen pada 2010, menjadi 32 persen pada 2013. Tidak hanya mengambil kayu secara ilegal namun para pelaku ini juga kemudian melakukan perambahan kawasan dengan menjadikan kawasan hutan produksi sebagai perkebunan sawit.

Dilain pihak kasus *illegal minning* atau *illegal drilling* juga masih marak terjadi di Lanskap Sembilang Dangku terutama pada pertambangan minyak bumi, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Pertambangan ilegal ini sudah terjadi turun temurun dimana masyarakat memanfaatkan sumur-sumur tua untuk ditambang lagi. Karena dilaksanakan tanpa ijin maka pengawasan sulit dilakukan sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan, selain itu juga membahayakan masyarakat karena dilakukan tanpa sistem keamanan yang memadai. Meskipun demikian kegiatan penambangan ini dilakukan oleh masyarakat karena mampu memberikan sumber pendapatan bagi mereka.

⁵⁷ Studi Laju Degradasi Dan Deforestasi Serta Kondisi Tutupan Hutan Melalui Kajian Spasial Dan Data Sekunder Di Kawasan Taman Nasional Sembilang, Konsorsium Bentang Alam Sembilang (KiBAS), 2016



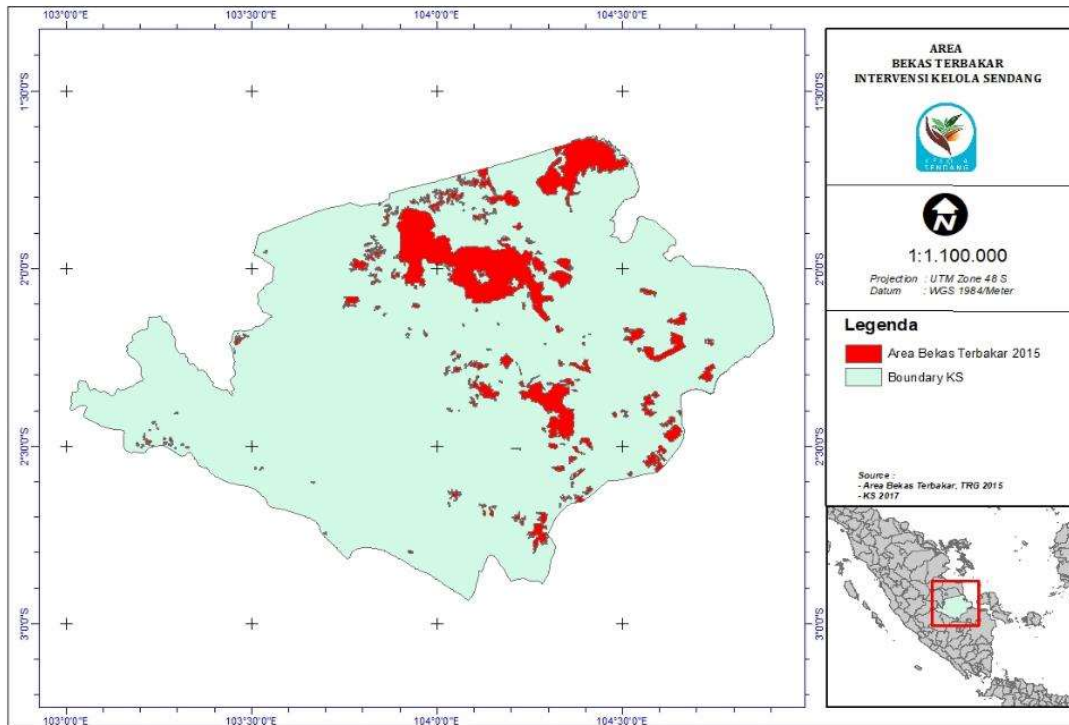
Gambar 6.5 Pertambangan Minyak oleh Masyarakat di Desa Muara Medak
Sumber : Dok. KELOLA Sendang

6.3. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Secara teoritis kebakaran hutan dan lahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibedakan ke dalam dua kategori yaitu faktor pemicu dan faktor pendukung. Di Sumatera Selatan faktor pemicu terjadinya kebakaran (penyulutan api) adalah:

- a. Penyiapan Lahan
- b. Berburu, Mencari ikan, ekstraksi gelam
- c. Konflik lahan
- d. Kelalaian Manusia

Sementara itu faktor-faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim, kondisi fisik lahan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah membuat mereka menggunakan pembakaran sebagai teknik pembukaan lahan yang paling murah.




Gambar 6.6 Sebaran area kebakaran tahun 2015 pada lanskap Sembilang Dangu.

6.4. Degradasi Ekosistem Sungai dan Rawa

Seiring dengan perubahan lahan dari hutan primer menjadi lahan perkebunan dan hutan tanaman yang terjadi secara masif, ekosistem rawa dan sungai menjadi terpengaruh kualitasnya. Perkebunan dan hutan tanaman mensyaratkan perubahan bentuk alamiah permukaan lahan untuk mendukung kegiatan budidaya. Selain itu penggunaan pupuk kimia terjadi secara intensif sepanjang tahun dengan volume yang terus meningkat seiring dengan perluasan lahan perkebunan dan hutan tanaman. Penggunaan pupuk kimia ini akan mempengaruhi kualitas perairan yang berupa sungai ataupun rawa karena tidak semua akan diserap tanaman. Sebagian bahan kimia tersebut larut bersama proses aliran permukaan dan terakumulasi di sungai ataupun rawa. Vegetasi di sekitar sungai atau rawa juga mengalami degradasi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.

6.5. Konflik Antara Manusia dan Satwa

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan budidaya baik oleh masyarakat maupun perusahaan mempunyai konsekuensi semakin menyempitnya habitat satwa liar. Lanskap Sembilang Dangu secara alamiah merupakan habitat beberapa satwa langka yang dilindungi seperti harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*) dan lain sebagainya. Satwa-satwa tersebut mengalami tekanan



yang hebat sebagai akibat rusaknya habitat mereka. Selain itu perburuan hewan liar yang masih sering terjadi juga mengancam keberadaan satwa-satwa langka tersebut.

Akibat dari kerusakan habitat dan perburuan, sering terjadi konflik antara manusia dan satwa. Kejadian berupa bermukimnya manusia di habitat satwa liar, maupun masuknya satwa liar ke area pertanian dan perkebunan masyarakat menjadi tak terhindarkan dan menimbulkan konflik.

6.6. Produktivitas Pertanian Rendah

Angka – angka produktivitas beberapa komoditi pertanian dan juga perkebunan yang ada di lanskap Sembilang Dangku menunjukkan bahwa kegiatan budidaya pertanian di lanskap ini belum terjadi secara optimal. Akibatnya adalah untuk menghasilkan volume produksi yang diharapkan masih dilakukan dengan cara ekstensifikasi, membuka lahan baru, dan pada ujungnya dapat mengancam keberadaan kawasan atau lahan non budidaya (lindung).

Berdasarkan data statistic yang ada, komoditi utama yaitu sawit mempunyai angka produksi hanya pada kisaran 10 -15 ton per ha, sementara potensinya hingga pada angka 30 ton/ha. Permasalahan rendahnya produksi perkebunan kelapa sawit rakyat adalah belum diterapkannya teknologi secara tepat mulai dari penggunaan bibit unggul, teknologi budidaya dan panen/pasca panen. Penggunaan bibit asalan akan berdampak dalam jangka panjang yakni produksi yang rendah. Selain itu dalam budidaya, petani pada umumnya hanya menerapkan teknologi sederhana yang diketahui secara tidak langsung dari petani lainnya sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Produksi perikanan darat juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013 produksi perikanan darat mencapai kisaran 25.000 ton pada tahun 2013 dan turun drastis pada angka sekitar 5000 ton pada tahun 2016.

Produksi pada sawah/ lebak cenderung naik, namun padi ladang mengalami penurunan. Sedangkan tingkat produksi ternak masih sangat minim. Dengan luasan area pedesaan yang mencapai hampir 1,6 juta ha populasi hewan ternak di lanskap Sendang sangatlah minim. Tercatat bahwa rata-rata populasi sapi yang ada adalah sekitar 6500 ekor (0,004 ekor/ha) dan domba sekitar 5000 ekor (0,003 ekor/ha).



6.7. Nilai Tambah Komoditi Pertanian Rendah

Lanskap Sembilang Dangku dapat dikatakan sebagai kawasan pedesaan (*rural area*) dengan berbagai hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan juga perikanan. Ekonomi masyarakat ditopang dan berkembang dari proses produksi beberapa komoditi dari sektor-sektor diatas. Namun hingga saat ini yang berkembang baru pada produksi bahan mentah saja belum ada proses penciptaan nilai tambah yang berarti. Upaya untuk mengembangkan industri kecil pengolahan makanan dan juga kerajinan telah dirintis oleh Kabupaten Musi Banyuasin maupun Kabupaten Banyuasin namun belum menghasilkan jumlah produk olahan yang cukup banyak jumlahnya. Padahal tersedia berbagai potensi bahan baku yang di lanskap Sembilang Dangku ini, beberapa diantaranya adalah:

- Pengolahan hasil perikanan
- Pengolahan kelapa
- Pengolahan karet
- Pengolahan gambir

6.8. Fluktuasi Harga Komoditi Utama

Sawit dan karet merupakan komoditi yang sangat rentan terhadap situasi perekonomian global. Harga kedua komoditi ini dipengaruhi oleh permintaan global dan juga nilai tukar rupiah. Harga karet dan sawit dunia yang sangat fluktuatif akan berpengaruh kepada kehidupan sosial ekonomi para petani penghasil kedua komoditi utama tersebut.

Harga karet di pertengahan tahun 2018 bila dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir termasuk di harga yang rendah (51% dari harga tertinggi). Komoditi sawit juga mengalami fenomena yang hampir sama, di pertengahan tahun 2018 bila dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir termasuk di harga yang rendah juga yaitu (51% dari harga tertinggi). Jika harga berada pada titik terendah petani akan membiarkan saja tanaman karet ini tanpa perawatan ataupun penyadapan. Oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah antisipasi/mitigasi terhadap fenomena ini.

6.9. Rendahnya Variasi Produk Pertanian

Isu ini sebenarnya masih terkait dengan isu fluktuasi harga komoditi utama. Pada umumnya petani-petani di Lanskap Sendang bergantung hanya pada kedua atau salah satu komoditi diatas (karet dan sawit). Hal ini menyebabkan secara ekonomi petani juga sangat rentan terhadap fenomena ini. Penambahan variasi komoditi atau pengembangan sistem dan pola wanatani akan mengurangi resiko ini.



6.10. Tingkat Kemiskinan Yang Masih tinggi

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yaitu pada angka 17,27% pada tahun 2016 diatas angka provinsi (13,2%) dan nasional (10,86 %). Sementara di Kabupaten Banyuasin tingkat kemiskinannya lebih rendah yaitu pada angka 11,72% pada tahun yang sama.

Tingkat kemiskinan ini apabila dikaitkan dengan corak kehidupan agraris di Lanskap Sembilang Dangku, dapat tercermin dari Nilai Tukar Petani. Nilai tukar petani secara umum di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember 2017 adalah 96,41⁵⁸. Nilai Tukar Petani dibawah 100 ini menggambarkan bahwa kenaikan harga konsumsi lebih besar daripada kenaikan harga produksi petani.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 untuk Kabupaten Musi Banyuasin 66,45 dan Kabupaten Banyuasin 65,01. Angka tersebut di bawah angka nasional maupun provinsi. Di tahun yang sama IPM Indonesia 70,18 sedangkan IPM Provinsi Sumatera Selatan 68,24⁵⁹. Secara khusus IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 variabel pokok. Angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita riil.

6.11. Tingkat Pendidikan Masih Rendah

Tingginya angka kemiskinan di kedua kabupaten berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan. Sebagai gambaran, angka partisipasi murni tingkat SMA dan sederajat di kedua kabupaten pada tahun 2017 berkisar pada angka 50%. Dengan demikian sekitar 50% anak berusia sekolah SMA dan sederajat tidak bersekolah, sehingga beresiko mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupannya.

6.12. Akses Sumberdaya Lahan Masyarakat

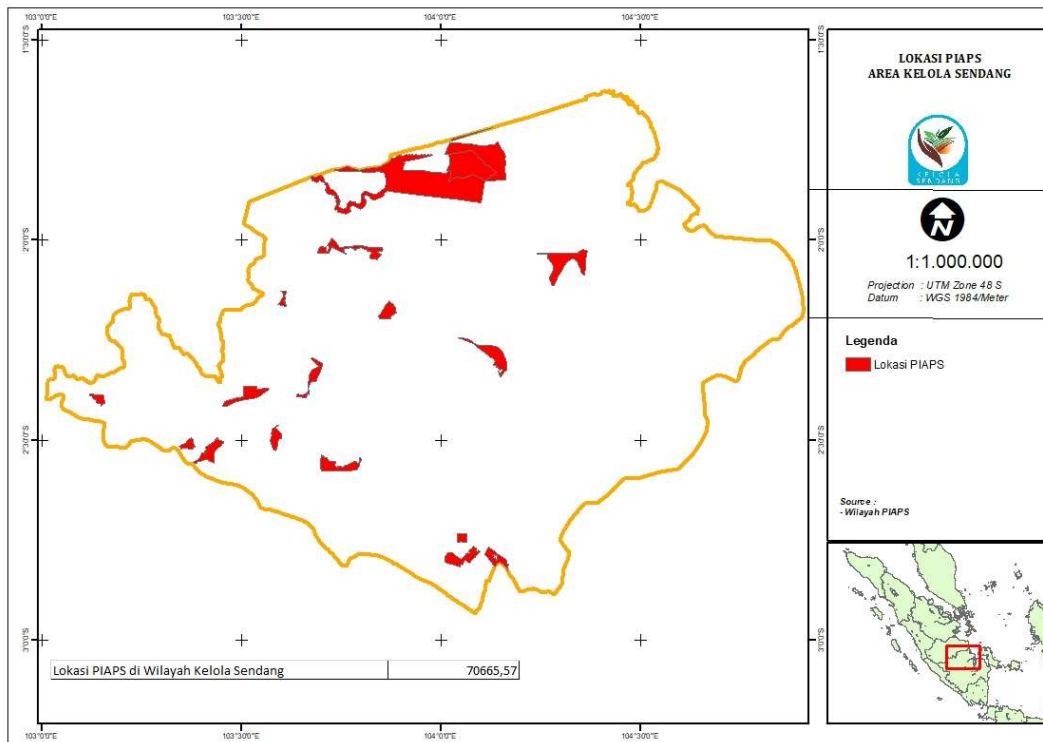
Kawasan hutan adalah areal yang ditetapkan oleh negara untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan baik sebagai fungsi konservasi, lindung, maupun produksi. Yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa di dalam hutan negara terdapat masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan. Sebagian besar desa-desa Lanskap Sembilang Dangku berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Seringkali masyarakat mengalami hambatan untuk mengakses lahan hutan karena terganjal peraturan legal dan formal perijinan pemanfaatannya. Tuntutan kebutuhan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat untuk mengakses lahan hutan meskipun tidak memiliki izin formal yang disyaratkan.

⁵⁸ Sumber: *bps.co.id*: Berita Resmi Statistik Sumatera Selatan, 2 Januari 2018

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, 2017. Musi Banyuasin Dalam Angka, 2017


Dari data survei rumah tangga disekitar kawasan hutan 2014, didapatkan data bahwa di Sumatera Selatan 64,4% masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan negara yang memanfaatkan lahan hutan tidak memiliki izin. Untuk itu dibutuhkan mekanisme untuk mendorong kebijakan dan program yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan hutan negara secara proporsional dengan tetap memperhatikan fungsi-fungsi ekologis kawasan.

Saat ini pemerintah tengah mengembangkan Program Perhutanan Sosial. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Hal ini meningkatkan peluang masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan secara legal. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS). Berikut PIAPS di dalam area Lanskap Sembilang Dangku.



Gambar 6.7 Lokasi PIAPS di Area Lanskap Sembilang Dangku

Selain itu, pada Lanskap Sembilang Dangku juga tinggal komunitas Wong Kubu. Wong Kubu adalah komunitas lokal di Sumatera Selatan dan Jambi yang hidup di dalam dan dari sumberdaya hutan tropis, beberapa pihak menyebut mereka sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kehidupannya sangat tergantung dari sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka. Perikehidupan mereka sangat sederhana, di mata Wong Kubu, hutan adalah segala-galanya; hutan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Di hutan mereka mencari madu, rotan, jernang dan hasil hutan lainnya. Di Sumatera Selatan Wong Kubu tersebar mulai dari Sungai Lalan, Batanghari Leko dan Rawas dan terbagi



dalam empat kelompok besar, yaitu Kubu Lalan, Kubu Tungkal, Kubu Bayat dan Kubu Rawas.

Masyarakat adat seperti Wong Kubu seringkali terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan termasuk hak untuk mengkasas lahan hutan sebagai sumber penghidupan dan kultur mereka. Berkurangnya luasan lahan hutan alam akibat kegiatan logging dan konversi menjadi areal perkebunan mengasingkan mereka dari ruang hidup alamiahnya. Aktivitas pemenuhan penghidupan mereka dianggap illegal karena ruang hidup mereka menjadi areal-areal konsesi perkebunan, tambang, dan hutan tanaman. Dibutuhkan dorongan kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan kultural yang dipadukan dengan perspektif hak hidup layak untuk menjamin keberadaan mereka dimasa datang.

6.13. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin keberlangsungan penghidupan warga negara. Terdapat 2 jenis infrastruktur berdasarkan fungsi utamanya yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur dasar. Infrastruktur ekonomi yaitu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi. Infrastruktur dasar merupakan fasilitas-fasilitas utama yang menopang penghidupan masyarakat seperti air bersih, jalan arteri desa, listrik, sanitasi lingkungan; dimana hal-hal tersebut diprioritaskan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pada konteks Lanskap Sembilang Dangku, kebutuhan infrastruktur dasar yang dianggap prioritas untuk dipenuhi berupa jaringan jalan, air bersih, dan listrik. Infrastruktur di Kabupaten Banyuasin terbilang cukup memprihatinkan, 34,86 % jalan yang ada tergolong rusak dan rusak berat, sedangkan pada Kabupaten Musi Banyuasin untuk jalan rusak dan rusak berat sejumlah 42,83%. Angka tersebut baru memperhitungkan fasilitas infrastruktur jalan nasional, provinsi, dan kabupaten; belum memperhitungkan jalan-jalan arteri desa yang menghubungkan antar desa dan kota.

Layanan air bersih juga masih menjadi sebuah permasalahan di Lanskap dimana hampir sebagian besar desa yang ada didalamnya belum memiliki layanan air bersih yang memadai terutama bagi areal-areal yang merupakan kawasan gambut. Pengembangan teknologi dan kelembagaan layanan air bersih merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi mengingat air bersih merupakan prasyarat utama kehidupan. Begitu juga terkait layanan elektrifikasi dimana sebagian besar desa di Lanskap belum terlayani fasilitas listrik secara memadai.

7. RANCANGAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP

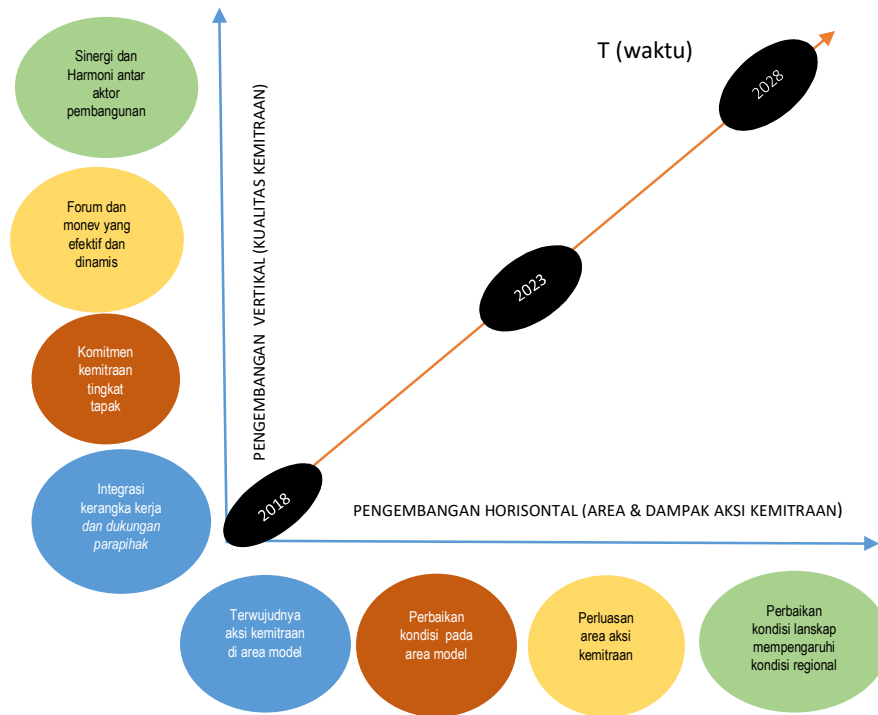
7.1. Tahapan Menuju Lanskap Yang Berkelanjutan

Mewujudkan model pengelolaan yang berkelanjutan dengan menekankan pada pengembangan kemitraan antar aktor yang ada pada suatu kawasan membutuhkan proyeksi jangka panjang dan proses yang bertahap. Tahapan ini terkait dengan kualitas dari kemitraan itu sendiri maupun luas area yang akan terdampak oleh menguatnya kemitraan ini. Pengembangan kualitas kemitraan dan meluasnya dampak kemitraan inilah yang akan menjadi fokus dari Masterplan ini. Tahapan tersebut dirangkum dalam dua periode kemitraan, yaitu Periode Jangka Menengah I dan II.

Tabel 7.1 Periode Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku

MASTERPLAN KELOLA SENDANG 2018-2028	
VISI 2028: MEWUJUDKAN LANSKAP BERKELANJUTAN MELALUI KEMITRAAN MASYARAKAT – PEMERINTAH – SWASTA YANG KUAT DAN EFEKTIF PADA LANSKAP SEMBILANG DANGKU UNTUK MERAHAI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBERDAYA ALAM SERTA MEWUJUDKAN EKONOMI INKLUSIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
PERIODE JANGKA MENENGAH I 2018-2023	PERIODE JANGKA MENENGAH II 2023-2028
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terwujudnya integrasi kerangka kerja kolaboratif dan tematik • Mengembangkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan • Melakukan <i>mainstreaming</i> model kemitraan pada perencanaan pembangunan daerah • Memperkuat komitmen kemitraan menuju kemitraan yang fungsional dan implementatif melalui pengembangan Rencana Aksi Kemitraan pada Area Model • Memperkuat basis data baik tingkat tapak (area model) maupun tingkat lanskap • Mengembangkan forum multipihak yang dinamis dan efektif dalam mendorong berkembangnya kemitraan lanskap • Mengembangkan skema evaluasi kolaboratif berbasis pada <i>benefit and impact analysis</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperluas area aksi kemitraan di dalam lanskap sembilang dangku • Melakukan analisis tentang kontribusi pendekatan lanskap terhadap pertumbuhan ekonomi hijau (<i>Green Growth</i>) • Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat implementasi pendekatan lanskap • Mengembangkan media pembelajaran untuk pengembangan pendekatan lanskap di wilayah Sumatera Selatan lainnya

Untuk mengetahui perkembangan kualitas kemitraan harus diuji dengan implementasi di tingkat tapak, sementara itu keberhasilan di tingkat tapak juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kemitraan yang terjadi diantara para pihak. Oleh karenanya keduanya harus berjalan secara paralel sehingga dapat mewujudkan visi kemitraan. Konsep ini dapat digambarkan dalam skema berikut.



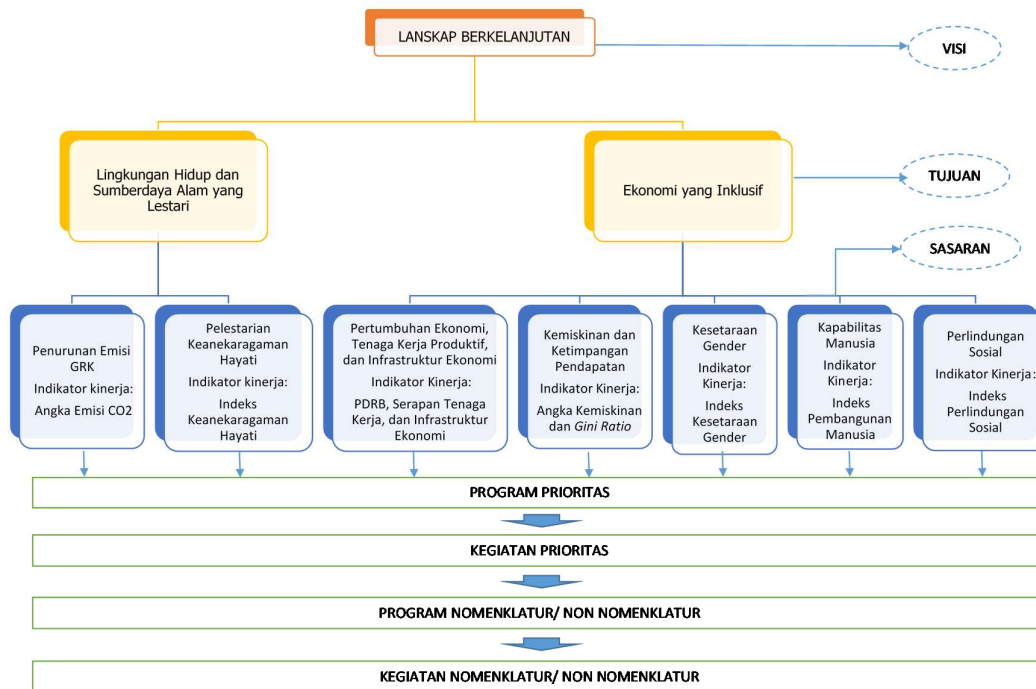
Gambar 7.1 Skema Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan secara vertikal merupakan penggambaran dari upaya pencapaian kualitas kemitraan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Kualitas kemitraan di awal pengembangan kemitraan ditandai dengan adanya **integrasi kerangka kerja dan dukungan parapihak**. Dalam hal ini integrasi tercermin dalam Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang/ *Cascade* (Lampiran 1). Selanjutnya kualitas kemitraan dikatakan meningkat apabila terwujud **komitmen kemitraan tingkat tapak**. Dalam tingkat yang paling ideal komitmen ini akan berwujud perjanjian kerjasama parapihak untuk mencapai target bersama. Tahap perkembangan berikutnya adalah terbangunnya **forum kemitraan** dan terselenggaranya proses **monitoring dan evaluasi yang efektif dan dinamis**. Jika ketiga tahapan tersebut mampu dilampaui oleh para pihak maka akan terwujud **sinergi dan harmoni antar aktor pembangunan**.

Perkembangan kemitraan secara horisontal ditandai dengan perkembangan area dan perbaikan kondisi area aksi kemitraan. Pada 5 tahun pertama (2018-2023), ditargetkan **berjalannya aksi kemitraan di area model** dan terjadinya **perbaikan kondisi di area model**. Kemudian pada 5 tahun ke-2 (2023-2028), dari segi kuantitas diharapkan terjadinya **perluasan area aksi kemitraan**. Sedangkan secara kualitas, diharapkan **perbaikan kondisi lanskap dapat mempengaruhi kondisi regional**.


7.2. Kerangka Logis Untuk Lanskap Berkelanjutan

Pendekatan lanskap perlu didukung oleh sebuah kerangka logis sebagai acuan untuk mencapai visi lanskap yang berkelanjutan. Visi masa depan lanskap yang berkelanjutan dalam hal ini perlu diturunkan pada tingkatan-tingkatan capaian yang lebih operasional sehingga dapat memberikan panduan terhadap penyusunan program maupun kegiatan di tingkat tapak. Visi lanskap berkelanjutan perlu diperjelas dan didukung pencapaiannya dengan menentukan tujuan serta sasaran yang tepat. Berikut ini adalah kerangka kerja logis kemitraan pengelolaan lanskap yang akan diimplementasikan pada Lanskap Sembilang Dangku.



Gambar 7.2 Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang

Visi **Lanskap Berkelanjutan** memiliki dua tujuan yaitu **Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang Lestari** dan **Ekonomi yang Inklusif**. Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang lestari didekati dengan dua sasaran, yaitu **penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)** dan **pelestarian keanekaragaman hayati**. Sedangkan sasaran ekonomi inklusif didekati dengan dimensi kunci pertumbuhan ekonomi inklusif.



Pertumbuhan ekonomi inklusif (*Inclusive growth*) memiliki dua dimensi kunci yaitu: (i) mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi, dan (ii) memastikan akses yang lebih luas ke peluang-peluang ini sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Dimensi kedua diidentifikasi, sebagian, dengan peningkatan kapasitas manusia, seperti investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar. Jaring pengaman sosial juga ditekankan untuk melindungi yang paling rentan.⁶⁰

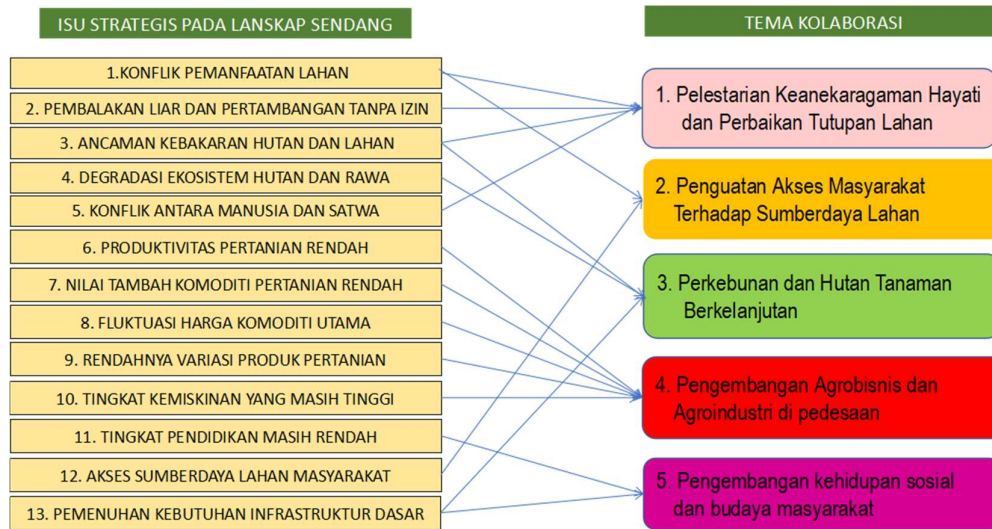
Kerangka logis di atas masih perlu didetailkan lagi ke dalam rincian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Program Nomenklatur/ Non Nomenklatur, dan Kegiatan Nomenklatur/ Non Nomenklatur. Penjabaran rincian tersebut serta integrasinya dengan tema kemitraan disampaikan dalam ***lampiran 1*** dokumen ini.

7.3. Desain Integrasi Sektor-Sektor Pembangunan

7.3.1. Pendekatan Holistik Tematik

Pendekatan lanskap diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan sinergi dan integrasi sektor-sektor pembangunan beserta para aktor yang ada pada sebuah kawasan atau wilayah menuju pada visi bersama, yaitu lanskap yang berkelanjutan. Dibutuhkan sebuah kerangka logis yang mampu memberikan panduan keterpaduan antar sektor dan antar aktor menuju pada sebuah arah (sasaran) yang sama. Dalam konteks ini akan dikembangkan pendekatan *holistik – tematik* dimana akan disusun pola hubungan dan penyatuan (*merging*) agenda pembangunan ke dalam tema-tema kemitraan tertentu. Selain menyatukan beberapa sektor dan aktor tema-tema kemitraan ini juga akan menggabungkan beberapa isu strategis ke dalam sebuah tema kemitraan tertentu, sehingga diharapkan penanganan terhadap isu-isu yang ada di tingkat lanskap akan terlaksana secara holistik dan terpadu.

⁶⁰ McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators. *ZJ. ADB Sustainable Development Working Paper Series*, (14).



Gambar 7.3 Peleburan Isu Strategis Ke Dalam Tema Kemitraan

Berbagai isu strategis yang ada di lanskap Sembilang Dangku diatas akan dikelola dengan pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Melalui penyelenggaraan dan pengembangan kemitraan berdasarkan 5 tema diatas, diharapkan 13 isu strategis yang ada di lanskap Sembilang Dangku akan mampu ditangani secara holistic dan terpadu. Kelima tema kolaborasi akan mengintegrasikan program dan kegiatan prioritas di dalam kemitraan pengelolaan lanskap. Masing-masing program dalam tema memiliki indikator dan target tertentu yang diharapkan dapat dicapai dengan terbangunnya kolaborasi para pihak di Lanskap Sembilang Dangku.

7.3.2. Pengembangan Kualitas Kemitraan

Pengembangan kualitas kemitraan atau pengembangan vertikal (Gambar 7.1) menggambarkan indikator kualitas kemitraan yang diusung oleh para pihak. Untuk mencapai indikator kualitas diperlukan beberapa kegiatan. Berikut tahapan kegiatan peningkatan kualitas kemitraan.

Tabel 7.2 Tahapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kemitraan

No.	Indikator Kualitas Kemitraan	Tahapan Kegiatan
1	Integrasi kerangka kerja dan dukungan parapihak	<ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi masterplan - dukungan kebijakan terkait masterplan - pengembangan sistem dan sumber pendanaan
2	Komitmen kemitraan tingkat tapak	<ul style="list-style-type: none"> - penentuan area model - penguatan keterlibatan pemangku kepentingan - penyusunan rencana aksi kemitraan - penandatanganan perjanjian kerjasama
3	Forum dan monev yang dinamis	<ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi forum multipihak - fasilitasi proses monitoring - fasilitasi proses evaluasi

7.3.3. Pengembangan Area Lanskap

Pengembangan area lanskap atau pengembangan horisontal (Gambar 7.1) menggambarkan dampak kemitraan terhadap kondisi lanskap. Dampak kemitraan tersebut diukur dengan indikator program prioritas dalam Kerangka Logis Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sendang/ *Cascade* (**Lampiran 1**). Diharapkan indikator ini dapat menjadi ukuran perubahan kondisi di area lanskap dalam 10 tahun ke depan.

Tabel-tabel berikut menyajikan indikator, kondisi dambaan dan target program prioritas dalam masing-masing tema kemitraan.

Tabel 7.3 Indikator dan Target Tema Pelestarian Ekosistem dan Perbaikan Tutupan Lahan

	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Dambaan	Target 2028
1.	Perbaikan tutupan lahan	Tutupan lahan	Terjadi perbaikan tutupan lahan	5% per tahun luas lahan kritis berkurang (di luar kawasan konservasi)
2.	Optimalisasi Fungsi Kawasan Konservasi	Persentase luas kawasan yang utuh (tidak terdapat gangguan)	Persentase luas kawasan yang utuh meningkat	(menyesuaikan target BKSDA Sumsel dan BTN Berbak Sembilang)
3.	Pelestarian spesies prioritas	populasi spesies prioritas	Meningkatnya populasi spesies prioritas pada lanskap	(menyesuaikan target BKSDA Sumsel dan BTN Berbak Sembilang)

Tabel 7.4 Indikator dan Target Tema Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Lahan

No	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Dambaan	Target 2028
1	Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan Berkelanjutan oleh masyarakat	Jumlah usaha berbasis keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan	Peningkatan jumlah usaha berbasis keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan	10 unit usaha baru
2	Penguatan akses kelola masyarakat	Luas lahan kelola legal masyarakat	Meningkatnya luas lahan kelola legal masyarakat	50% area PIAPS disahkan sebagai area perhutanan sosial
3	Penguatan akses kepemilikan lahan	Luas lahan milik legal masyarakat	Meningkatnya status kepemilikan lahan masyarakat	10% dari KK yang belum sertifikat

Tabel 7.5 Target dan Indikator Tema Perkebunan dan Hutan Tanaman Berkelanjutan

No.	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Dambaan	Target 2028
1	Pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan perusahaan	Luas HCV di areal perusahaan	Luasan HCV pada wilayah perusahaan meningkat.	Peningkatan areal HCV di areal perusahaan ^{b)}
		Indeks kualitas air di areal perusahaan	Kualitas perairan meningkat dengan pengelolaan sempadan sungai sesuai dengan aturan yang berlaku	Kualitas air sungai di areal perusahaan baik atau maksimal tercemar ringan (Plj 0-5) ^{c)}
2	Pengurangan Emisi Sektor Energi	Emisi sektor energi	Penurunan emisi sektor energi	Penurunan emisi sektor energi sebesar 29% ^{d)}
3	Peningkatan peran perusahaan dalam aksesibilitas masyarakat	Panjang jalan yang dibangun perusahaan untuk masyarakat	Panjang jalan yang dibangun perusahaan untuk masyarakat bertambah	50 km bantuan jalan kampung dari perusahaan
4	Peningkatan peran perusahaan dalam produktivitas petani	Pendapatan petani di desa sekitar perusahaan	Meningkatnya pendapatan petani di desa sekitar perusahaan	Pendapatan petani di desa sekitar hutan naik 20%
4	Peningkatan peran perusahaan dalam pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi	jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan	Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan bertambah	2000 rumah tangga mendapatkan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan
5	Peningkatan peran perusahaan dalam akses Pendidikan Masyarakat	Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah di desa sekitar perusahaan	Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah meningkat dengan bantuan perusahaan	Angka Melek Huruf (AMH) 100% Rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun di desa sekitar perusahaan
6	Peningkatan peran perusahaan dalam Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH), Kasus Gizi Buruk di desa sekitar perusahaan	Meningkatnya AHH, menurunnya Kasus Gizi Buruk	AHH naik sesuai dengan AHH provinsi ^{e)} Tidak ada kasus gizi buruk di desa sekitar perusahaan

^{b)} Target kuantitatif masih perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak swasta terkait

^{c)} Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Th 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

^{d)} Berdasarkan target nasional

^{e)} Ditingkatkan sesuai AHH provinsi (Th 2016, AHH Sumsel: 69,16; Banyuasin: 68,33; Musi Banyuasin: 68,11)

Tabel 7.6 Indikator dan Target Tema Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di Pedesaan

No	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Dambaan	Target
1	Peningkatan produktivitas petani	Nilai tukar petani (NTP)	peningkatan NTP	NTP diatas 100%
2	Pengembangan Industri Pengolahan di Pedesaan	Pendapatan regional dari sektor pengolahan	Meningkatnya pendapatan regional dari sektor pengolahan	Peningkatan 20% pendapatan regional dari sektor pengolahan
		Serapan tenaga kerja sektor pengolahan	Meningkatnya serapan tenaga kerja dari sektor pengolahan	Peningkatan 20% serapan tenaga kerja sektor pengolahan
3	Penguatan akses Pembiayaan	Jumlah kredit untuk modal usaha	Meningkatnya jumlah kredit untuk modal usaha	Peningkatan 20% jumlah kredit untuk modal usaha ^{f)}
4	Peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan	Rasio Perempuan dalam Pekerjaan Dibayar Non-Pertanian	Meningkatnya rasio Perempuan dalam Pekerjaan	30% tenaga kerja dari usaha yang dikembangkan adalah wanita

^{f)} usaha yang dimaksud meliputi usaha produksi maupun pengolahan hasil pertanian (*on farm dan off farm*)

Tabel 7.7 Indikator Kinerja Tema V: Pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat

No	Program Prioritas	Indikator Program	Kondisi Dambaan	Target
1	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah	Angka Melek Huruf 100% Rata-rata Lama Sekolah 9 tahun
2	Peningkatan Kesehatan dan Gizi	Angka Harapan Hidup (AHH), Kasus Gizi Buruk	Meningkatnya AHH, menurunnya Kasus Gizi Buruk	AHH naik sesuai dengan AHH provinsi Tidak ada kasus gizi buruk
3	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah KK dengan akses air bersih dan sanitasi layak	Meningkatnya jumlah KK dengan akses air bersih dan sanitasi layak	5000* KK meningkat akses thd air bersih. 50 desa mempunyai sanitasi layak
4	Pengurangan Emisi Sektor Energi	Emisi sektor energi Jumlah KK terakses EBT	Penurunan emisi sektor energi Meningkatnya jumlah KK terakses EBT	Penurunan emisi sektor energi sebesar 29% 1000 KK terakses EBT
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	Panjang ruas jalan yang dapat diakses masyarakat	Meningkatnya Panjang ruas jalan yang dapat diakses masyarakat	Peningkatan jalan masuk desa pada 20 desa
6	Penguatan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan RPJMDes yang tepat sasaran Jumlah desa dengan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam hal laporan keuangan	Meningkatnya jumlah desa dengan RPJMDes yang tepat sasaran Meningkatnya jumlah desa dengan status WTP	50% desa memiliki RPJMDes yang tepat sasaran dan status WTP
7	Pengembangan sistem perlindungan sosial desa	Jumlah orang yang mendapatkan sistem perlindungan sosial desa	Meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan sistem perlindungan sosial desa	Terbangunnya sistem perlindungan sosial di 20 desa dengan pola kemitraan
8	Pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat	Jumlah kegiatan budaya, jumlah sekolah yg menerapkan kurikulum muatan lokal terkait budaya dan tradisi	Meningkatnya Jumlah kegiatan budaya, jumlah kurikulum muatan lokal terkait budaya dan tradisi	Tersedianya kurikulum muok berbasis ekosistem dan tradisi setempat 20 SD 10 SLTP

Integrasi sektor-sektor pembangunan dirancang dalam setiap tema kemitraan. Integrasi tersebut diawali dengan mengidentifikasi program dan kegiatan nomenklatur (inisiatif pemerintah) dan non nomenklatur (inisiatif stakeholder lain) yang mendukung pencapaian indikator program prioritas. Identifikasi ini dilakukan untuk merumuskan target bersama dalam penyusunan Rencana Aksi Kemitraan. Dalam **Lampiran 2** dokumen ini, ditampilkan tabel identifikasi program/ kegiatan stakeholder dalam masing-masing tema kemitraan. Program dan kegiatan nomenklatur adalah program dan kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan program dan kegiatan stakeholder lain merupakan program/ kegiatan non nomenklatur.

Proyek KELOLA Sendang (KS) sebagai inisiatif pengembangan kemitraan pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku memiliki beberapa program dan kegiatan di dalam lanskap ini. Untuk memetakan posisi program dan kegiatan tersebut dalam masterplan, pada **Lampiran 2** diberikan kolom khusus KELOLA Sendang (KS).

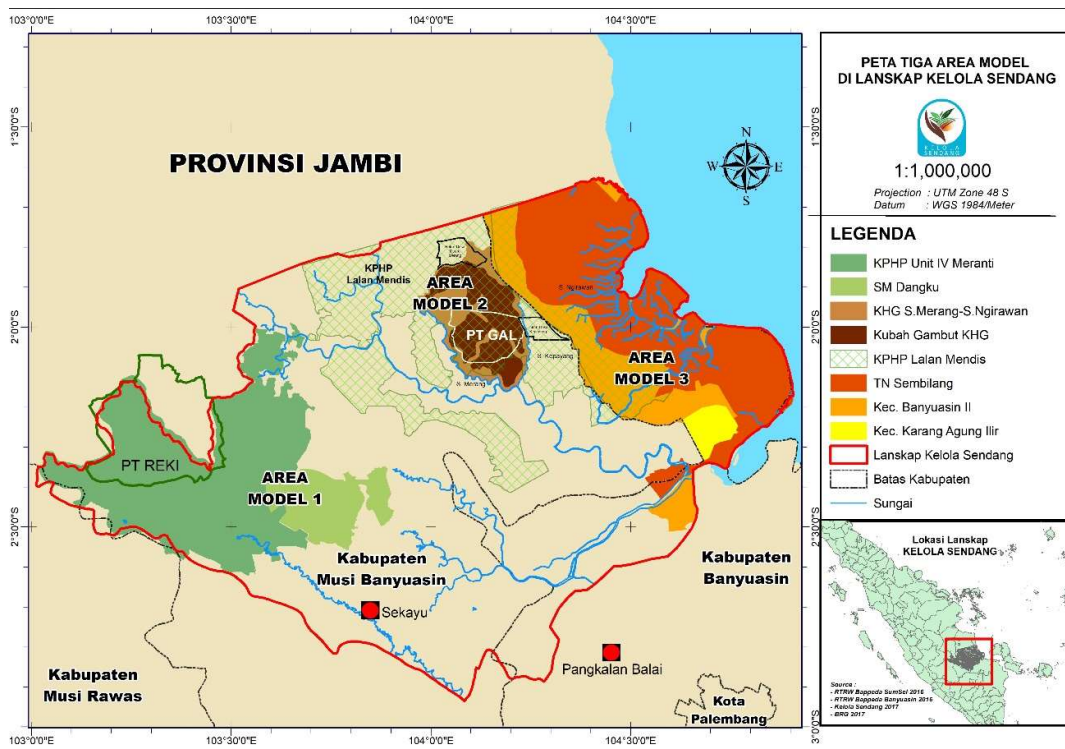
7.4. Desain Aksi Kemitraan

7.4.1. Pengembangan Area Model Kemitraan

Untuk mengimplementasikan tema-tema kemitraan yang telah dirumuskan, telah ditetapkan 3 area model. Penetapan area model dilakukan untuk membatasi unit analisis di tingkat tapak. Area model kemitraan tersebut adalah:

1. Kawasan Dangku Meranti
2. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang – Sungai Ngirawan
3. Kawasan Penyangga Taman Nasional Berbak Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir

Ketiga Area model ini mempunyai pendekatan yang berbeda dalam penentuan batas area. Batas Area Model pertama didekati dengan batas SM (Suaka Margasatwa) dan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), Area Model kedua didekati dengan batas alam berupa Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), sedangkan area model ketiga berupa wilayah administrasi kecamatan.



Gambar 7.4 Peta Lokasi Area Model Kemitraan

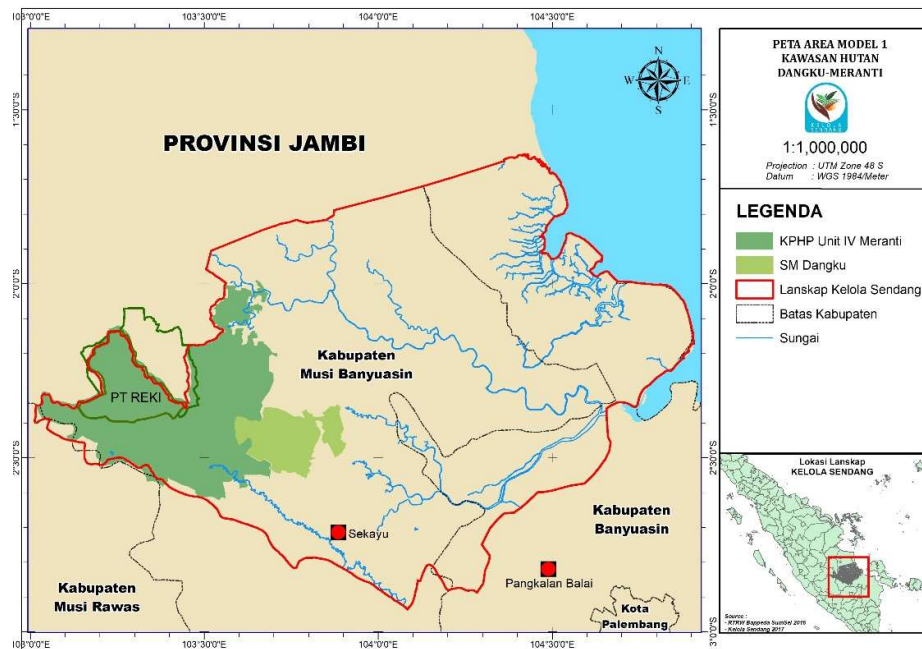


Rencana Induk ini disusun untuk memberikan panduan kepada para pihak untuk melakukan sinergi menuju visi lanskap berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan dokumen ini di tingkat tapak perlu didukung oleh rencana aksi (*action plan*) yang lebih operasional. Dokumen ini telah menyediakan kerangka kerja (*framework*) yang dapat digunakan sekaligus mempermudah parapihak dalam menyusun rencana aksi dengan pertimbangan pertimbangan khusus sesuai kondisi di tingkat tapak (area model).

Parapihak yang akan bermitra pada area model akan menentukan *tema kemitraan* yang tepat untuk diselenggarakan pada lokasi tersebut. Selanjutnya para mitra akan dapat menentukan Indikator Kinerja lanskap berkelanjutan yang akan digunakan dalam mengukur kinerja kemitraan sekaligus menentukan target yang akan diraih dan dampak yang diharapkan dalam periode tertentu berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dipilih. Area model ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya kemitraan di Lanskap Sembilang Dangku.

7.4.1.1. Area Model 1: Kawasan Dangku Meranti

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Meranti berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan perhitungan berbasis SK Menteri Kehutanan Nomor 822/Menhut-II/2013, luas KPHP Unit IV Meranti seluas 244.162 ha dan di dalam wilayah KPHP Unit IV Meranti masih terdapat areal seluas 35.642 Ha yang belum dibebani ijin.⁶¹



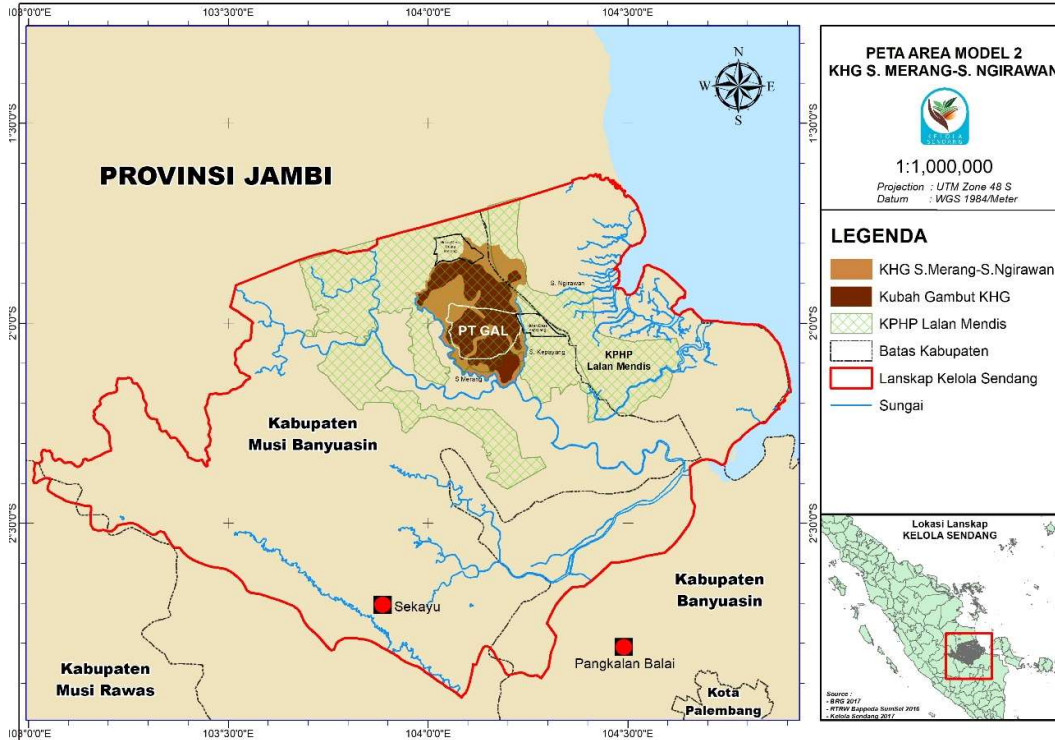
Gambar 7.5 Peta Lokasi Area Model 1: Kawasan Dangku Meranti

⁶¹ Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Meranti periode tahun 2015-2024

Berdasarkan tata ruang pemegang izin, pengelolaan terbagi dalam ruang tanaman pokok, ruang tanaman kehidupan dan ruang areal konservasi/ perlindungan dan kondisinya sampai belum maksimal dikarenakan konflik (masyarakat, swasta, pemerintah). Saat ini wilayah KPHP Meranti sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengelolaan yang belum tertata sehingga berpengaruh pada nilai ekologi dan nilai ekonomi maupun nilai sosial kawasan.

7.4.1.2. Area Model 2: KHG Sungai Merang – Sungai Ngirawan

Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang - Sungai Ngirawan secara administratif terletak di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Banyuasin. Luas KHG ini menurut Peta KHG dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 adalah 35.014 Ha. Di dalam KHG ini terdapat area konsesi beberapa perusahaan dan area kelola masyarakat. Perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan restorasi, HTI dan perkebunan sawit.

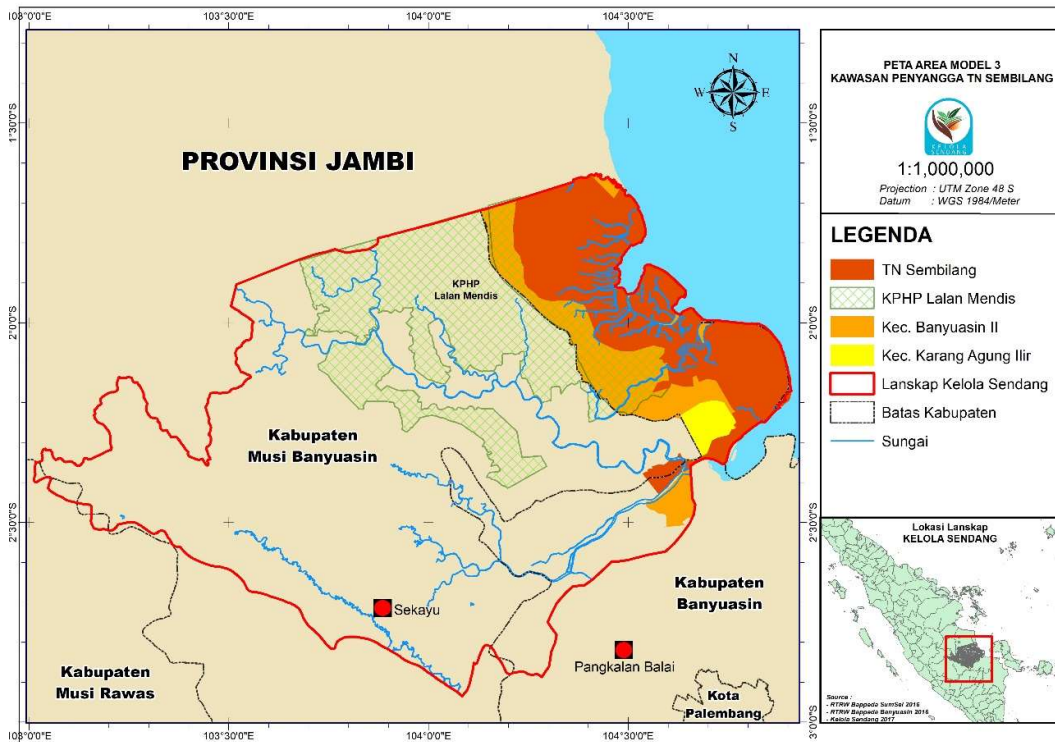


Gambar 7.6 Peta Lokasi Area Model 2: KHG S. Merang - S. Ngirawan

Kemitraan di KHG ini diperlukan untuk mengelola lahan gambut di area KHG. Perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan di area ini mempengaruhi kebutuhan akan pengelolaan air (*water management*) yang berbeda. Salah satu pemangku kepentingan di area ini yang telah melakukan berbagai kegiatan terkait pengelolaan air yang melibatkan pihak lain adalah PT. GAL yang melakukan usaha restorasi ekosistem.

7.4.1.3. Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan Karang Agung Ilir

Kecamatan Banyuasin II merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2018, kecamatan ini mengalami pemekafan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Karang Agung Ilir. Di dalam batas administrasi kecamatan Banyuasin II terdapat kawasan hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan konservasi berada di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Di dalam taman nasional tersebut terdapat 2 kawasan *enklave* yang berada dalam administrasi Kecamatan Banyuasin II, yaitu Desa Tanah Pilih dan Dusun Sembilang yang merupakan bagian dari Desa Sungsang IV. Mata Pencaharian masyarakat di dalam dan di sekitar taman nasional sebagian besar terkait dengan perikanan. Kegiatan perikanan tersebut adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan produk perikanan.



Gambar 7.7 Peta Lokasi Area Model 3: Kawasan Penyangga TN Berbak Sembilang di Kec. Banyuasin II dan Kec. Karang Agung Ilir

Kawasan konservasi Taman Nasional Sembilang memiliki arti penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati baik secara nasional maupun internasional. Kawasan ini merupakan kawasan penting bagi burung air migran yang secara rutin singgah. Salah satu permasalahan yang dihadapi taman nasional ini adalah *illegal logging* dan penangkapan ikan di wilayah lautnya.



7.4.2. Pengembangan Database Lanskap Sembilang Dangku

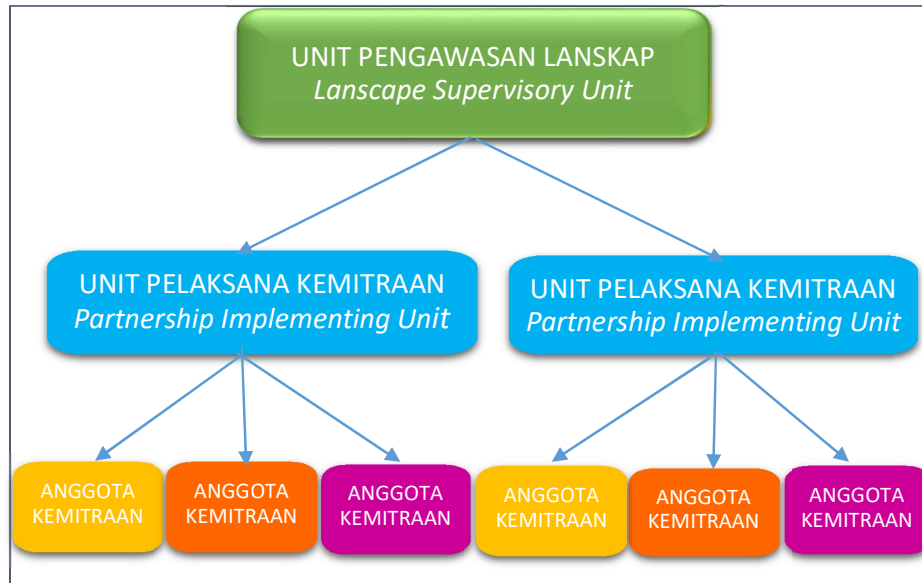
Saat ini data mengenai kondisi lanskap Sembilang Dangku belum memadai. Data-data tersebut sebagian telah dikumpulkan oleh instansi dan lembaga yang terkait dengan lanskap. Sebagian data masih harus dikumpulkan dari lapangan. Untuk itu di awal aksi kemitraan dilakukan pengumpulan data sekaligus penyusunan database lanskap yang dapat mengakomodir dinamika kondisi di dalam lanskap.

7.5. Desain Kelembagaan

Pendekatan kemitraan adalah sebuah ide baru dalam penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan para aktor dalam posisi yang lebih setara. Hal ini sebagai pembaharuan dari pendekatan lama yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan. Menyelenggarakan sebuah sistem atau pola kemitraan akan sedikit banyak mengubah pola hubungan antara para aktor yang terlibat. Untuk itu perlu dirumuskan sebuah skema kelembagaan dengan karakteristik sebagai berikut:

- Mendorong terjadinya keterpaduan antar aktor yang terlibat.
- Mendukung dan mendorong berkembangnya sistem perencanaan bersama (perencanaan kolaboratif)
- Meningkatkan peran para aktor untuk mewujudkan visi yang telah disepakati bersama
- Mendorong peningkatan kapasitas para aktor
- Menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi

Berdasarkan pertimbangan diatas maka disusun sebuah skema kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku sebagai berikut:



Gambar 7.8 Model Kelembagaan dalam Kemitraan Pengelolaan Lanskap

Unit Pengawasan Lanskap dipimpin oleh seorang koordinator dan dibantu oleh beberapa anggota yang akan membantu sesuai beberapa fungsi diatas. Sedangkan Unit Pelaksana Kemitraan juga akan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari aktor kemitraan. Dalam hal ini koordinator Unit Pelaksana Kemitraan dapat berasal dari pemerintah, swasta ataupun anggota masyarakat. Jumlah Unit Pelaksana Kemitraan akan menyesuaikan dengan jumlah area model yang ada.

Fungsi dari unsur-unsur dalam model kelembagaan dalam kemitraan lanskap adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengawasan Lanskap
 - Perencanaan tingkat lanskap
 - Pemantauan dan Evaluasi
 - Jejaring dan Dukungan Kebijakan
 - Mengembangkan Forum Multipihak Tingkat Lanskap, Provinsi, Nasional
2. Unit Pelaksana Kemitraan
 - Koordinasi dan Sinergi Mitra Tingkat Area Model
 - Perencanaan Tingkat Area Model
 - Pendataan
 - Mengembangkan Forum Multipihak Tingkat Area Model
3. Anggota Kemitraan

Melaksanakan kegiatan/ program sesuai dengan peran masing-masing untuk mencapai tujuan, sasaran dan target bersama.



7.6. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan program dan kegiatan kemitraan yang tertuang dalam rencana induk ini perlu didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi untuk menjamin tercapainya output, manfaat dan dampak yang diharapkan dari kemitraan itu sendiri. Terkait sistem monitoring dan evaluasi ini terdapat beberapa aspek atau unsur dalam sistem monitoring dan evaluasi itu sendiri. Beberapa unsur yang harus ditetapkan dalam sistem monitoring dan evaluasi adalah:

1. Pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi
2. Aspek-aspek yang dipantau dan dievaluasi
3. Intensitas pemantauan dan evaluasi
4. Alat atau media pemantauan dan evaluasi

7.6.1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan dari skema kelembagaan yang ada maka yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi ini adalah pihak *Landscape Supervisory Unit*. Koordinator *LSU* dan anggotanya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dengan mengkaji laporan pelaksanaan program atau menyelenggarakan pertemuan bersama dengan para PIU, anggota kemitraan ataupun masyarakat luas terutama masyarakat pada desa-desa sasaran program dan kegiatan.

7.6.2. Aspek-aspek yang Dipantau dan Dievaluasi


Secara mendasar monitoring akan dilakukan terhadap aspek kemitraan itu sendiri . Beberapa aspek yang dipantau dalam penyelenggaraan kemitraan ini adalah:

- Perkembangan pelaksanaan dalam hal ini kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan
- Permasalahan yang muncul dan langkah-langkah untuk mengatasinya
- Kebutuhan atau dukungan kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan

Sedangkan proses evaluasi akan difokuskan pada capaian atas target berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam setiap program ataupun kegiatan.

Untuk program jangka panjang evaluasi dilakukan terhadap dampak yang muncul dari pelaksanaan program/kegiatan. Untuk melakukan evaluasi ini maka perlu disusun indikator kinerja kemiraan sebagai dasar untuk mengetahui perkembangan. Dalam hal ini evaluasi akan didasarkan pada capaian terhadap indikator kinerja program-pogram prioritas yang telah disusun berdasarkan alur kerangka kerja tematik-kolaboratif (*cascade*) yang telah disusun.

7.6.3. Intensitas Monitoring dan Evaluasi



Pelaksanaan monitoring akan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan evaluasi setiap 6 bulan sekali.

7.6.4. Media dan Alat Pemantauan dan Evaluasi

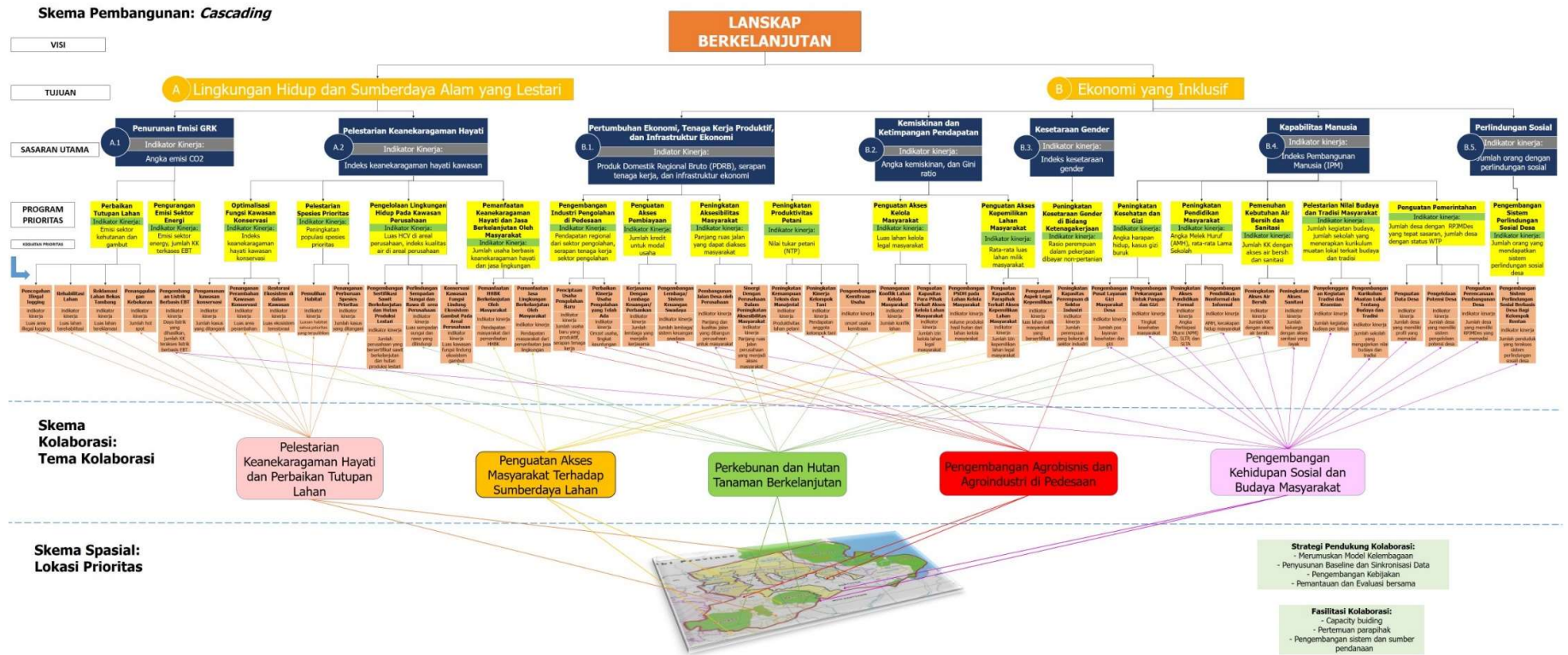
Beberapa media ataupun alat akan digunakan oleh Landscape Supervisory Unit untuk melakukan proses evaluasi. Beberapa media yang akan dipakai adalah:

- Pertemuan dan diskusi dengan PIU dan mitra
- Kunjungan lapangan untuk memberikan penilaian terhadap hasil program dan kegiatan kemitraan.
- Pengukuran terhadap beberapa *Indikator Kinerja* lanskap berkelanjutan yang ditangani oleh PIU dan para mitra
- Wawancara dengan kelompok sasaran untuk mengetahui manfaat dan dampak kegiatan atau program bagi masyarakat

Selanjutnya *LSU* dapat menyusun dan menerbitkan laporan hasil pemantauan ataupun evaluasi yang akan digunakan oleh para mitra dalam menentukan dan atau memperbaiki langkah-langkah selanjutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kerangka Logis Alur Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Danguku



Lampiran 2. Tabel Identifikasi Program dan Kegiatan Stakeholder

TEMA 1: PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERBAIKAN TUTUPAN LAHAN

Program Prioritas	Indikator Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Program/ Kegiatan Non Nomenklatur		Stakeholder			
						KS	Non KS				
Perbaikanutupan lahan	Emisi Sektor kehutanan dan gambut	Pencegahan Illegal Logging	luas areal illegal logging	Penurunan laju deforestasi (DISHUT)	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem di areal kerja izin usaha Dishut: Penyelidikan Kasus-kasus Peredaran hasil Hutan,	Patroli bersama		Dishut prov, BKSDA, TN Sembilang, KPHP Lalan Sembilang dan Meranti, Pemegang konsesi, GAKUM KLHK			
				Menurunkan laju degradasi hutan (DISHUT)	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Patroli pengamanan kawasan hutan						
				Peningkatan penerimaan subsektor kehutanan (DISHUT)	Pengendalian peredaran hasil hutan						
		Rehabilitasi lahan	luas lahan terehabilitasi	Review Lahan Kritis (BPDASHL)	BPDASHL : Kegiatan Kebun Bibit Rakyat,	Restorasi hutan berbasis masyarakat , Model Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat				BPHP Wil. V Palembang terkait rehab di KPHP, Dishut prov bidang RHL, KPH Lalan Sembilang dan KPH Meranti, PT GAL, Perusahaan Swasta Sperti Medco dan PLN	
					BPDASHL : Bibit Produktif, menentukan IPPKH						
					Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan (DISHUT)						Dishut: Pengembangan Sistem Agroforestry ,di kawasan HL Dishut: Bantuan Bibit,
		Reklamasi Lahan Bekas Tambang	Luas Lahan tereklamasi								DESDM provinsi, Dishut prov, Pemegang konsesi, DLH prov dan kabupaten
		Penanggulangan Kebakaran	jumlah hot spot	Program Penurunan Laju Deforestasi (DISHUT)	Dishut: Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,	Pencegahan Kebakaran Berbasis Masyarakat					Balai PPI Wil. Sumsel, BPBD Prov dan kab, POLDA, TNI, Private, Masyarakat
					Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan						

					Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			
				Pengendalian Perubahan Iklim	Balai PPI : Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan (Sosialisasi, Patroli terpadu, patroli mandiri, Pembinaan KMPA, pemadaman oleh PPI)			
				Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK (DISHUT)	Kegiatan Perubahan Iklim			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan (DISBUN)	Pembinaan dan Antisipasi Kebakaran Lahan Perkebunan (Dinas Perkebunan)			
Optimalisasi Fungsi Kawasan Konservasi	Indeks Keanekaragaman Hayati Kawasan Konservasi	Pengamanan kawasan konservasi	jumlah kasus yang ditangani			Pengembangan SMART Patrol		Dishut prov, BKSDA, TN Sembilang, KPHP Lalan Sembilang dan Meranti, Pemegang konsesi, GAKUM KLHK
		Penanganan Perambahan kawasan konservasi	luas area perambahan					Dishut prov, BKSDA, TN Sembilang, KPHP Lalan Sembilang dan Meranti, Pemegang konsesi, GAKUM KLHK
		Restorasi Ekosistem di dalam Kawasan	Luas ekosistem terestorasi	Perlindungan dan Konservasi SDA	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan Konservasi SDA			BKSDA, TN Sembilang, Dinas Lingkungan Hidup
Pelestarian spesies prioritas	Peningkatan populasi spesies prioritas	Pemulihan Habitat	luas habitat satwa prioritas yang terpulihkan	Pemulihan Ekosistem (KSDA)	Pemulihan Ekosistem Secara Alami Pemulihan Ekosistem Intensif (Buatan)	restorasi/ rehabilitasi habitat spesies kunci		BKSDA, KPHP Lalan Sembilang dan Meranti, BPHP, Pemegang konsesi, Perbakin
		Penanganan perburuan spesies prioritas	jumlah kasus yang ditangani	Patroli, Penyuluhan dan TO				BKSDA, KPHP Lalan Sembilang dan Meranti, BPHP, Pemegang konsesi, Perbakin, GAKUM KLHK

TEMA 2: PENGUATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBERDAYA LAHAN

Program prioritas	Indikator Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Kegiatan Non Nomenklatur		Stakeholder	
						KS	Non KS		
Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan Berkelanjutan oleh masyarakat	Jumlah usaha berbasis keaneekaragaman hayati dan jasa lingkungan	Pemanfaatan HHBK Berkelanjutan Oleh Masyarakat	pendapatan masyarakat dari pemanfaatan HHBK di dalam kawasan	Peningkatan penerimaan subsektor kehutanan (Dishut)	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produksi/ jasa HHBK (Dishut) Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung (Dishut)			Dishut	
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berkelanjutan oleh masyarakat	pendapatan masyarakat dari pemanfaatan jasa lingkungan	cek BKSDA dan Balai Taman Nasional				BKSDA, Balai Taman Nasional, Dinas terkait di Kabupaten/Provinsi	
Penguatan akses kelola masyarakat	Luas lahan kelola legal masyarakat	Penanganan konflik lahan kelola masyarakat	jumlah konflik lahan	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat (DLHP)	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	Pemetaan Areal Kelola Masyarakat/ CLUP (Yayasan PUTER)		Dinas LHP, Yayasan Puter, FPP - HaKI, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan	
				Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (DLHP)	Mediasi sngketa pertanahan di Sumsel	Sistem Informasi dan Monitoring Berbasis Masyarakat / CBMIS (Yayasan PUTER)	Pengembangan Model Penyelesaian Konflik Secara Inklusif (FPP HaKI)		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan (DISBUN)	Fasilitasi, Inventarisasi Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan				
		Penguatan kapasitas parapihak terkait akses kelola lahan masyarakat	jumlah izin kelola lahan legal masyarakat	Program Peningkatan Produksi Kayu HT	Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengembangan Model Perhutanan Sosial kolaboratif			Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
		Pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan pada lahan kelola masyarakat	volume produksi hasil hutan dari lahan kelola masyarakat	Program Peningkatan Produksi Kayu HTI	Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD)	Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel

Penguatan akses kepemilikan lahan masyarakat	Luas kepemilikan lahan legal masyarakat	Penguatan kapasitas parapihak terkait akses kepemilikan lahan masyarakat	Jumlah Izin kepemilikan lahan legal masyarakat					BPN, DLHP, Satgas Reforma Agraria Muba
		Penguatan aspek legal kepemilikan lahan	Luas lahan milik masyarakat yang bersertifikat					

TEMA 3: PERKEBUNAN DAN HUTAN TANAMAN BERKELANJUTAN

Program prioritas	Indikator Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Program/ Kegiatan Non Nomenklatur		Stakeholder
						KS	Non KS	
Pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan perusahaan	Luas HCV di areal perusahaan Indeks kualitas air di areal perusahaan	Pengembangan sertifikasi sawit berkelanjutan dan hutan produksi lestari	Jumlah perusahaan yang bersertifikat sawit berkelanjutan dan hutan produksi lestari			Penguatan Perusahaan dalam Implementasi SMART dan SPOTT		Perusahan sawit, HTI, GAPKI, APHI, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas PMD, BRG, TRGD, KS
		Perlindungan sempadan sungai dan rawa di areal perusahaan	Luas sempadan sungai dan rawa yang dilindungi	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Air	Fasilitasi Teknis Restorasi Kerjasama restorasi dengan perusahaan		
		Konservasi kawasan fungsi lindung ekosistem gambut pada areal perusahaan	Luas kawasan fungsi lindung ekosistem gambut			Penguatan Kapasitas Sektor Swasta dalam Menerapkan Proper		
Pengurangan Emisi Sektor Energi	Emisi sektor energi	Pengembangan listrik berbasis EBT	Daya listrik yang dihasilkan					
Peningkatan peran perusahaan dalam aksesibilitas masyarakat	Panjang jalan yang dibangun perusahaan untuk masyarakat	Pembangunan Jalan Desa Oleh perusahaan	Panjang jalan yang dibangun perusahaan untuk masyarakat					
Peningkatan peran perusahaan dalam produktivitas petani	Pendapatan petani di desa sekitar perusahaan	Pengembangan kemitraan usaha	omset usaha kemitraan	Program Pembangunan Bidang Ekonomi	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan CSR di Sekitar Perusahaan untuk			Perusahan sawit, HTI, GAPKI, APHI, Dinas Perkebunan,

					Peningkatan Perekonomian Masyarakat			Dinas Kehutanan, Dinas PMD, KS
Peningkatan peran perusahaan dalam pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi	jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan	Peningkatan akses air bersih	jumlah rumah tangga dengan akses air bersih					Perusahan sawit, HTI, GAPKI, APHI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan
		Peningkatan akses sanitasi	jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi					
Peningkatan peran perusahaan dalam akses Pendidikan Masyarakat	Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah di desa sekitar perusahaan	Pengembangan fasilitas pendidikan non formal dan informal oleh perusahaan	jumlah siswa yang terakses fasilitas pendidikan non formal dan informal					Perusahan sawit, HTI, GAPKI, APHI, Dinas Pendidikan
Peningkatan peran perusahaan dalam Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup, Kasus Gizi Buruk di desa sekitar perusahaan	Pengembangan Pusat Layanan Gizi Masyarakat Oleh perusahaan	Jumlah Pos Layanan Gizi Masyarakat					Perusahan sawit, HTI, GAPKI, APHI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan

TEMA 4: PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN AGROINDUSTRI DI PEDESAAN

PROGRAM PRIORITAS	Indikator Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator kegiatan Prioritas	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	KEGIATAN NON NOMENKLATUR		STAKEHOLDER
						KS	Non KS	
Peningkatan produktivitas petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	peningkatan kemampuan teknis dan manajerial petani	produktivitas lahan petani	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau, dan air tawar	Pengembangan Minapadi (UGADI)	Peningkatan Kapasitas Petani Sawit dan Karet dalam penerapan Best Management Practices (SNV)	Penyusunan Bussiness Plan pada KPH Lalan Mendis (Deltares)	Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMD
				Pengembangan Perikanan Budidaya (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Bantuan paket pengembangan budidaya perikanan			
					Paket sarana dan prasarana budidaya di desa model dan lumbung pangan			
					Bantuan sarana dan Prasarana UPR (Unit Pembenihan Rakyat)			
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan Ternak Integrasi Tanaman	Pengembangan Ternak Kambing						

					Pengembangan demplot ternak			
				Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan (Distan)	Kegiatan Pemasarakatan Benih Unggul Tanaman Pangan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas			
				Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas (Distan)	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sayuran Pengembangan Penangkaran Benih Padi dan Kedelai			
				Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Distan)	Kegiatan Pengembangan Air Irigasi untuk Pertanian			
				Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Pengembangan Varietas Tanaman Perkebunan			
					Peningkatan Kualitas Bahan Baku			
				Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi (Dishut)	Pembuatan Demplot teknik budidaya agroforestry dan konsevasi tanah dan air			
				Peningkatan Produksi Kayu dan HTI (Dishut)	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Hak			
					Perencanaan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan	Pelatihan dan pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi			
					Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet			
				Peningkatan Saran dan Prasarana Perkebunan	Pengembangan Pupuk Organik			
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Disbun)	Peremajaan tanaman kelapa			
				Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa (Dinas PSDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
		Peningkatan kinerja kelompok tani	pendapatan anggota kelompok tani	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Penguatan Kelompok Masyarakat Pengelola Kerbau Rawa			Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan

								dan Perikanan, Dinas Kehutanan
Pengembangan Industri Pengolahan di Pedesaan	Pendapatan regional dari sektor pengolahan Serapan tenaga kerja sektor pengolahan	Penciptaan usaha pengolahan baru	Jumlah usaha baru yang produktif, serapan tenaga kerja	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (Dinas Koperasi)	Pertumbuhan Usaha Baru (Dinas Koperasi)	Pengembangan wira usaha di masyarakat	Sistem Penjualan Bersama (Karet Bersih)	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas PMD, KS, SNV, IDH
				Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan (Dishut)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Produksi/Jasa HHBK Pada UPTD KPH (Dishut)			
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (Distan)	Pembinaan Pengolahan Hasil Peternakan			
				Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian (Distan)	Kegiatan Pengadaan Alat Pasca Panen			
					Kegiatan Peningkatan Penanganan Pasca Panen			
					Kegiatan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Hortikultura			
					Kegiatan Peningkatan Pengolahan Hasil Hortikultura			
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/ PPHP (Disbun)	Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			
					Bantuan Alat Pengolahan Kopi Rakyat			
					Promosi dan Pemasaran Komoditi Perkebunan			
Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan / PKUP (Dinas Perkebunan)	Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
	Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan							
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan							
Pengembangan Industri Kreatif	Pelatihan Produksi							
	Pengembangan Industri Minyak Atsiri							
	Peningkatan partisipasi usaha keluarga miskin di pedesaan							

				Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD)	Penguatan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan			
				Peningkatan Pemasaran Hasil UMKM	Peningkatan fektivitas Promosi dan Akses Pasar			
				Pengembangan Kemitraa	Peningkatan Jaringan Pemasaran UMKM			
				Designer Dispatch Service/DDS (Disperin)	sesuai produk yang dikembangkan (Leker, Resam, Bantal Kursi/ Angkinan, Partisi ruang			
		Perbaiki kinerja usaha pengolahan yang telah ada	Omzet usaha, tingkat keuntungan	Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan (Dishut)	Promosi Daerah dan Pameran Kehutanan (Dishut)	Fasilitasi jaringan rantai pasok untuk petani sawit dan karet (KS-SNV)		Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, KS, SNV
				Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Terpadu Perkebunan			
					Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perkebunan			
					Pembinaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Kopi, karet, dll)			
				Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Registrasi dan Pengembangan Manajemen Usaha Perikanan dan bantuan alat pengolahan			
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (Dinas Perindustrian)	Peningkatan dan Pembinaan Industri pengolahan Pakan ternak			
				Program Pengembangan dan Pembinaan Ovop	Pengembangan dan Pembinaan IKM			
				Program Pengembangan Klaster Industri	Pengembangan dan bantuan peralatan Industri Pengolahan berbasis Kelapa			
					Pengembangan dan bantuan Peralatan Industri Pengolahan Kopi			
					Pengembangan dan Bantuan Peralatan Industri Pengolahan dari Limbah Minyak Atsiri			
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah			

				Peningkatan Daya Saing (DISPRINDAGKOP)	Bimbingan Teknis Bantuan Peralatan Pendampingan Produksi dan Magang			
				Peningkatan Nilai Tambah (DISPERINDAGKOP)	Diversifikasi Produk : Pakan Ternak, Olahan Limbah Pertanian, Karet, Kopi, Batubara Produksi Pakan Ternak Sapi Berbasis limbah pertanian			
				Sistem Resi Gudang (Distan)	Pembangunan Gudang Penguatan Kelembagaan dan jejaring			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan			
				Peningkatan Pemasaran Hasil UMKM	Peningkatan fektivitas Promosi dan Akses Pasar			
				Pengembangan Kemitraa	Peningkatan Jaringan Pemasaran UMKM			
				Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi (Disperin)	Pembinaan Kelompok			
Penguatan akses Pembiayaan	Jumlah kredit untuk modal usaha	Kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan	Jumlah lembaga yang menjalin kerjasama	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pemasaran dan Industri Hasil Pertanian	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Pengembangan Akses Pembiayaan Usaha		Dinas Pertanian, KS, Dinas PMD
		Pengembangan Lembaga/Sistem Keuangan Swadaya	Jumlah lembaga/ sistem keuangan swadaya	Peningkatan Saran dan Prasarana Perkebunan	Pengembangan Pembiayaan Usaha Perkebunan	Penguatan Kelembagaan Pengelola Dana		Dinas Perkebunan, KS, Dinas PMD
				Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Penguatan Lembaga Keuangan Mikro di Perdesaan			
Peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan	Rasio Perempuan dalam Pekerjaan Dibayar Non-Pertanian	Peningkatan kapasitas perempuan di sektor industri	Jumlah perempuan yang bekerja di sektor industri	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Peningkatan Partisipasi Usaha Keluarga Miskin di Pedesaan	Perempuan dan agroekologi	Pelatihan ketrampilan kerja untuk perempuan	Dinas PMD, Dinas Perindustrian, KS

TEMA 5: PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Program prioritas	Indikator Program prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator Kegiatan Prioritas	Program Nomenklatur	Kegiatan Nomenklatur	Program/ Kegiatan Non Nomenklatur		Stakeholder				
						KS	Non KS					
Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah,	peningkatan akses pendidikan formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA	Rehap pemeliharaan jalan dan jembatan(lampiran Permendagri no 13 tahun 2006)	Perencanaan rehabilitasi/pemeilharaan jalan Rehabilitasi pemeliharaan		penataan dan pemerataan guru	Bappeda, PU, Perkimtan, pemprov, Kementrian dan kelembagaan Dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten				
				Pendidikan usia dini	Pembangunan gedung sekolah (jumlah sekolah)							
				pendidikan wajib belajar 9 tahun	Penambahan ruang kelas sekolah (rasio siswa berbanding ruang kelas)							
				pendidikan menengah	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK							
				Pendidikan Menengah	Pembangunan Gedung SMA							
		Pengembangan pendidikan non formal dan informal	Angka Melek Huruf (AMH) Kecakapan hidup masyarakat	Pendidikan non formal (PNF)					pemberdayaan tenaga pendidik non formal;			Dinas Pendidikan Kab. dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUTR dan Dinas Perkimtan
									Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal			
									Penyediaan sarana dan prasarana non formal			
									Pengembangan pendidikan kecakapan hidup			
Peningkatan Kesehatan dan Gizi	Angka Harapan Hidup, Kasus Gizi Buruk	Pengembangan Pusat Layanan Gizi Masyarakat Desa	Jumlah Pos Layanan Kesehatan dan Gizi	Upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya			Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PMD, PKK				
				Perbaikan gizi masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin Akselerasi program HPK							
				Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat							
					Penyebarluasan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perilaku Hidup Sehat melalui Berbagai Media							

				Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan			
		Pengembangan Pekarangan Untuk Pangan dan Gizi	tingkat kesehatan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi Penanggulangan kurang energi protein dll Kawasan Rumah Pangan Lestari Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	Penyediaan Saprotan Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Program Perempuan dan Agroekologi		Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PMD, KS
Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah KK dengan akses air bersih dan sanitasi	Peningkatan akses air bersih	Jumlah KK dengan akses air bersih	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku (PSDA) Penanggulangan Bencana (PSDA) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (DLHP)	PSDA Wilayah Sungai Musi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Penyediaan sarpras air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pengembangan sistem distribusi air minum			Dinas Perkim, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, KL dan Pemprov
		Peningkatan akses sanitasi	Jumlah KK dengan akses sanitasi yang layak	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program pengembangan lingkungan sehat (DLHP) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan (Perkim) Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah (Perkim) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan (Perkim)	Penyediaan sarpras air limbah Pengembangan teknologi pengolahan dan air limbah Pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Pengadaan Cetakan Jamban Sehat dan Murah Perbaikan dan peningkatan tempat mandi dan cuci masyarakat desa Pengembangan jaringan SPAM IKK Optimalisasi SPAM IKK			Dinas Perkim, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, KL dan Pemprov
Pengurangan Emisi Sektor Energi	Emisi sektor energi	Pengembangan listrik berbasis EBT	Jumlah KK terakses listrik	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru	Pengembangan PLTS dan PLTMH Pengembangan Biogas			Dinas ESDM, Dinas PMD

	Jumlah KK terakses EBT		berbasis EBT Daya listrik yang dihasilkan	untuk Kebutuhan Listrik bagi Masyarakat (ESDM)				
Peningkatan aksesibilitas masyarakat	Panjang ruas jalan yang dapat diakses masyarakat	Penambahan dan peningkatan jalan	Panjang dan kualitas jalan	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	Pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan			Dinas Perkim, Dinas PMD, Dinas PU Bina Marga,
					Pembuatan parit untuk pembuangan limbah rumah tangga			
					Pembangunan jalan setapak			
					Cor beton desa			
					Peningkatan jalan lingkungan			
				Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Perbaikan jalan/ cor beton jalan lingkungan			
					Rehab pengerasan jalan			
				Peningkatan jalan dan penggantian jembatan	Perbaikan jalan lingkungan			
Pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan lingkungan							
Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong	Perbaikan drainase							
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan plat dauker dan drainase							
Penguatan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan RPJMDes yang tepat sasaran, Jumlah desa dengan status WTP	Penguatan Data Desa	jumlah desa yang memiliki profil yang memadai			Community Land Use Planning (CLUP), Community Based Management & Information System		Dinas PMD, KS
		Pengelolaan Potensi Desa	jumlah desa yang memiliki sistem pengelolaan potensi desa	Peningkatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa			Dinas PMD, KS
					Pembinaan Pemanfaatan Aset Desa			
		Penguatan Perencanaan Pembangunan Desa	jumlah desa yang memiliki RPJMDes yang memadai			Integrasi hasil pemetaan desa untuk bahan review perencanaan desa (RPJMDES)		Dinas PMD, KS

Pengembangan sistem perlindungan sosial desa	Jumlah orang yang mendapatkan sistem perlindungan sosial desa	Pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis desa bagi kelompok rentan (manula, ibu hamil, ibu menyusui, balita, miskin, difabel, dll)	Jumlah penduduk yang terakses sistem perlindungan sosial desa	Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (DINSOS)	Pengadaan sarpras pendukung usaha bagi keluarga miskin Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin			Dinas Sosial, Dinas PMD
				Pelayanan dan rehap Kesos (DINSOS)	Pengembangan Kebijakan tentang akses sarpras publik bagi cacat dan lansia			
				Pembinaan anak terlantar (DINSOS)	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar			
				Pembinaan penyandang cacat (DINSOS)	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat Pendayagunaan penyandang cacat			
				Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa (DPMD)	Penyelenggaraan pendidikan tenaga teknis dan masyarakat Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa			
				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (DPMD)	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa			
				Program pengembangan ekonomi pedesaan (DPMD)	Pelatihan ketrampilan management badan usaha milik Pengembangan Wisata Perdesaan			
Pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat	Jumlah kegiatan budaya, jumlah sekolah yg menerapkan kurikulum muatan lokal terkait budaya dan tradisi	Penyelenggaraan kegiatan tradisi dan kesenian	jumlah kegiatan budaya per tahun	Program pengelolaan keragaman budaya (BUDPAR)	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah			Dinas Budaya dan Pariwisata Prov, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kominfo
				Pengelolaan kekayaan budaya (BUDPAR)	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata			
				Program pemasaran pariwisata (BUDPAR)	Pelaksanaan promosi pariwisata			
				Program pengembangan destinasi pariwisata (BUDPAR)	Pengembangan objek pariwisata unggulan			
		Pengembangan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan tradisi	jumlah sekolah yang mengajarkan nilai budaya dan tradisi	Program pendidikan non formal (DISDIKKAB)	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan budaya daerah			Dinas Pendidikan dan Dinas Budaya dan Pariwisata
				Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengembangan Kurikulum			